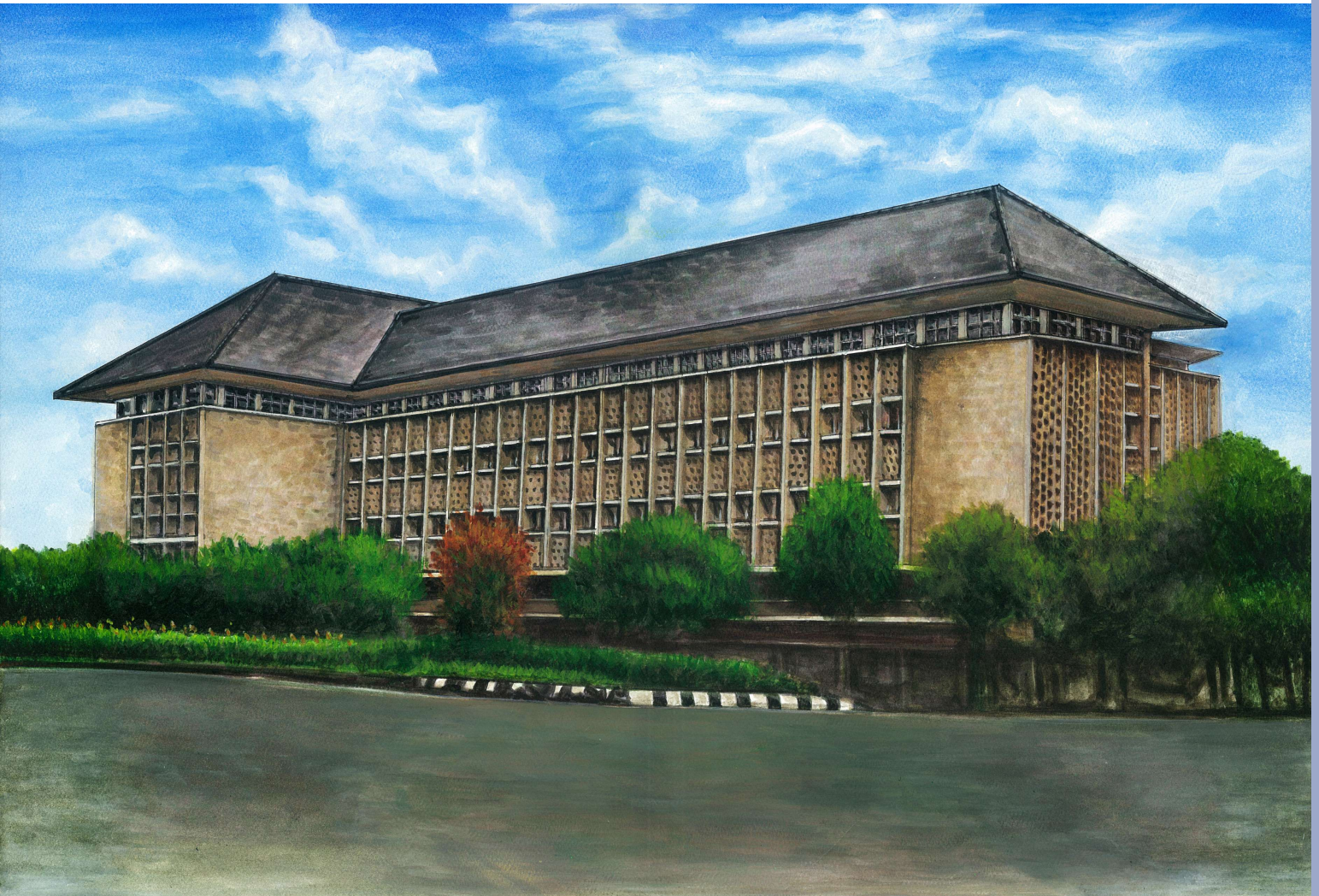


LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BANK INDONESIA TAHUN 2011

ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS BANK INDONESIA 2011





DAFTAR ISI

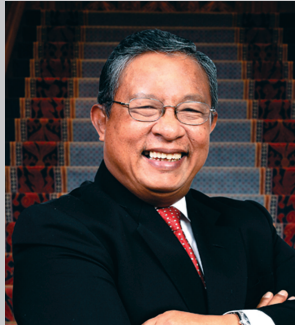
Table of Contents

Kata Pengantar <i>Preface</i>	iii
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan <i>Independent Auditor's Report on the Financial Statements</i>	v
Neraca <i>Balance Sheets</i>	1
Laporan Surplus Defisit <i>Surplus Deficit Statement</i>	3
Laporan Perubahan Ekuitas <i>Statement of Changes in Equities</i>	4
Laporan Arus Kas <i>Cash Flow Statement</i>	5
Catatan atas Laporan Keuangan <i>Notes to Financial Statements</i>	7
A. Umum <i>General</i>	7
B. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan <i>Significant Accounting Policies</i>	14
C. Penjelasan Pos-Pos Neraca, Laporan Surplus Defisit dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Rasio Modal <i>Notes to Balance Sheet, Surplus Deficit Statement and Statement of Changes in Equities</i>	27
D. Penjelasan Lainnya <i>Others</i>	90
E. Komitmen dan Kontijensi <i>Commitments and Contingencies</i>	93
Lampiran <i>Appendices</i>	111
Lampiran 1: Struktur Organisasi Bank Indonesia <i>Appendix 1: Organization Structure of Bank Indonesia</i>	111
Lampiran 2: Daftar Singkatan <i>Appendix 2: List of Abbreviations and Acronyms</i>	113



DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA

Board of Governors of Bank Indonesia



Darmin Nasution
Gubernur
Governor



Hartadi A. Sarwono
Deputi Gubernur
Deputy Governor



Muliaman D. Hadad
Deputi Gubernur
Deputy Governor



Ardhayadi M.
Deputi Gubernur
Deputy Governor



Budi Mulya
Deputi Gubernur
Deputy Governor



Halim Alamsyah
Deputi Gubernur
Deputy Governor



Ronald Waas
Deputi Gubernur
Deputy Governor





KATA PENGANTAR

Preface

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2011 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Laporan Keuangan ini terdiri dari Neraca per 31 Desember 2011, Laporan Surplus Defisit, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas, masing-masing untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011, berikut Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2011 ini memperoleh Pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian** dari BPK. Perolehan pendapat tersebut secara berturut-turut dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun terakhir ini merupakan sebuah pencapaian yang membesarkan hati dan mencerminkan komitmen Bank Indonesia untuk senantiasa transparan dan akuntabel, dalam kerangka perwujudan tata kelola yang baik (*good governance*). Upaya untuk mewujudkan tata kelola yang baik ini ditempuh, karena Bank Indonesia menyadari bahwa kredibilitas sebagai Bank Sentral dalam jangka panjang dapat terwujud dengan dukungan penerapan tata kelola penyelenggaraan Bank Sentral yang baik secara berkesinambungan. Dengan penerapan tata kelola yang baik, pelaksanaan tugas Bank Indonesia dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta terhindar dari penyalahgunaan sumber daya. Pada gilirannya, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para *stakeholders*, sehingga Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas di masa yang akan datang dengan lebih baik.

Pada kesempatan ini, perkenankan pula Dewan Gubernur Bank Indonesia menyampaikan terima kasih kepada BPK

It is with thanks to the Almighty God that we herewith present the Annual Financial Statements of Bank Indonesia for 2011, as audited by the State Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). The Financial Statements include the Balance Sheet as at December 31, 2011, as well as the Statements of Surplus Deficit, Changes in Equity, and Cash Flow for the period January 1 to December 31, 2011, along with the Notes to the Financial Statements.

*The Annual Financial Statements of Bank Indonesia for 2011 have been given an **Unqualified Opinion** by the BPK. This marks the ninth consecutive year that Bank Indonesia's Financial Statements have received an Unqualified Opinion, an achievement that we can be proud of and which demonstrates Bank Indonesia's commitment to transparency and accountability in the context of implementing good governance. Through the application of good governance, Bank Indonesia will be able to perform its duties more effectively and efficiently, and avoid the misuse of resources. In turn, we expect that this will help increase stakeholder trust in Bank Indonesia so that it will be able to perform its duties in the future even more effectively.*

On this occasion, the Board of Governors of Bank Indonesia would like to express sincere appreciation to

atas saran dan masukannya bagi perbaikan pelaksanaan tugas yang terus menerus di Bank Indonesia. Selanjutnya, terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada para pimpinan Satuan Kerja dan seluruh jajaran Bank Indonesia, yang telah menunjukkan kesungguhan, komitmen, dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas masing-masing serta dalam menindaklanjuti setiap saran dan masukan dari BPK, sehingga Bank Indonesia dapat mempertahankan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Disamping itu, sebagai wujud pelaksanaan pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2011 dipublikasikan pula dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui media massa dan situs resmi Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>).

Akhir kata, semoga laporan keuangan ini dapat menjadi referensi yang dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat.

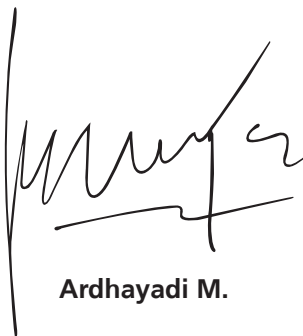
the BPK for their advice and recommendations for the bringing about of continuing improvements at Bank Indonesia. Our sincere gratitude also goes to the heads of all line units and all employees of Bank Indonesia, who have shown consistent commitment and cooperation in performing their duties and implementing the advice and recommendations of the BPK with the result that Bank Indonesia has been able to maintain its Unqualified Opinion.

In addition, in implementation of article 61(4) of Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia, as amended by Act Number 6 of 2009 on the Ratification into Law of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2008 concerning the Second Amendment of Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia, the 2011 Annual Financial Statements have also been published by Bank Indonesia in the media and on the official website of Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>).

In conclusion, we hope that these financial statements will serve as beneficial references and will provide added value to the public.

Jakarta, Mei 2012
Jakarta, May 2012

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA
DEPUTY GOVERNOR OF BANK INDONESIA



Ardhayadi M.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Independent Auditor's Report on the Financial Statements





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
State Audit Board of the Republic of Indonesia

Nomor/Number: 06/01a/LHP/XV/04/2011

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Independent Auditor's Report on the Financial Statements

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Neraca Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010, serta Laporan Surplus (Defisit), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajemen Bank Indonesia. Tanggung jawab BPK RI terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK RI juga telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern Bank Indonesia. Struktur pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah tanggung jawab Manajemen Bank Indonesia. Laporan atas hasil pengujian ini dilaporkan dalam laporan-laporan terpisah dari laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Bank Indonesia.

BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK RI yang memberlakukan Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan BPK RI

Pursuant to Law Number 15 of 2006 on the State Audit Board and Law Number 23 of 1999 on Bank Indonesia, as most recently amended by Law Number 6 of 2008, the BPK RI has audited the Bank Indonesia Balance Sheets per 31 December 2011 and 31 December 2010, and the Statements of Surplus (Deficit), Changes in Equity, and Cash Flows for the years ended on the same dates. These financial statements are the responsibility of the management of Bank Indonesia. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

The BPK RI also performed tests on Bank Indonesia's compliance with the provisions of the laws and regulations in effect, and its internal control regulations. The internal control structures and compliance with the laws and regulations in effect are the responsibility of the management of Bank Indonesia. The findings of these tests are presented separately from the Independent Auditor's Report on the Financial Statements of Bank Indonesia.

We conducted our audits in accordance with the State Financial Audit Standards (SPKN) adopted by the BPK-RI, which incorporate the Professional Public Accounting Standards (SPAP) established by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). The said standards require us to

merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut opini BPK RI, laporan keuangan yang disebutkan di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kebijakan akuntansi khusus atas transaksi yang umumnya dilakukan bank sentral seperti dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir B.

Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern disampaikan dalam Laporan No.10/01b/LHP/XV/05/2012 tanggal 8 Mei 2012 dan No.10/01c/LHP/XV/05/2012 tanggal 8 Mei 2012.

plan and perform our audits to obtain reasonable assurances that the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimations made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. The BPK-RI believes that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements as mentioned above present fairly, in all material respects, the financial position of Bank Indonesia as at 31 December 2011 and 31 December 2010, and the results of its operations, as well as cash flows for the years then ended in conformity with generally accepted accounting principles and specific accounting policies generally adopted by Central Banks, as discussed in Note B to the Financial Statements.

The findings of our test of compliance with the laws and regulations in effect, and Bank Indonesia's internal control regulations, are presented separately in Reports Number 10/01b/LHP/XV/05/2012 and Number 10/01c/LHP/XV/05/2012, both dated 8 May 2012.

Jakarta, 8 Mei 2012
Jakarta, 8 May 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
THE STATE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Penanggung Jawab Pemeriksaan
Charge of Audit:



d

Syafri Adnan Baharuddin, Ak. MBA
Register Negara No.D-4844
State Register NumberD-4844

LAPORAN KEUANGAN
Financial Statements



BANK INDONESIA				
NERACA		BALANCE SHEET		
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 (dalam Jutaan Rupiah)		As at December 31, 2011 and December 31, 2010 (IDR millions)		
AKTIVA	Catatan Notes	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 (Disajikan Kembali) December 31, 2010 (Reclassified)	ASSETS
1. Emas	B.6, C.2	33.510.109	29.759.509	1. Gold
2. Uang Asing	B.4, B.7, C.3	4.010	9.482	2. Foreign Currencies
3. Hak Tarik Khusus	B.4, B.8, C.4	24.445.657	24.398.707	3. Holdings of Special Drawing Rights
4. Giro	B.4, B.9, C.5	22.514.306	11.840.208	4. Demand Deposits
5. Deposito	B.4, B.10, C.6	76.659.783	30.918.204	5. Time Deposits
6. Surat Berharga	B.4, B.11, C.7	843.126.744	766.098.413	6. Marketable Securities
7. Surat Utang Negara Republik Indonesia	B.12, C.8	82.402.779	27.479.241	7. Government Bonds
8. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	B.13, C.9	0	0	8. Securities Purchased Under Resale Agreements
9. Tagihan		258.789.993	264.291.743	9. Claims
9.1 Kepada Pemerintah	B.14, C.1, C.10	247.552.945	251.497.191	9.1 on Government
9.2 Kepada Bank	B.15, C.1, C.11	4.398.970	5.564.489	9.2 on Banks
9.3 Kepada Lainnya	B.16, C.1, C.12	6.838.078	7.230.063	9.3 on Others
10. Penyertaan	B.17, C.13	628.952	582.297	10. Equity Participations
11. Aktiva Lain-Lain	B.18, B.32, B.33 C.1, C.14, C.30	41.022.806	40.284.416	11. Other Assets
12. Penyisihan Aktiva	B.20, C.15	(11.263.320)	(15.649.892)	12. Allowance for Bad Debts
JUMLAH AKTIVA		1.371.841.819	1.180.012.328	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

BANK INDONESIA NERACA BALANCE SHEET Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 As at December 31, 2011 and December 31, 2010 (dalam Jutaan Rupiah) (IDR millions)				
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Catatan Notes	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 (Disajikan Kembali) December 31, 2010 (Reclassified)	LIABILITIES AND EQUITIES
A. KEWAJIBAN				A. LIABILITIES
1. Uang Dalam Peredaran	B.21, C.16	372.982.462	318.585.280	1. Currency in Circulation
2. Giro		343.132.261	258.697.530	2. Demand Deposits
2.1 Pemerintah	B.4, B.22, C.17	90.371.330	90.994.083	2.1 Government
2.2 Bank	B.4, B.22, C.18	251.387.574	166.163.309	2.2 Banks
2.3 Lainnya	B.4, B.22, C.19	1.373.357	1.540.138	2.3 Others
3. Sertifikat Bank Indonesia	B.23, C.20	117.367.163	195.500.837	3. Bank Indonesia Certificates
4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah	B.24, C.21	3.476.000	2.997.000	4. Bank Indonesia Sharia Certificates
5. Penempatan Berjangka	B.25, C.22	152.839.020	171.192.385	5. Term Deposits
6. Penempatan Dana	B.26, C.23	152.474.286	92.038.216	6. Deposit Facilities
7. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	B.27, C.24	17.403.100	9.175.700	7. Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities
8. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	B.28, C.25	68.752.428	7.000.320	8. Securities Sold Under Repurchase Agreements
9. Pinjaman Dari Pemerintah	B.4, B.29, C.26	119.084	140.395	9. Loans from Government
10. Pinjaman Luar Negeri	B.4, B.30, C.27	4.477.603	5.217.852	10. Foreign Borrowings
11. Alokasi Hak Tarik Khusus	B.8, C.1, C.28	27.483.875	27.421.967	11. Allocation of Special Drawing Rights
12. Kewajiban Lain-Lain	B.19, B.32, C.1, C.29, C.30	21.762.262	23.246.045	12. Other Liabilities
JUMLAH KEWAJIBAN		1.282.269.544	1.111.213.527	TOTAL LIABILITIES
B. EKUITAS				B. EQUITY
1. Modal	C.31	16.876.926	7.610.885	1. Capital
2. Cadangan Umum	C.32	41.555.776	62.250.542	2. General Reserves
3. Cadangan Tujuan	C.32	13.906.146	14.370.568	3. Statutory Reserves
4. Keuntungan Atau Kerugian yang Belum Direalisasi	B.31, C.33	42.382.140	5.725.994	4. Unrealized Gains/Losses
5. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan		(25.148.713)	(21.159.188)	5. Current Year Surplus (Deficit)
JUMLAH EKUITAS		89.572.275	68.798.801	TOTAL EQUITY
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.371.841.819	1.180.012.328	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

BANK INDONESIA				
LAPORAN SURPLUS DEFISIT		SURPLUS DEFICIT STATEMENT		
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2010 (Dalam Jutaan Rupiah)		For the period of January 1 to December 31, 2011 and January 1 to December 31, 2010 (IDR millions)		
	Catatan Notes	1 Januari - 31 Desember 2011 January 1 - December 31, 2011	1 Januari - 31 Desember 2010 (Disajikan Kembali) January 1 - December 31, 2010 (Reclassified)	
PENERIMAAN				REVENUES
1. Pengelolaan Moneter		15.999.584	4.544.447	1. Monetary Operations
1.1 Pengelolaan Devisa	C.34	23.421.345	17.969.953	1.1 Foreign Reserves Management
1.2 Pengelolaan SSB Dalam Negeri	C.1, C.35	3.756.152	2.726.377	1.2 Domestic Securities
1.3 Pemberian Kredit dan Pembiayaan	C.36	515.888	283.870	1.3 Credit and Financing
1.4 Selisih Kurs karena Transaksi Valuta Asing	C.37	(11.693.801)	(16.435.753)	1.4 Exchange Differences
2. Pengelolaan Sistem Pembayaran	C.38	223.897	201.130	2. Payment Systems Services
3. Pengawasan Perbankan	C.1, C.39	17.467	28.422	3. Banking Supervision
4. Lainnya	C.1, C.40	1.108.197	1.277.911	4. Others
JUMLAH PENERIMAAN		17.349.145	6.051.910	TOTAL REVENUES
BEBAN				EXPENSES
1. Pengendalian Moneter		30.357.609	24.402.367	1. Monetary Operations
1.1 Operasi Pasar Terbuka	C.41	30.092.015	24.176.801	1.1 Open Market Operations
1.2 Pengelolaan Devisa	C.42	67.827	38.787	1.2 Foreign Reserves Management
1.3 Pinjaman Luar Negeri	C.43	178.422	158.643	1.3 Foreign Borrowing Management
1.4 Lainnya		19.345	28.136	1.4 Others
2. Jasa Giro Pemerintah	C.44	4.666.712	2.434.310	2. Interest Expenses on Government Accounts
3. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran	C.45	2.010.016	2.703.376	3. Payment Systems Operations
3.1 Sistem Pembayaran Tunai		1.987.204	2.692.494	3.1 Currency Circulation
3.2 Sistem Pembayaran Non Tunai		22.812	10.882	3.2 Payment System Sponsoring
4. Pengaturan dan Pengawasan Perbankan	C.46	174.917	149.878	4. Banking Regulations and Supervision
5. Umum dan Lainnya	C.47	5.352.895	4.344.435	5. General and Others
5.1 SDM dan Logistik		4.294.839	4.066.347	5.1 Human Resources and Logistics
5.2 Lainnya		1.058.056	278.088	5.2 Others
JUMLAH BEBAN		42.562.149	34.034.366	TOTAL EXPENSES
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK		(25.213.004)	(27.982.456)	SURPLUS (DEFICIT) BEFORE TAX
PENERIMAAN (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		64.291	6.823.268	INCOME TAX REVENUES (EXPENSES)
SURPLUS (DEFISIT)		(25.148.713)	(21.159.188)	SURPLUS (DEFICIT)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

BANK INDONESIA					
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY		
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 (Dalam Jutaan Rupiah)			For the period of January 1 to December 31, 2011 (IDR Millions)		
	31 Desember 2010 <i>December 31, 2010</i>	Penambahan <i>Addition</i>	Pengurangan <i>Deduction</i>	31 Desember 2011 <i>December 31, 2011</i>	
I. EKUITAS					I. EQUITIES
1. Modal	7.610.885	9.266.041	0	16.876.926	1. <i>Capital</i>
2. Cadangan Umum	62.250.542	464.422	21.159.188	41.555.776	2. <i>General Reserves</i>
3. Cadangan Tujuan	14.370.568	0	464.422	13.906.146	3. <i>Statutory Reserves</i>
4. Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi	5.725.994	36.656.146	0	42.382.140	4. <i>Unrealized Gains/Losses</i>
5. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	(21.159.188)	(25.148.713)	(21.159.188)	(25.148.713)	5. <i>Current Year Surplus (Deficit)</i>
	68.798.801	21.237.896	464.422	89.572.275	
II. KEWAJIBAN MONETER (Catatan C.48)				1.227.288.311	II. MONETARY LIABILITIES (Note C.48)
III. RASIO MODAL SEBELUM DIKURANGI SISA SURPLUS YANG MENJADI BAGIAN PEMERINTAH (Catatan C.48)				2,71%	III. CAPITAL RATIO BEFORE DEDUCTED BY GOVERNMENT'S SHARE OF BI'S SURPLUS (Note C.48)
IV. SISA SURPLUS YANG MENJADI BAGIAN PEMERINTAH				0	IV. TRANSFER OF SURPLUS TO GOVERNMENT
V. RASIO MODAL SETELAH DIKURANGI SISA SURPLUS YANG MENJADI BAGIAN PEMERINTAH				2,71%	V. CAPITAL RATIO AFTER DEDUCTED BY GOVERNMENT'S SHARE OF BI'S SURPLUS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

BANK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2011
(dalam Jutaan Rupiah)

CASH FLOW STATEMENT

For the Period of 1 January to December 31, 2011
(IDR Millions)

1. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		1. CASH FLOWS/CASH EQUIVALENTS FROM OPERATIONS
1.1 Defisit	(25.148.713)	1.1 Deficit
1.2 Kenaikan Emas	(3.750.600)	1.2 Increase in Gold
1.3 Penurunan Uang Asing	5.472	1.3 Decrease in Foreign Currencies
1.4 Kenaikan Hak Tarik Khusus	(46.950)	1.4 Increase in Special Drawing Rights
1.5 Kenaikan Giro	(10.674.098)	1.5 Increase in Demand Deposits
1.6 Kenaikan Deposito	(45.741.579)	1.6 Increase in Time Deposits
1.7 Kenaikan Surat Berharga	(77.028.331)	1.7 Increase in Marketable Securities
1.8 Kenaikan Surat Utang Negara Republik Indonesia	(54.923.538)	1.8 Increase in Government Bonds
1.9 (Kenaikan) Penurunan Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	0	1.9 (Increase) Decrease in Securities Purchased under Resale Agreements
1.10 Penurunan Tagihan	5.501.750	1.10 Decrease in Claims
1.10.1 Penurunan Tagihan kepada Pemerintah	3.944.246	1.10.1 Decrease in Claims on Government
1.10.2 Penurunan Tagihan kepada Bank	1.165.519	1.10.2 Decrease in Claims on Banks
1.10.3 Penurunan Tagihan kepada Lainnya	391.985	1.10.3 Decrease in Claims on Others
1.11 Penurunan Aktiva Lain-Lain	8.547.673	1.11 Decrease in Other Assets
1.12 Penyesuaian-penyesuaian:	(4.855.212)	1.12 Adjustments:
1.12.1 Penyisihan Aktiva	(4.386.572)	1.12.1 Allowance for Bad Debts
1.12.2 Penyusutan Aktiva Tetap	(489.693)	1.12.2 Fixed Asset Depreciation
1.12.3 Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud	21.053	1.12.3 Intangible Asset Amortization
1.12.4 Amortisasi Aktiva Sewa Guna Usaha	0	1.12.4 Capital Lease Amortization
1.13 Kenaikan Uang Dalam Peredaran	54.397.182	1.13 Increase in Currency in Circulation
1.14 Kenaikan Giro	84.434.731	1.14 Increase in Demand Deposits
1.14.1 Penurunan Giro Pemerintah	(622.753)	1.14.1 Decrease in Government Demand Deposits
1.14.2 Kenaikan Giro Bank	85.224.265	1.14.2 Increase in Bank Demand Deposits
1.14.3 Penurunan Giro Lainnya	(166.781)	1.14.3 Decrease in Other Demand Deposits
1.15 Penurunan Sertifikat Bank Indonesia	(78.133.674)	1.15 Decrease in Bank Indonesia Certificates
1.16 Kenaikan Sertifikat Bank Indonesia Syariah	479.000	1.16 Increase in Bank Indonesia Sharia Certificates
1.17 Penurunan Penempatan Berjangka	(18.353.365)	1.17 Decrease in Term Deposits
1.18 Kenaikan Penempatan Dana	60.436.070	1.18 Increase in Deposit Facilities
1.19 Kenaikan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	8.227.400	1.19 Increase in Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities
1.20 Kenaikan Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	61.752.108	1.20 Increase in Securities Sold Under Repurchase Agreements
1.21 Kenaikan Alokasi Hak Tarik Khusus	61.908	1.21 Increase in Allocation of Special Drawing Rights
1.22 Penurunan Kewajiban Lain-Lain	(1.483.783)	1.22 Decrease in Other Liabilities
Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(36.296.549)	Net Cash Flows/Cash Equivalents from Operating Activities

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

BANK INDONESIA		
LAPORAN ARUS KAS	CASH FLOW STATEMENT	
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 (dalam Jutaan Rupiah)	For the Period of 1 January to December 31, 2011 (IDR Millions)	
2. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		2. CASH FLOWS/CASH EQUIVALENTS FROM INVESTING ACTIVITIES
2.1 Kenaikan Penyertaan	(46.655)	2.1 Increase in Equity Participation
2.2 Kenaikan Aktiva Tetap	(8.784.215)	2.2 Increase in Fixed Assets
2.3 (Kenaikan) Penurunan Aktiva Sewa Guna Usaha	0	2.3 (Increase) Decrease in Leasing Assets
2.4 Kenaikan Aktiva Tidak Berwujud	(33.208)	2.4 Increase in Intangible Assets
Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(8.864.078)	Net Cash Flows/Cash Equivalents from Investing Activities
3. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		3. CASH FLOWS/CASH EQUIVALENTS FROM FINANCING ACTIVITIES
3.1 Kenaikan Modal	9.266.041	3.1 Increase in Capital
3.2 Penurunan Pinjaman dari Pemerintah	(21.311)	3.2 Decrease in Loans from Government
3.3 Penurunan Pinjaman Luar Negeri	(740.249)	3.3 Decrease in Foreign Borrowings
3.4 Penurunan Cadangan Umum	(20.694.766)	3.4 Decrease in General Reserves
3.5 Penurunan Cadangan Tujuan	(464.422)	3.5 Decrease in Statutory Reserves
3.6 Kenaikan Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi	36.656.146	3.6 Increase in Unrealized Gains/Losses
3.7 Defisit Tahun Lalu	21.159.188	3.7 Previous Year's Deficit
Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	45.160.627	Net Cash Flows/Cash Equivalents from Financing Activities
4. KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH ARUS KAS/SETARA KAS	0	4. NET INCREASE/DECREASE IN CASH FLOWS/CASH EQUIVALENTS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Notes To Financial Statements



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

A. UMUM**1. Organisasi Bank Indonesia**

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia.

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Sehubungan dengan tugas tersebut, semua kegiatan Bank Indonesia dilakukan tidak atas dasar pertimbangan komersial untuk mencari keuntungan, melainkan lebih diarahkan pada pengendalian nilai Rupiah dan terciptanya stabilitas sistem keuangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur dan seorang Deputi Gubernur Senior, serta sekurang-kurangnya empat orang atau sebanyak-banyaknya tujuh orang Deputi Gubernur. Adapun susunan Dewan Gubernur pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

A. GENERAL**1. Organization of Bank Indonesia**

Bank Indonesia is the Central Bank of the Republic of Indonesia and was established based Republic of Indonesia Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia, as amended by Act Number 6 of 2009 on the Ratification into Law of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2008 concerning the Second Amendment of Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia.

In accordance with Article 7 of Republic of Indonesia, the objective of Bank Indonesia is to achieve and maintain the stability of the Rupiah. To accomplish the objective, Bank Indonesia has the following duties:

- a. To formulate and implement monetary policy;*
- b. To regulate and to safeguard the smooth operation of the payment system; and*
- c. To regulate and to supervise the banking sector.*

In relation to those duties, the activities of Bank Indonesia are not performed on a commercial basis, but are aimed at controlling the Rupiah and maintaining financial system stability.

In performing its duties, Bank Indonesia is led by the Board of Governors, which consists of a Governor, a Senior Deputy Governor and at least 4 (four) and a maximum of 7 (seven) Deputy Governors. The members of the Board of Governors as at December 31, 2011 were as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Gubernur : Darmin Nasution
Deputi Gubernur Senior : -
Deputi Gubernur : Hartadi A. Sarwono
Muliaman D. Hadad
Ardhayadi M.
Budi Mulya
Halim Alamsyah
Ronald Waas

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia, diatur bahwa Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Khusus untuk Deputi Gubernur, berdasarkan Pasal 41 ayat (2) calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.

Sejak 1 September 2010, Bank Indonesia tidak memiliki Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia. DGS sebelumnya dijabat oleh Sdr. Darmin Nasution yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 95/P Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010 telah diberhentikan dengan hormat sebagai DGS dan diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Keputusan Presiden tersebut mulai berlaku sejak saat pengucapan sumpah sebagai Gubernur Bank Indonesia yaitu pada tanggal 1 September 2010.

Selama tahun 2011, terdapat perubahan keanggotaan Dewan Gubernur Bank Indonesia. Perubahan tersebut sehubungan dengan wafatnya Sdr. S. Budi Rochadi pada tanggal 10 Juli 2011. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/P Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011, Sdr. Muliaman D. Hadad diangkat kembali dan Sdr. Ronald Waas diangkat sebagai Anggota Dewan Gubernur terhitung sejak tanggal 29 Desember 2011. Pada tanggal 14 Oktober 2011, Sdr. Budi Mulya mengajukan permohonan non aktif dalam pelaksanaan tugas. Dewan Gubernur Bank Indonesia menyetujui

*Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011*

*Governor : Darmin Nasution
Senior Deputy Governor : -
Deputy Governor : Hartadi A. Sarwono
Muliaman D. Hadad
Ardhayadi M.
Budi Mulya
Halim Alamsyah
Ronald Waas*

Under Article 41 (1) of the Bank Indonesia Act, it is provided that the Governor, Senior Deputy Governor and Deputy Governors be proposed and appointed by the President with the approval of the House of Representatives (DPR). In the particular case of the Deputy Governor, under Article 41(2) a candidate for appointment as Deputy Governor is proposed by the President on the recommendation of the Governor.

Since September 1, 2010, the post of Bank Indonesia Senior Deputy Governor (SDG) has been vacant. It was previously occupied by Mr. Darmin Nasution, who, by virtue of Presidential Decision Number 95/P of 2010, dated August 21, 2010, was honorably discharged from his position as SDG and appointed Bank Indonesia Governor. The said Presidential Decision entered into effect on Mr. Nasution's swearing in as Bank Indonesia Governor on September 1, 2010.

A change occurred in the membership of the Bank Indonesia Board of Governors during 2011 in connection with the death of Mr. S. Budi Rochadi on July 10, 2011. By virtue of Presidential Decision Number 75/P of 2011, dated December 21, 2011, Mr. Muliaman D. Hadad was reappointed to the Board of Governors, and Mr. Ronald Waas appointed to the Board of Governors for the first time, counting from December 29, 2011. On October 14, 2011, Mr. Budi Mulya submitted a request to be made non-active. This request was approved by the Board of Governor by virtue of Resolution Number

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

permohonan tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 13/51/KEP.GBI/INTERN/2011 tanggal 20 Oktober 2011, dengan masa non aktif paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan dimaksud.

13/51/KEP.GBI/INTERN/2011, dated October 20, 2011, with the non-active period being set at a maximum of six months counting from the date of the Decision.

Bank Indonesia berkantor pusat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta, memiliki 41 Kantor Bank Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dan empat Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri dengan jumlah pegawai sebanyak 5.481 pegawai.

Bank Indonesia's headquarters are located at Jl. MH Thamrin Number 2 Jakarta, and it has 41 branches around Indonesia and four overseas representative offices. Bank Indonesia currently employs a total of 5,481 persons.

2. Kebijakan Bank Indonesia yang Berimplikasi Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Tahunan

2. Bank Indonesia Policies with Implications for the Presentation of the Financial Statements

a. Kebijakan Moneter dan Perbankan

a. Monetary and Banking Policy

- 1) Bank Indonesia melakukan langkah-langkah penguatan operasi moneter dalam pengelolaan eksekus likuiditas melalui pendalaman pasar uang domestik, meminimalkan dampak negatif aliran modal asing jangka pendek, serta mengoptimalkan penggunaan instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT) untuk mendukung kebijakan moneter dengan sasaran akhir mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

- 1) *Bank Indonesia adopted a number of measures to strengthen its monetary operations in managing excess liquidity through deepening the domestic money market, minimizing the negative effects of short-term foreign capital flows, and optimizing the use of Open Market Operation instruments (OMO) in supporting monetary policy with the ultimate objective of ensuring and maintaining the stability of the Rupiah.*

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2011 Bank Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia (SE) Nomor 13/13/DPM tanggal 9 Mei 2011 dan SE Nomor 13/20/DPM tanggal 8 Agustus 2011 untuk menyempurnakan SE Nomor 12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka. Penyempurnaan SE tersebut antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

In this respect, during 2011 Bank Indonesia issued Bank Indonesia Circular Number 13/13/DPM, dated May 9, 2011, and Number 13/20/DPM, dated August 8, 2011 so as to amend and improve Circular Number 12/18/DPM, dated July 7, 2010, on Open Market Operations. The amendments in question included the following:

- a) Pembatasan jangka waktu minimal (*minimum holding period*) kepemilikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari semula satu bulan menjadi enam bulan.

- a) *Changing the minimum holding period of Bank Indonesia Certificates from one month previously to six months.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

b) Penyempurnaan ketentuan terkait *early redemption Term Deposit* sebagai berikut:

- (1) Perubahan persyaratan pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) transaksi *Term Deposit* dari yang semula mensyaratkan bahwa *early redemption* hanya dapat dilakukan terhadap *Term Deposit* dengan jangka waktu paling kurang satu bulan pada saat diterbitkan dan hanya dapat dilakukan apabila Peserta OPT yang bersangkutan tidak memiliki Surat Berharga yang tercatat di Rekening Surat Berharga, disempurnakan menjadi hanya dapat dilakukan terhadap *Term Deposit* dengan jangka waktu paling kurang satu bulan pada saat diterbitkan.
- (2) Penyempurnaan rumus biaya *early redemption Term Deposit*.

c) Skema transaksi baru, yaitu Transaksi Penjualan Valas Terhadap Surat Berharga Negara (SBN).

Dalam Operasi Moneter Syariah, pada tahun 2011 Bank Indonesia telah melakukan pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Jangka Pendek di pasar perdana untuk mendukung pencapaian target operasional pengendalian moneter syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga telah menerbitkan SE Nomor 13/27/DPM tanggal 1 Desember 2011 perihal Tata Cara Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga Syariah Negara dengan Bank Indonesia dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut Bank Indonesia dapat membuka *window* transaksi *Reverse Repo* SBSN secara lelang.

Pada tahun 2011 Bank Indonesia melakukan beberapa kali perubahan tingkat *BI rate*. Pada tanggal 4 Februari 2011, tingkat *BI rate* meningkat dari

b) *Changing the rules governing the early redemption of Term Deposits as described below:*

- (1) *Changing the requirements for the early redemption of Term Deposits, which originally stated that early redemption could only be effected in respect of Term Deposits with terms of at least one month at the time of issuance, and provided that the OMO participant in question did not have securities listed in a securities account. Since the issuance of the new policy, early redemption can only be effected in respect of Term Deposits with terms of not later than one month at the time of issuance.*
- (2) *Changes to the Term Deposit early redemption cost formula.*

c) *New transaction scheme, namely, Sale of Foreign Exchange to Government Bonds (SBN).*

In Sharia Money Market Operations in 2011, Bank Indonesia has purchased short-term Sharia Government Bonds (SBSN) on the primary market to support the achievement of sharia monetary control operations. In addition, Bank Indonesia also issue Circular Number 13/27/DPM, dated December 1, 2011, on procedures for reverse repo sharia government bond transactions with Bank Indonesia in the context of sharia open market operations. Based on these new rules, Bank Indonesia can open the window for SBSN reverse repo auctions.

In 2011, Bank Indonesia also changed the BI rate on a number of occasions. On February 4, 2011, the BI rate was increased from 6.50% to 6.75%,

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

6,50% menjadi 6,75%, namun tanggal 11 Oktober 2011 tingkat BI rate diturunkan menjadi 6,50%, dan tanggal 10 November 2011 tingkat BI rate diturunkan kembali menjadi 6,00% yang berlaku sampai dengan akhir tahun 2011.

Dalam rangka mendorong kegiatan di pasar uang antar bank di tengah besarnya eksese likuiditas selama ini, pada tanggal 8 September 2011 Bank Indonesia memperlebar batas bawah koridor suku bunga operasi moneter yang semula 100 bps menjadi 150 bps di bawah BI rate.

- 2) Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing (valas) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI Nomor 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011, bank wajib memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dan GWM dalam valas.

- a) GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi terdiri dari:
- (1) GWM Primer dalam Rupiah sebesar 8% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah.
 - (2) GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam Rupiah.
 - (3) GWM *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dan KPMM Insentif. Kewajiban pemenuhan GWM LDR berlaku sejak tanggal 1 Maret 2011.

but was lowered again on October 11, 2011 to 6.50% and then on November 10, 2011 to 6.00%, which level prevailed until the end of 2011.

For the purpose of encouraging activities on the interbank money market among excess liquidity, on September 8, 2011 Bank Indonesia widened the lower level of the interest rate corridor for money market operations from 100 bps originally to 150 bps lower than the BI rate.

- 2) *Under Bank Indonesia Regulation Number 12/19/PBI/2010, dated October 4, 2010, concerning Bank Minimum Reserve Requirements (Giro Wajib Minimum - GWM) at Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currency, as most recently amended by Bank Indonesia Regulation Number 13/10/PBI/2011, dated February 9, 2011 banks are required to maintain GWM denominated both in Rupiah and in foreign currency.*

- a) *The GWM that must be maintained in Rupiah consists of:*
- (1) Primary GWM in Rupiah of 8% of Rupiah third party funds.*
 - (2) Secondary GWM in Rupiah of 2.5% of Rupiah third party funds*
 - (3) GWM Loan to Deposit Ratio (LDR) is calculated using below or above disincentive parameter of the differences between Bank LDR and Targeted LDR, differences between Capital Adequacy Ratio (CAR) of Bank and CAR of Incentive. LDR GWM obligation has been enforced since March 1, 2011.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

- b) Ketentuan pemenuhan GWM dalam valas diatur sebagai berikut:
- (1) Sejak 4 Oktober 2010 sampai dengan 28 Februari 2011 sebesar 1% dari DPK dalam valas.
 - (2) Sejak 1 Maret 2011 sampai dengan 3 Mei 2011 sebesar 5% dari DPK dalam valas.
 - (3) Sejak 1 Juni 2011 ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valas.

Tata cara pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah diatur di dalam SE Nomor 11/29/DPNP tanggal 16 Oktober 2009 tentang Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dalam Rupiah. Sesuai SE Nomor 11/29/DPNP dimaksud, komponen yang dapat diperhitungkan sebagai cadangan dalam pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah adalah SBI untuk seluruh jangka waktu, Surat Utang Negara (SUN) berupa Obligasi Negara (ON) dan/atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN) untuk seluruh jenis dan jangka waktu (tidak termasuk SUN yang tidak dapat diperdagangkan), SBSN untuk seluruh jenis dan jangka waktu (tidak termasuk SBSN yang tidak dapat diperdagangkan), dan kelebihan saldo rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer dan GWM LDR yang wajib dipelihara di Bank Indonesia (*Excess Reserve*).

Bank Indonesia memberikan jasa giro dengan tingkat bunga sebesar 2,5% per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam Rupiah. Bagian tertentu yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 3% dari DPK dalam Rupiah. Jasa giro diberikan apabila Bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah.

Kewajiban untuk memelihara GWM dalam Rupiah maupun valas dimaksud berlaku pula bagi perbankan syariah, yaitu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan PBI Nomor 6/21/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan

*Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011*

- b) *Rules governing GWM in foreign currencies:*
- (1) *From October 4, 2010 to February 28, 2011: 1% of DPK in foreign currency;*
 - (2) *From March 1, 2011 to May 3, 2011: 5% of DPK in foreign currency;*
 - (3) *From June 1, 2011: 8% of DPK in foreign currency.*

The procedures to conform Secondary GWM in Rupiah are stated in Circular Letter Number 11/29/DPNP dated October 16, 2009 concerning Calculation of Secondary GWM in Rupiah. According to Circular Letter Number 11/29/DPNP, the components that can be calculated as reserves in complying with Secondary GWM in Rupiah is SBI for all time frames, SUN in the form of ON and/or SPN for all types and time frames (not including non-tradable SUN), SBSN of all types and time frames (not including non-tradable SBSN), and Excess Reserves.

Bank Indonesia provides interest for bank demand deposits on working days of 2.5% per annum for particular amount of compulsory Primary GWM in Rupiah. This particular number is determined at 3% from DPK in Rupiah. Interest is given when Bank has satisfied all obligation of GWM in Rupiah.

The obligation to maintain GWM in Rupiah and in foreign currency is also applied to banks that perform their activities based on Sharia Principles, that is Commercial Sharia Banks and Shariah Business Units (Unit Usaha Syariah - UUS). According to Bank Indonesia Regulation

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Valas bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008, GWM dalam Rupiah bagi perbankan syariah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah dan GWM dalam valas sebesar 1% dari DPK dalam valas. Di samping itu, bagi perbankan syariah yang memiliki DPK diatas Rp1 triliun dan memiliki rasio pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah (*financing to deposit ratio*) kurang dari 80%, berlaku pula kewajiban tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 1%, 2% dan 3%, tergantung kepada besarnya DPK bank yang bersangkutan. Jika bank memiliki DPK lebih besar dari Rp1 triliun sampai dengan Rp10 triliun maka Bank wajib memelihara tambahan GWM sebesar 1% dari DPK. Jika bank memiliki DPK lebih besar dari Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun maka bank wajib memelihara tambahan GWM sebesar 2% dari DPK. Jika bank memiliki DPK lebih besar dari Rp50 triliun maka Bank wajib memelihara tambahan GWM sebesar 3% dari DPK. Bank Indonesia tidak memberikan jasa giro atas saldo rekening giro bank syariah.

b. Kondisi Keuangan Bank Indonesia

Sebagai dampak dari kondisi perekonomian global, dalam tahun 2011 Indonesia masih dihadapkan dengan derasnya dana masuk (*capital inflow*) dan eksese likuiditas yang tinggi.

Atas kondisi tersebut Bank Indonesia merespon dengan bauran kebijakan yaitu kebijakan suku bunga, kebijakan nilai tukar, kebijakan makroprudensial dalam rangka pengelolaan *capital flows*, dan kebijakan makroprudensial dalam rangka pengelolaan likuiditas serta koordinasi kebijakan dengan Pemerintah.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia tersebut telah mampu mengendalikan laju inflasi dan

Number 6/21/2004 dated August 3, 2004 concerning Minimum Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currency for commercial banks that perform their activities based on sharia principles, as amended by Bank Indonesia Regulation Number 10/23/PBI/2008 dated October 16, 2008, GWM in Rupiah for Sharia Banks is determined at 5% of Third Party Funds in Rupiah and GWM in foreign currency is determined at 1% of Third Party Funds in foreign currency. Other than that, for Sharia banks with Third Party Funds of more than IDR1 trillion and the ratio of funding in Rupiah to Third Party Funds in Rupiah is less than 80%, additional GWM in Rupiah is applied at 1%, 2%, and 3%, depending on the amount of Third Party Funds of the banks. If a bank has a DPK of between IDR1 trillion and IDR10 trillion, then it is obliged to maintain an additional GWM of 1% of DPK. If the bank has a DPK of between IDR10 trillion and IDR50 trillion, then it is obliged to maintain an additional GWM of 2% of DPK. If the bank has a DPK of more than IDR50 trillion, then it is obliged to maintain an additional GWM of 3% of DPK. Bank Indonesia does not provide yield to the balance of bank demand deposits account of Sharia banks.

b. Bank Indonesia's Financial Condition

As an impact of the global economic conditions, in 2011 Indonesia was still faced with strong capital inflows and a high level of excess liquidity.

In response to these conditions, Bank Indonesia responded with a range of policies consisting of interest rate policy, exchange rate policy, macro prudential policy in the context of managing capital flows, macro prudential policies in the context of managing liquidity, and coordinating policy with the Government.

The policies implemented by Bank Indonesia were able to control the rate of inflation and stabilize the exchange

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

menstabilkan nilai tukar. Inflasi pada tahun 2011 sebesar 3,79% menurun tajam jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2010 sebesar 6,96%. Sedangkan nilai tukar Rupiah selama tahun 2011 secara rata-rata mengalami apresiasi 3,56% dibandingkan rata-rata tahun 2010.

Kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah memerlukan biaya yang menjadi beban Bank Indonesia, dan menyebabkan Bank Indonesia kembali mengalami defisit pada tahun 2011, sebagaimana tahun sebelumnya. Laporan Surplus (Defisit) Bank Indonesia periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 menunjukkan defisit setelah pajak sebesar Rp25.148.713 juta. Defisit tersebut terutama karena beban Operasi Pasar Terbuka (OPT) sebesar Rp30.092.015 juta atau 70,70% dari keseluruhan beban Bank Indonesia tahun 2011.

Beban OPT dengan BI rate selama tahun 2011 berada pada tingkat 6% sampai dengan 6,75% tersebut, meningkat sebesar Rp5.915.214 juta atau 24,47% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp24.176.801 juta.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) disusun berdasarkan Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI). PAKBI disusun dengan mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan *International Accounting Standard* (IAS), Peraturan Intern Bank Indonesia, dan praktik-praktik yang lazim dilakukan oleh bank sentral negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan antara Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia. Agar senantiasa sejalan dengan perkembangan bisnis Bank Indonesia, PAKBI selalu disempurnakan, terakhir dengan SE Nomor 13/47/INTERN tanggal 23 Desember

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

rate. Inflation in 2011 stood at 3.79%, a sharp decrease from 2010, when it was 6.96%. Meanwhile, the average Rupiah exchange rate in 2011 showed an appreciation of 3.56% compared with the average for 2010.

The policies pursued by Bank Indonesia in maintaining the stability of the Rupiah required significant expenditures by Bank Indonesia, which resulted in the Bank once again experiencing a deficit in 2011, as in the previous year. The Bank Indonesia Surplus (Deficit) Statement for the period from January 1, 2011 to December 31, 2011 shows an after-tax deficit of IDR25,148,713 million, which was primarily due to the cost of mounting Open Market Operations, which accounted for IDR30,092,015 million, or 70.70% of Bank Indonesia's overall expenses in 2011.

The cost of Open Market Operations at a BI rate in 2011 of between 6% and 6.75% increased by IDR5,915,214 million, or 24.47%, compared with 2010 when the equivalent figure was IDR24,176,801 million.

B. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The Bank Indonesia Annual Financial Statements (LKTBI) have been prepared based on the Bank Indonesia Financial Accounting Guidelines (PAKBI). PAKBI is in conformity with the generally accepted accounting principles as set out in the Indonesian Financial Accounting Standards (Standar Akuntansi Keuangan - SAK), *International Accounting Standards* (IAS), Bank Indonesia's internal regulations and best practices in other central banks, as well as the agreements between Bank Indonesia, the State Audit Board of the Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan - BPK RI) and the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (Ikatan Akuntan Indonesia - IAI). In order to ensure conformity with the development of Bank

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

2011 tentang Perubahan PAKBI. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam PAKBI, Kebijakan Akuntansi Bank Indonesia mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Indonesia's business, PAKBI is continuously revised, most recently as declared in the Circular Letter Number 13/47/INTERN dated December 23, 2011 concerning the Amendment of the Bank Indonesia Financial Accounting Guidelines. In the case of any matters not provided for in the PAKBI, Bank Indonesia's Accounting Policy adheres to generally accepted accounting principles.

Kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan oleh Bank Indonesia secara konsisten dalam penyusunan LKTBI untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

The significant accounting policies that have been consistently applied by Bank Indonesia in preparing the Financial Statements for the period of January 1, 2011 to December 31, 2011 are as follows:

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan

LKTBI disajikan dalam mata uang pelaporan Rupiah, disusun atas dasar akrual dengan konsep nilai historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan masing-masing akun tersebut.

1. Basis for Preparation of Financial Statements

The financial statements of Bank Indonesia are presented in Rupiah, and prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except for certain accounts that are presented using other measurements as stated in the accounting policy of each account.

2. Taksiran Manajemen

Penyusunan LKTBI sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban, pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan, serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran-taksiran tersebut.

2. Management Estimations

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimations and assumptions that may affect the amount of assets and liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the amount of revenues and expenses reported during the year. The actual results may differ from those estimations.

3. Pengakuan Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga dari penanaman dana Bank Indonesia diakui secara akrual. Akualisasi pendapatan bunga dihentikan dan bunga yang telah diakui sebelumnya namun belum tertagih dibatalkan pada saat penanaman dana yang bersangkutan digolongkan sebagai *non-performing*.

3. Recognition of Interest Income

Interest income from the investment of Bank Indonesia's funds is recognized on an accrual basis. Accrued interest income that was previously recognized is reversed at the time when the placements are classified as nonperforming.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

4. Transaksi dalam Valuta Asing (Valas)

Bank Indonesia membukukan transaksi valas dengan metode pembukuan *multi currency accounting*. Transaksi valas dibukukan dalam *original currency* maupun dalam valuta Rupiah. Transaksi valas dibukukan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada saat transaksi. Guna penyusunan Laporan Keuangan, aktiva dan pasiva dalam valas dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca (kurs tengah valas yang dijadikan referensi) yang berlaku pada tanggal yang bersangkutan. Selisih penjabaran tersebut dicatat dalam rekening Cadangan Selisih Kurs dan disajikan di neraca pada pos Keuntungan atau Kerugian Yang Belum Direalisasi dalam kelompok Ekuitas sampai dengan valas yang bersangkutan berkurang. Bank Indonesia menggunakan metode *Net Currency Position* (NCP) dalam menatausahakan dan mencatat valas. Dalam metode tersebut, hasil revaluasi aktiva dan pasiva valas dihitung dari perkalian antara posisi *netto* valas dengan selisih antara kurs neraca dengan harga pokok rata-rata valas.

Kurs Neraca Bank Indonesia untuk valas utama pada tanggal 31 Desember 2011 adalah Rp9.068,00/USD, Rp11.738,99/EUR, Rp13.969,26/GBP, Rp13.877,67/SDR, dan Rp11.680,32/JPY100.

5. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank Indonesia adalah:

- a. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini direpresentasikan oleh Kementerian Keuangan. Hubungan istimewa dengan Kementerian

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

4. Transactions in Foreign Currencies

Bank Indonesia records transactions in foreign currencies using *multi currency account*. Transactions in foreign currencies are recorded in the *original currency* or in Rupiah. Transactions in foreign currencies are recorded in Rupiah using the exchange rate prevailing at the transaction date. For the financial reporting purposes, assets and liabilities in foreign currencies are translated into Rupiah using exchange rates prevailing at the balance sheet date (median exchange rate used as reference). The differences of amount arising from the periodical translations are recorded at the Exchange Rate Revaluation Reserves account, which is presented on the balance sheet in the Unrealized Gains/Losses in the Equity section, until the foreign exchanges are decreased. Bank Indonesia uses the *Net Currency Position* (NCP) method in administrating and recording foreign currency assets and liabilities. With this method, the result of the revaluation of foreign currency assets and liabilities is calculated from the multiplication of the net position of the foreign currency assets and liabilities with the difference between the balance sheet exchange rate and average cost of the foreign exchange currencies.

The rates of major foreign exchanges as at December 31, 2011 were IDR9,068.00/USD, IDR11,738.99/EUR, IDR13,969.26/GBP, IDR13,877.67/SDR, and IDR11,680.32/JPY100.

5. Transactions with Related Parties

Related parties of Bank Indonesia are as follows:

- a. Government of the Republic of Indonesia, in this case represented by the Ministry of Finance. The special relationship with the Ministry of Finance

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Keuangan diwujudkan antara lain dengan adanya kewajiban pemenuhan modal Bank Indonesia, pemberian jasa giro atas penyimpanan dana di Bank Indonesia serta kesepakatan persyaratan dan *rate* khusus untuk Surat Utang Pemerintah.

- b. Karyawan Bank Indonesia dan Badan/Yayasan/Perusahaan yang mewakili kepentingan karyawan Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI) dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI).
- c. Badan/Lembaga/Yayasan yang didirikan untuk menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan, dan kondisi yang sama dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, diungkapkan dalam Laporan Keuangan.

6. Emas

Emas dinilai secara periodik berdasarkan harga pasar. Selisih antara harga pasar dengan harga perolehan diakui sebagai Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi dan disajikan dalam kelompok Ekuitas.

7. Uang Asing

Uang Asing disajikan di Neraca sebesar nilai nominal.

8. Hak Tarik Khusus

Hak Tarik Khusus atau *Special Drawing Rights* (SDR)

*Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011*

is manifested in, among other things, the obligation to fulfill Bank Indonesia's capital requirements, to provide demand deposit services, and conditional agreements and special rates for Government Bonds.

- b. The employees of Bank Indonesia and entities/foundations/enterprises that represent the interests of the employees of Bank Indonesia. These include among others the Bank Indonesia Pension Fund (Dana Pensiun Bank Indonesia – DAPENBI) and Bank Indonesia Employees Welfare Foundation (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia – YKK-BI).*
- c. Entities/institutions/foundations that are established to support activities of Bank Indonesia. These include, among others, the Indonesian Banking Development Foundation (Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia – YPPI).*

All significant transactions with related parties, whether or not made under similar terms and conditions as those conducted with third parties, are disclosed in the financial statements.

6. Gold

Gold is revalued periodically at fair market values. The differences due to the gold market price changes are recorded in the Equity Account under Unrealized Gains/Losses.

7. Foreign Currencies

Foreign Currencies are presented on the balance sheet at nominal value.

8. Holdings of Special Drawing Rights

Special Drawing Rights (SDRs) Holding represents a

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

merupakan potensi klaim Indonesia sebagai anggota *International Monetary Fund* (IMF) atas *freely usable currencies* (USD, JPY, GBP, dan EUR) milik negara anggota IMF lain sesama partisipan *SDR Department*, apabila negara anggota tersebut setuju untuk dilakukan konversi. Hak Tarik Khusus disajikan di Neraca sebesar nilai nominal ditambah hasil akrualisasi *interest on SDR holdings* dan *remuneration* yang masih harus diterima dan dikurangi dengan hasil akrualisasi *assessment fee* dan *charges*. Alokasi Hak Tarik Khusus merupakan rekening lawan atas klaim di IMF, dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan di Neraca sebagai kewajiban pada pos Alokasi Hak Tarik Khusus.

9. Giro

Giro Bank Indonesia dalam valas pada bank sentral negara lain atau pada bank komersial di luar negeri disajikan di Neraca sebesar nilai nominal.

10. Deposito

Deposito Bank Indonesia dalam valas pada bank di luar negeri disajikan di Neraca sebesar nilai nominal ditambah akrualisasi bunga yang masih harus diterima.

11. Surat Berharga

Surat-Surat Berharga (SSB) dalam Rupiah dan dalam valas yang dimiliki oleh Bank Indonesia dikelompokkan berdasarkan tujuan pemilikan, yaitu Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (*Hold to Maturity*), Diperdagangkan (*Trading*), dan Tersedia untuk Dijual (*Available for Sale*). SSB kelompok Dimiliki Hingga Jatuh Tempo disajikan berdasarkan harga perolehan setelah amortisasi premi/diskonto. SSB kelompok Diperdagangkan disajikan sebesar harga pasar. Selisih antara harga pasar dengan harga perolehan diakui sebagai keuntungan (kerugian) tahun berjalan. SSB kelompok Tersedia untuk Dijual disajikan sebesar harga pasar. Selisih antara harga pasar dengan harga perolehan

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

potential claim to International Monetary Fund (IMF) countries on freely usable currencies (USD, JPY, GBP, EUR) owned by other IMF member as SDR Department member when those countries agree to convert. SDR are presented at their nominal value plus interest accruing on SDR holdings and Remuneration receivable, minus assessment fees and charges. The allocation of special drawing rights takes the form of a counter account to IMF claims, and are recorded based on their nominal value as presented on the Balance Sheet as liabilities in the Special Drawing Right Allocations item.

9. Demand Deposits

Bank Indonesia Demand Deposits in foreign currencies in other central banks or correspondent banks are presented on the balance sheet at nominal value.

10. Time Deposits

Bank Indonesia Time Deposits in foreign currencies in correspondent banks are presented on the balance sheet at nominal value together with the accrued interest.

11. Marketable Securities

Marketable Securities (SSB) in Rupiah and foreign currencies are classified based on the purpose of ownership; i.e. Held to Maturity (HTM), which is presented at cost after premium/discount amortization, and Trading and Available for Sale (AFS), which are presented at fair market value. The differences due to the market price changes of Available for Sale securities are recorded in the Marketable Securities Revaluation Reserves Account, and presented in Unrealized Gains/Losses item, in the Equity section, while the differences due to the market price changes of Trading securities are recorded as gains or losses for the current year.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

diakui sebagai Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi dan disajikan dalam kelompok Ekuitas.

Dalam kelompok SSB dimiliki hingga jatuh tempo terdapat SSB yang ditempatkan kepada agen pemijaman dalam transaksi pemijaman surat berharga (*securities lending*) sebesar nilai tercatat. Atas transaksi pemijaman surat berharga tersebut, Bank Indonesia menerima *collateral* dalam bentuk *cash* dan *non-cash*. Perolehan agunan tunai (*cash collateral*) yang diinvestasikan kembali dicatat sebagai nilai nominal dana yang diinvestasikan, sedangkan agunan non-tunai dari agen pemijaman tidak diakui sebagai aset Bank Indonesia.

12. Surat Utang Negara Republik Indonesia

Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia yang dimiliki Bank Indonesia terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (ON). SPN adalah Surat Utang Negara dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun. Sedangkan ON adalah Surat Utang Negara dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.

Selain SUN, Bank Indonesia juga memiliki Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yaitu SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.

SPN, ON dan SBSN untuk operasi moneter diklasifikasikan sebagai Tersedia untuk Dijual dan disajikan sebesar harga pasar. Selisih antara harga pasar dengan harga perolehan diakui sebagai Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi dan disajikan dalam kelompok Ekuitas. Bunga ON yang masih harus diterima disajikan sebagai bagian dari pos Surat Utang Negara Republik Indonesia.

Accrued interests are presented as a part of the Marketable Securities account.

Within the held-to-maturity group are securities that are placed with agents as part of securities lending transactions. These are recorded at listing value. In respect of such securities lending transactions, Bank Indonesia receives both cash and non-cash collateral. A gain on cash collateral that is reinvested is recorded at the nominal value of the invested funds, while non-cash collateral from agents is not recognized as a Bank Indonesia asset.

12. Government Bonds

Government Bonds consist of Treasury Bills (SPN) and Marketable Treasury Bonds. Treasury Bills are State Debt Securities with up to a one-year tenor, while marketable treasury bonds are State Debt Securities with a tenor of more than one year.

In addition to Government Bonds, Bank Indonesia also holds Sharia Government Bonds (SBSN), that is, Government Bonds issued according to Sharia principles as proof of participation in SBSN assets. These Sharia Bonds may be denominated in Rupiah or foreign currency, in accordance with the relevant legislation.

SPN, ON and SBSN for monetary operations are classified as available-for-Sale and presented at fair market value. The difference due to the market value changes is recorded in the Unrealized Gains or Losses item in the Equity section. The accrued interest on ON is presented in the Government Bonds item.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

13. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Repo) terdiri dari surat berharga milik bank yang dijual secara bersyarat kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali disajikan sebesar harga penjualan oleh bank. Selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian kembali oleh bank diakui sebagai penerimaan bunga.

14. Tagihan kepada Pemerintah

Tagihan kepada Pemerintah terdiri dari Surat Utang Pemerintah, Obligasi Negara, dan Tagihan Lainnya kepada Pemerintah.

- a. Surat Utang Pemerintah
Surat Utang Pemerintah adalah surat pengakuan utang jangka panjang Pemerintah kepada Bank Indonesia, yang tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan kepada pihak lain dan pembayaran pokok beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan. Surat Utang Pemerintah disajikan sebesar nilai surat utang yang belum dilunasi.
- b. Obligasi Negara
ON yang termasuk dalam pos ini adalah Surat Utang Negara dengan jangka waktu lebih dari satu tahun yang tidak dapat diperjualbelikan dan disajikan sebesar nilai nominal yang masih *outstanding*.
- c. Tagihan Lainnya kepada Pemerintah
Tagihan Lainnya kepada Pemerintah, termasuk bunga atas tagihan kepada Pemerintah, disajikan di Neraca sebesar jumlah tagihan yang belum dilunasi oleh Pemerintah.

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

13. Securities Purchased Under Resale Agreements

Securities Purchased under Resale Agreements are securities owned by banks that are sold to Bank Indonesia with an agreement to repurchase under a specific price and terms. These securities are presented at their selling price. The differences between the selling price and the repurchase price are recognized as interest income.

14. Claims on Government

Claims on Government consist of State Debt Securities (Surat Utang Pemerintah – SUP), Government Bonds (Obligasi Negara – ON), and other claims on government.

- a. State Debt Securities
State Debt Securities are long-term bonds issued by the Government to Bank Indonesia which are non-transferable and non-tradable, with regulated payment schedule of outstanding value and interest. State Debt Securities are presented at their outstanding nominal value.
- b. Government Bonds
Government Bonds in this item are long-term bonds issued by the Government to Bank Indonesia which are non-transferable and non-tradable, and presented at their outstanding nominal value.
- c. Other Claims on Government
Other claims on Government, including interest claims, are presented on the balance sheet at the outstanding value of the claims.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

15. Tagihan kepada Bank

Tagihan kepada Bank disajikan di Neraca sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh bank ditambah bunga yang masih harus diterima.

16. Tagihan kepada Lainnya

Tagihan kepada Lainnya antara lain terdiri dari tagihan atas pemberian kredit *channeling*, serta sisa kredit program, yang disajikan di Neraca sebesar jumlah bruto yang belum dilunasi nasabah.

17. Penyertaan

Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Penyertaan dengan kepemilikan saham kurang dari 20% disajikan sebesar harga perolehan (*cost*), sedangkan penyertaan dengan kepemilikan saham sebesar 20% ke atas disajikan sebesar harga perolehan ditambah bagian laba atau rugi dari perusahaan anak setelah penyertaan tersebut dilakukan.

Apabila terdapat penurunan nilai secara permanen, maka nilai tercatat penyertaan harus disesuaikan sebesar nilai penurunan permanen tersebut.

18. Aktiva Tetap/Aktiva Tidak Berwujud

Aktiva Tetap/Aktiva Tidak Berwujud disajikan di Neraca pada pos Aktiva Lain-lain sebesar nilai perolehan Aktiva Tetap/Aktiva Tidak Berwujud dikurangi akumulasi penyusutan/amortisasi, kecuali Aktiva Tetap yang dinilai kembali disajikan sesuai nilai revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

15. Claims on Banks

Claims on Banks are presented on the balance sheet at the outstanding value plus accrued interest.

16. Claims on Others

Claims on Others, which include claims in respect of channeling credits, and remaining program credits, are presented on the balance sheet at their gross outstanding value.

17. Equity Participation

In accordance with the Bank Indonesia Act, Bank Indonesia may conduct equity participation in legal entities or other entities deemed necessary in the implementation of the tasks of Bank Indonesia, with the approval of the Republic of Indonesia House of Representatives (DPR RI).

Equity participation with less than 20 percent ownership is presented at cost; meanwhile equity participation with ownership more than 20 percent is presented at cost price added by profit or loss of the subsidiary company subsequent to the equity participation.

In case of permanent impairment in the value of equity participation, the recorded value of equity participation is adjusted accordingly.

18. Fixed Assets/Intangible Assets

Fixed Assets/Intangible Assets are presented on the balance sheet as part of other assets at cost less accumulated depreciation, save in the case of revalued fixed assets, which are stated at the revalued amount less accumulated depreciation.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Aktiva Tetap/Aktiva Tidak Berwujud disusutkan/diamortisasi berdasarkan taksiran masa manfaat aktiva yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

Fixed assets/intangible assets are depreciated/amortized based on estimated useful life of the asset concerned using the straight-line method.

19. Imbalan Kerja

Bank Indonesia membentuk cadangan atas imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja dari pegawai yang telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Bank Indonesia memiliki program pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh DAPENBI dan Tunjangan Hari Tua berupa Bantuan Pemilikan Rumah (Baperum) serta Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan (BKP) yang dikelola oleh YKKBI.

Jumlah biaya dan kewajiban imbalan kerja berdasarkan perhitungan aktuaris independen, yang dilakukan secara berkala.

Biaya dan kewajiban imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan menggunakan metode penilaian aktuaris *projected unit credit* sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 24 (revisi 2004).

19. Employee Benefits

Bank Indonesia provides an allowance for long-term benefits and post-employment benefits for the employees who have rendered their services and are entitled to accept the future benefits. Bank Indonesia has a defined benefit plan, which is funded through contributions to Bank Indonesia Pension Fund (Dana Pensiun Bank Indonesia), and Housing Loan (Baperum) as well as Pensioner Health Facilities (BKP) which are funded through contributions to YKKBI.

The amount of contribution and benefit liabilities are calculated periodically by an independent actuary.

The costs and liabilities of employee benefits are determined separately for each plan by using the projected unit credit actuary method in accordance with the Statement of Financial Account Standard (PSAK) 24 (revised 2004).

20. Penyisihan Aktiva

Bank Indonesia membentuk penyisihan aktiva secara gabungan atas tagihan, penanaman dana, dan aktiva lainnya baik dalam Rupiah maupun valas, sehingga aktiva tersebut disajikan secara wajar. Penetapan persentase penyisihan aktiva dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang melekat pada masing-masing aktiva tersebut yang tercermin antara lain dari *rating* penanaman dana, kondisi keuangan peminjam, kelancaran pembayaran pada masa lampau, peringkat komposit bank, hubungan dan kesepakatan antara Bank Indonesia dengan peminjam, dan faktor-faktor relevan lainnya.

20. Allowance for Bad Debts

Bank Indonesia provides a combined allowance for bad debts, including allowance for claims, placements, and other assets, in order to present the assets fairly. The allowance percentage is decided by considering the inherent rate of risk in each particular asset, which are reflected by some factors e.g. investment rating, debtors' financial position, performance of prior payment, bank's composite grade, relationship and agreement between Bank Indonesia and debtors, and other relevant factors.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

21. Uang dalam Peredaran

Uang dalam Peredaran disajikan sebagai komponen kewajiban sebesar nilai nominal jumlah uang kertas dan uang logam yang telah dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia.

22. Giro

Giro atau simpanan pihak lain pada Bank Indonesia baik dalam Rupiah maupun dalam valas disajikan sebesar nilai nominal.

23. Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. SBI disajikan di Neraca sebesar nilai nominal dikurangi diskonto.

24. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS disajikan sebesar nilai nominal. Imbalan bonus SBIS dicatat secara *cash basis*.

25. Penempatan Berjangka (*Term Deposit*)

Merupakan penempatan dana Rupiah milik peserta Operasi Moneter secara berjangka (paling singkat satu hari dan paling lama 12 bulan yang dinyatakan dalam hari) di Bank Indonesia. Penempatan Berjangka disajikan sebesar nilai nominal dikurangi diskonto.

21. Currency in Circulation

Currency in circulation is presented as liabilities at total nominal value of bank notes and coins that has been declared as legal tender by Bank Indonesia and is not in the possession of Bank Indonesia.

22. Demand Deposits

Demand deposits of other parties in Bank Indonesia consist of demand deposits in Rupiah and demand deposits in foreign currencies, which are presented at nominal value.

23. Bank Indonesia Certificates

Bank Indonesia Certificates (Sertifikat Bank Indonesia-SBI) are securities in Rupiah that are issued by Bank Indonesia to recognize short-term payables. SBIs are presented on the balance sheet at nominal value deducted by a discount paid in advance.

24. Bank Indonesia Sharia Certificates

Bank Indonesia Sharia Certificates (Sertifikat Bank Indonesia Syariah – SBIS) are short-term certificates issued by Bank Indonesia based on sharia principles in Rupiah. SBISs are presented at nominal value. SBIS bonuses are recorded on a cash basis.

25. Term Deposits

A Term Deposit is one of the Open Market Operation instruments where Monetary Operation participants place their funds in Bank Indonesia for a certain period of time, with the minimum period being one day and the maximum being 12 months. A Term Deposit is presented at nominal value deducted by discount.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

26. Penempatan Dana (*Deposit Facility*)

Merupakan penempatan dana Rupiah milik bank di Bank Indonesia (*Deposit Facility*), berjangka waktu overnight dan disajikan sebesar nilai nominal dikurangi diskonto.

27. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka *standing facility* syariah. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah disajikan sebesar nilai nominal. Imbalan bonus Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dicatat secara *cash basis*.

28. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali adalah surat berharga milik Bank Indonesia yang dibeli secara bersyarat oleh bank, dengan kewajiban penjualan kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali disajikan sebesar nilai nominal dikurangi diskonto yang belum diamortisasi.

29. Pinjaman dari Pemerintah

Pinjaman dari Pemerintah antara lain terdiri dari pinjaman dalam rangka program *Two Step Loan* (TSL) dalam Rupiah dan obligasi Pemerintah dalam valas yang disajikan di Neraca sebesar nilai yang belum ditarik oleh Pemerintah setelah dikurangi diskonto.

30. Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman luar negeri atau fasilitas pinjaman yang diterima Bank Indonesia dari pihak lain di luar negeri dalam valas, disajikan sebesar nilai nominal yang belum dilunasi dengan memperhitungkan bunga yang masih harus dibayar.

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

26. Deposit Facilities

Deposit Facilities are the facilities given to banks to place their funds overnight in Bank Indonesia. Deposit Facilities are presented at nominal value deducted by discount.

27. Bank Indonesia Shariah Deposit Facilities

Bank Indonesia Deposit Facilities (FASBIS) are deposit facilities provided by Bank Indonesia to the Banks for placing funds in Bank Indonesia in the framework of the Sharia standing facilities. FASBIS are presented at nominal value. FASBIS bonuses are recorded on a cash basis.

28. Securities Sold Under Repurchase Agreements

Securities Sold under Repurchase Agreements are Bank Indonesia securities that are purchased by banks with an agreement to resell under an agreed price and terms. These securities are presented at cost, less unamortized discount.

29. Loans from Government

Loans from Government consist of loans as part of the Two Step Loan (TSL) program in Rupiah and Government bonds in foreign currencies, which are presented on the Balance Sheet at the outstanding amount after discount.

30. Foreign Borrowings

Foreign borrowings or loan facilities received by Bank Indonesia from foreign parties in foreign currencies are presented at the outstanding amount after calculation of accrued interest.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

31. Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi

Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi merupakan penyajian atas hasil revaluasi surat berharga, selisih hasil penjabaran aktiva dan pasiva valas ke dalam nilai Rupiah, dan hasil revaluasi aktiva lainnya dan disajikan dalam kelompok Ekuitas.

32. Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Bank Indonesia merupakan subyek pajak. Oleh karena itu, Surplus Bank Indonesia merupakan obyek Pajak Penghasilan (PPH).

Bank Indonesia sejak tahun 2009 telah mengadopsi PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Berdasarkan PSAK 46, entitas menyajikan dampak pajak penghasilan baik kini maupun tanggungan terhadap Surplus (Defisit) tahun berjalan.

Pengaturan pengenaan PPh atas surplus Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan:

- 1) Surplus Bank Indonesia yang merupakan obyek pajak penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*) setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.
- 2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tanggal 11 Juli 2011.

31. Unrealized Gains/Losses

Unrealized Gains/Losses present the recognition of securities revaluation, translation of assets and liabilities in foreign exchange into Rupiah, and other assets revaluation, and is presented in the Equity section.

32. Taxation

In accordance with Republic of Indonesia Act Number 36 of 2008, Bank Indonesia is a Tax Subject. Therefore, Bank Indonesia's surplus (deficit) is an object of Income Tax (Pajak Penghasilan – PPh).

Starting 2009, Bank Indonesia has adopted PSAK Number 46 concerning Accounting of Income Tax. Based on PSAK 46, income tax is calculated based on the accounting surplus (deficit) for the current year.

Bank Indonesia's income tax liability is further regulated by Government Regulation Number 94 of 2010, dated December 30, 2010 concerning the Calculation and Redemption of Income Tax in the Current Year, specifically through article 7:

- 1) *Bank Indonesia's surplus object of income tax is a BI's surplus according to audited financial statements after adjustment or fiscal correction based on the income tax regulations and having regard to BI's characteristics.*
- 2) *Procedures for calculating and paying income tax applied to BI's surplus as stated in paragraph (1) is regulated in Minister of Finance Regulation Number 100/PMK.03/2011, dated July 11, 2011.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Dalam penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam tahun berjalan disebutkan bahwa karakteristik Bank Indonesia terkait Surplus Bank Indonesia antara lain Selisih Kurs, Penyisihan Aktiva, dan penyusutan aktiva tetap.

Pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebesar jumlah pajak terutang, yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan atau banding, pada saat keputusan atas keberatan atau banding tersebut telah ditetapkan.

33. Aktiva Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban untuk pelaporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan Metode Aktiva dan Kewajiban (*Asset and Liability Method*). Metode ini juga mengatur untuk mengakui manfaat pajak tangguhan atas kompensasi rugi fiskal.

Aktiva pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah surplus fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dapat dikompensasi dengan aktiva pajak tangguhan yang diakui tersebut.

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

The Elucidation on Article 7 of Government Regulation Number 94 of 2010, dated December 30, 2010 concerning the Calculation and Redemption of Income Tax in the Current Year, explains that BI's characteristics related to surplus consist of exchange rate differences, allowance for bad debts, and fixed assets depreciation.

Current tax for the operative and previous periods are recognized as the amount of tax payable, calculated using the prevailing tax rate (tax regulation) or that which was substantively applicable on the date of the Balance Sheet.

A correction of tax liabilities is recognized when Tax Imposition Letter is received, or, if Bank Indonesia raises an objection or appeal, at the time a decision is made on the objection or appeal.

33. Deferred Tax Assets

Deferred tax is calculated using the prevailing tax rate at the time when the asset was recovered or the obligation was settled, that is, using the prevailing tax rate (tax regulation) or the tax rate that was substantively applicable on the date of the Balance Sheet.

All temporary differences between the asset and liabilities amounts recorded for the financial statements on the basis of tax liability shall be recognized as deferred taxes using the Asset and Liability Method. This method also provides for the recognition of deferred tax benefits as compensation for fiscal losses.

Deferred tax assets are recognized if there is a significant possibility that a fiscal surplus during the coming period will be sufficient to compensate for the deferred tax assets that have been recognized.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

C. PENJELASAN POS-POS NERACA, LAPORAN SURPLUS (DEFISIT), DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN RASIO MODAL

1. Penyajian Kembali atas Pos-pos dalam Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2010

Pada LKTBI Tahun 2010 dilakukan penyajian kembali berupa reklasifikasi beberapa pos karena adanya penyesuaian format Neraca dan Surplus (Defisit) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia, dan adanya kebutuhan untuk menempatkan kembali beberapa pos pada pos yang seharusnya. Reklasifikasi LKTBI Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

C. NOTES TO THE BALANCE SHEET, SURPLUS DEFICIT STATEMENT AND STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

1. Reclassification of Items in the 2010 Bank Indonesia Financial Statements

The 2010 Financial Statements contain reclassifications of a number of items due to changes in the Balance Sheet and Surplus (Deficit) formats in accordance with the rules prevailing in Bank Indonesia, as well as the need to make changes to a number of items. The said reclassifications are as follows:

31 Desember 2010 December 31, 2010					
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya As previously reported			Reklasifikasi Reclassified		
Pos	Rp juta IDR Millions	Item	Pos	Rp juta IDR Millions	Item
Aktiva:		Assets:	-		
Reinvestasi <i>Cash Collateral</i>	19.683.577	<i>Reinvestment of Cash Collateral</i>	-		-
Tagihan Kepada Pemerintah	251.506.198	<i>Claims on Government</i>	Tagihan Kepada Pemerintah	251.497.191	<i>Claims on Government</i>
Tagihan Kepada Bank	10.886.737	<i>Claims on Banks</i>	Tagihan Kepada Bank	5.564.489	<i>Claims on Banks</i>
Tagihan Kepada Lainnya	7.221.056	<i>Claims on Others</i>	Tagihan Kepada Lainnya	7.230.063	<i>Claims on Others</i>
Aktiva Lain-lain	15.278.591	<i>Other Assets</i>	Aktiva Lain-lain	40.284.416	<i>Other Assets</i>
Jumlah Reklasifikasi Aktiva	304.576.159	Total Reclassified Assets	Jumlah Reklasifikasi Aktiva	304.576.159	Total Reclassified Assets
Kewajiban:		Liabilities:			
-	-	-	Alokasi Hak Tarik Khusus	27.421.967	<i>Special Drawing Right Liabilities</i>
Kewajiban Lain-lain	50.668.012	<i>Other liabilities</i>	Kewajiban Lain-lain	23.246.045	<i>Other Liabilities</i>
Jumlah Reklasifikasi Kewajiban	50.668.012	Total Reclassified Liabilities	Jumlah Reklasifikasi Kewajiban	50.668.012	Total Reclassified Liabilities
Surplus (Defisit):		Surplus (Deficit):			
Penerimaan:		Revenues:			
Pengelolaan Moneter:		<i>Monetary Management:</i>	Pengelolaan Moneter:		<i>Monetary Management :</i>
- Kegiatan Pasar Uang	2.726.592	<i>- Money Market Operations</i>	- Pengelolaan SSB Dalam Negeri	2.726.377	<i>- Management of Marketable Securities</i>
Pengawasan Perbankan	0	<i>Banking Supervision</i>	Pengawasan Perbankan	28.422	<i>Banking Supervision</i>
Penerimaan Lainnya	1.306.118	<i>Other Revenues</i>	Penerimaan Lainnya	1.277.911	<i>Other Revenues</i>
Jumlah Reklasifikasi Penerimaan	4.032.710	Total Reclassified Revenues	Jumlah Reklasifikasi Penerimaan	4.032.710	Total Reclassified Revenues

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

*Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011*

Penjelasan atas reklasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reklasifikasi pos Reinvestasi *Cash Collateral* menjadi bagian dari pos Aktiva Lain-lain.
2. Reklasifikasi pos Tagihan Kepada Pemerintah, pos Tagihan Kepada Bank, dan pos Tagihan Kepada Lainnya karena:
 - a. Reklasifikasi tagihan bunga Fasilitas Saldo Debet (FSD) sebesar Rp5.322.248 juta yang semula dicatat dalam pos Tagihan Kepada Bank menjadi bagian dari pos Aktiva Lain-lain.
 - b. Reklasifikasi tagihan kepada Perum Peruri sebesar Rp9.007 juta yang semula dicatat dalam pos Tagihan Kepada Pemerintah menjadi bagian dari pos Tagihan Kepada Lainnya.
3. Reklasifikasi pos Alokasi Hak Tarik Khusus, yang semula disajikan sebagai bagian dari pos Kewajiban Lain-Lain menjadi pos Alokasi Hak Tarik Khusus.
4. Reklasifikasi pos Kegiatan Pasar Uang, pos Pengelolaan SSB Dalam Negeri, Penerimaan Perbankan dan Penerimaan Lainnya karena:
 - a. Perubahan nama pos Kegiatan Pasar Uang menjadi pos Pengelolaan SSB Dalam Negeri.
 - b. Reklasifikasi penerimaan "Sanksi Pelanggaran GWM" dan "Penerimaan Sanksi Administratif-Perbankan" sebesar Rp28.422 juta yang semula disajikan sebagai bagian dari pos Penerimaan Lainnya menjadi bagian dari pos Penerimaan Pengawasan Perbankan.
 - c. Reklasifikasi penerimaan "Jasa Pemberian Informasi Uang" sebesar Rp215 juta yang semula disajikan sebagai bagian dari pos Pengelolaan SSB Dalam Negeri menjadi bagian dari pos Penerimaan Lainnya.

The above reclassifications are explained as follows:

1. *Reinvestment of Cash Collateral was reclassified to Other Assets.*
2. *Claims to Government, Claims to Banks and Claims to Others were reclassified for the following reasons:*
 - a. *Reclassification of Debit Balance Facility (FSD) interest of IDR5,322,248 million, originally recorded in Claims to Banks, to Other Assets.*
 - b. *Reclassification of claim to Peruri Perum of IDR9.007 million, originally recorded in Claims to Government, to Claims to Others.*
3. *Reclassification of Special Drawing Rights Allocations, originally recorded as part of the Other Liabilities account, to the Special Drawing Rights Allocation account.*
4. *Reclassification of Money Market Operations, originally recorded as Domestic Securities, Banking Revenues and Other Revenues because of the following:*
 - a. *Change in the name of Money Market Activities to Domestic Securities.*
 - b. *Reclassification of "GWM violation sanctions" and "Revenue from Administrative Sanctions-Banking" amounting to IDR28,422 million, originally presented as part of the Other Revenues account, to the Banking Supervision Revenues account.*
 - c. *Reclassification of "Financial Information Services" revenue of IDR215 million, originally classified as part of the Domestic Securities account, to the Other Revenues account.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Total Aktiva, Kewajiban, Ekuitas, Penerimaan, dan Beban serta Defisit per 31 Desember 2010 tidak mengalami perubahan baik sebelum maupun sesudah penyajian kembali, yaitu masing-masing sebesar Rp1.180.012.328 juta, Rp1.111.213.527 juta, Rp68.798.801 juta, Rp6.051.910 juta dan Rp34.034.366 juta, serta Rp21.159.188 juta.

Total assets, liabilities, equities, revenues and costs and the deficit per December 31, 2010 did not experience any change either prior to or after the reclassifications, remaining at IDR1,180,012,328 million, IDR1,111,213,527 million, IDR 68,798,801 million, IDR6,051,910 million and IDR34,034,366 million, and IDR21,159,188 million.

2. Emas

Saldo emas per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing TOZ2,347,046.3100 atau setara dengan Rp33.510.109 juta dan TOZ2,347,046.3100 atau setara dengan Rp29.759.509 juta.

2. Gold

The gold balance as at December 31, 2011 and as at December 31, 2010 was TOZ2,347,046.3100 or the equivalent of IDR33,510,109 million and TOZ2,347,046.3100 or equivalent to IDR29,759,509 million, respectively.

Nilai emas disajikan berdasarkan harga emas terkini yang tersedia di pasar London pada tanggal 31 Desember 2011, yaitu sebesar USD1,574.50/TOZ.

The value of gold was presented based on the current market price for gold available on the London market as per December 31, 2011, which was USD1,574.50/TOZ.

3. Uang Asing

Saldo uang asing per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing setara dengan Rp4.010 juta dan Rp9.482 juta.

3. Foreign Currencies

The balances of foreign currencies as at December 31, 2011, and December 31, 2010, were equal to IDR4,010 million and IDR9,482 million respectively, with the details being as follows:

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011		31 Desember 2010 December 31, 2010		Description
	Valas Currency	Rp juta IDR Millions	Valas Currency	Rp juta IDR Millions	
Uang Asing dalam persediaan:					Foreign currencies in vault:
USD	437,533.00	3.967	1,051,886.23	9.458	USD
JPY	236,128.00	28	136,799.00	15	JPY
GBP	1,074.79	15	635.24	9	GBP
SGD	45.76	0	45.76	0	SGD
		4.010		9.482	

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

4. Hak Tarik Khusus

Hak Tarik Khusus diperhitungkan sebagai cadangan devisa. Saldo Hak Tarik Khusus berasal dari alokasi SDR dan bertambah jika terdapat penambahan alokasi SDR, pembelian SDR, serta penerimaan dalam SDR seperti *interest on SDR holdings, remuneration, dan refund of charges*. Saldo Hak Tarik Khusus berkurang jika terdapat pembayaran dalam SDR seperti *commitment fee, service charges, periodic charges, charges alokasi SDR, dan assessment fee*. Alokasi Hak Tarik Khusus dijelaskan dalam Catatan C.28.

Saldo Hak Tarik Khusus per 31 Desember 2011 sebesar SDR1,761,510,149.00 atau setara dengan Rp24.445.657 juta dan per 31 Desember 2010 sebesar SDR1,762,096,220.00 atau setara dengan Rp24.398.707 juta.

4. Holdings of Special Drawing Rights (SDR)

SDR is part of foreign exchange reserves. The SDR balance is derived from the SDR allocation. Its increase is due to addition of SDR allocation, purchase of SDR and income denominated in SDR, such as *interest on SDR holdings, remuneration and refunds of charges*. The balance decreases due to various payments denominated in SDR such as *commitment fee, service charges, periodic charges, SDR allocation charges and assessment fees*. SDR allocation is explained in Note C.28.

The balance of SDR as at December 31, 2011 was SDR1,761,510,149.00 or the equivalent of IDR24,445,657 million and as at December 31, 2010 was SDR1,762,096,220.00 or the equivalent of IDR24,398,707 million.

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
- Hak Tarik Khusus	24.446.489	24.400.038	- Special Drawing Rights
- Penerimaan YMH Diterima	7.796	15.535	- Accrued Income
- Biaya YMH Dibayar	(8.628)	(16.866)	- Payments Due
Saldo Hak Tarik Khusus	24.445.657	24.398.707	Special Drawing Rights Balance

5. Giro

Jumlah giro valas Bank Indonesia yang disimpan pada bank sentral dan bank komersial di luar negeri per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing setara dengan Rp22.514.306 juta dan Rp11.840.208 juta dengan rincian sebagai berikut:

5. Demand Deposits

Demand deposits in foreign currencies in central banks and overseas correspondent banks as at December 31, 2011 and December 31, 2010 amounted to IDR22,514,306 million and IDR11,840,208 million, respectively, with the details being as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011		Rp juta IDR Millions	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Valas Currency			Rp juta IDR Millions	
	Bank Sentral Central Banks	Bank Komersial Commercial Banks			
USD	1,623,172,031.54	23,789,312.37	14.934.645	7.450.704	USD
JPY	22,246,017,956.00	9,918,556,686.00	3.756.925	2.404.677	JPY
EUR	137,815,718.84	4,442,024.67	1.669.962	534.292	EUR
GBP	18,938,357.68	17,749,951.48	512.509	440.974	GBP
Valas lainnya			1.640.265	1.009.561	Other Currencies
			22.514.306	11.840.208	

Di antara saldo giro pada bank sentral tersebut, terdapat giro yang oleh Federal Reserve Bank of New York, New York, dan Bank of Japan, Tokyo, ditempatkan pada *Repo and Overnight* masing-masing sebesar USD1,618,000,000.00 atau setara dengan Rp14.672.024 juta, dan sebesar JPY22,239,459,084.00 atau setara dengan Rp2.597.640 juta. Pendapatan atas *Repo and Overnight* tersebut diakui pada saat jatuh tempo.

6. Deposito

Saldo deposito dalam valas per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing setara dengan Rp76.659.783 juta dan Rp30.918.204 juta dengan rincian sebagai berikut:

The demand deposits in central banks including placements in Repo and Overnight, among them in the Federal Reserve Bank of New York, New York, and the Bank of Japan, Tokyo, amounting to USD1,618,000,000.00 or the equivalent of IDR14,672,024 million, and JPY22,239,459,084.00 or the equivalent of IDR2,597,640 million. Income from Repo & Overnight was recognized on the due date.

6. Time Deposits

The balances of time deposits in foreign currencies as at December 31, 2011 and December 31, 2010 were IDR76,659,783 million and IDR30,918,204 million respectively, with the details being as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011		31 Desember 2010 December 31, 2010		Description
	Valas Currency	Rp juta IDR Millions	Valas Currency	Rp juta IDR Millions	
USD	4,145,500,000.00	37.591.394	1,922,000,000.00	17.280.702	USD
AUD	2,524,900,000.00	23.235.821	370,000,000.00	3.382.729	AUD
NZD	811,220,000.00	5.683.732	1,411,000,000.00	9.788.770	NZD
EUR	792,500,000.00	9.303.150	0.00	0	EUR
Valas lainnya	25,500,000.00	359.833	0.00	0	Other Currencies
		76.173.930		30.452.201	
Deposito Khusus:					Special Time Deposits:
IMF PRGF (SDR)	25,000,000.00	346.942	25,000,000.00	346.160	IMF PRGF (SDR)
IMF Trust for Special PRGF (SDR)	4,850,030.00	67.307	4,850,030.00	67.156	IMF Trust for Special PRGF (SDR)
		414.249		413.316	
Bunga Deposito yang Masih Harus Diterima		71.604		52.687	Accrued Interest
Total Deposito		76.659.783		30.918.204	Total Time Deposits

Diantara saldo tersebut, terdapat Deposito khusus pada IMF yang terdiri dari:

- a. Deposito khusus pada IMF merupakan *Poverty Reduction and Growth Facility* (PRGF) pada IMF sebesar SDR25,000,000.00 atau setara dengan Rp346.942 juta per tanggal 31 Desember 2011 dan setara dengan Rp346.160 juta pada tanggal 31 Desember 2010.
- b. Deposito khusus lainnya pada IMF merupakan *Trust for Special PRGF Operations for the Heavily Indebted Poor Countries* (HIPC) and *PRGF Subsidy Operations* ("the Trust") sebesar SDR4,850,030.00 atau setara dengan Rp67.307 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dan setara Rp67.156 juta pada tanggal 31 Desember 2010.

Among the said balances were special time deposits with the IMF, which consisted of:

- a. Special time deposits with the IMF in the form of the *Poverty Reduction and Growth Facility* (PRGF) amounting to SDR25,000,000.00 or the equivalent of IDR346,942 million as at December 31, 2011 and the equivalent of IDR346,160 million as at December 31, 2010.
- b. The other special time deposit with the IMF was in the form of the *Trust for Special PRGF Operations for the Heavily Indebted Poor Countries* (HIPC) and *Interim PRGF Subsidy Operations* ("the Trust"), amounting to SDR4,850,030.00, or the equivalent of IDR67,307 million as at December 31, 2011, and the equivalent of IDR67,156 million as at December 31, 2010.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Jangka waktu dan kisaran tingkat suku bunga rata-rata deposito tersebut adalah sebagai berikut:

The tenors and average interest rate range of the time deposits were as follows:

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
a. Deposito pada bank koresponden			a. Time deposits in correspondent banks
- Kurang dari 1 bulan	75.844.629	2.697.300	- Less than 1 month
- 1 - 3 bulan	329.301	15.935.360	- 1 - 3 months
- Lebih dari 3 bulan	0	11.819.541	- More than 3 months
b. Deposito khusus			b. Special Time Deposits
- Kurang dari 1 bulan	0	0	- Less than 1 month
- 1 - 3 bulan	0	0	- 1 - 3 months
- Lebih dari 3 bulan	414.249	413.316	- More than 3 months
	76.588.179	30.865.517	
	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	
	Bunga Setahun Interest p.a	Bunga Setahun Interest p.a	
Kisaran tingkat suku bunga setahun			Interest Rate Range
a. USD			a. USD
- Kurang dari 1 bulan	0,12%	0,24%	- Less than 1 month
- 1 - 3 bulan	-	0,28%	- 1 - 3 months
- Lebih dari 3 bulan	-	0,27%	- More than 3 months
b. AUD			b. AUD
- Kurang dari 1 bulan	4,35%	-	- Less than 1 month
- 1 - 3 bulan	-	4,70%	- 1 - 3 months
- Lebih dari 3 bulan	-	4,53%	- More than 3 months
c. NZD			c. NZD
- Kurang dari 1 bulan	2,63%	-	- Less than 1 month
- 1 - 3 bulan	2,83%	3,05%	- 1 - 3 months
- Lebih dari 3 bulan	-	3,03%	- More than 3 months

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Bunga Setahun Interest p.a	Bunga Setahun Interest p.a	
d. EUR			d. EUR
- Kurang dari 1 bulan	0,30%	-	- Less than 1 month
- 1 - 3 bulan	-	-	- 1 - 3 months
- Lebih dari 3 bulan	-	-	- More than 3 months
e. GBP			e. GBP
- Kurang dari 1 bulan	0,51%	-	- Less than 1 month
- 1 - 3 bulan	-	-	- 1 - 3 month
- Lebih dari 3 bulan	-	-	- More than 3 months
f. CAD			f. CAD
- Kurang dari 1 bulan	0,93%	-	- Less than 1 month
- 1 - 3 bulan	-	-	- 1 - 3 month
- Lebih dari 3 bulan	-	-	- More than 3 months
g. SDR			g. SDR
- Kurang dari 1 bulan	-	-	- Less than 1 month
- 1 - 3 bulan	-	-	- 1 - 3 month
- Lebih dari 3 bulan	0,11%	0,29%	- More than 3 months

7. Surat Berharga

Surat-Surat Berharga (SSB) yang dimiliki oleh Bank Indonesia adalah SSB dalam valas. Saldo SSB per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing setara dengan Rp843.126.744 juta dan Rp766.098.413 juta dengan rincian sebagai berikut:

7. Marketable Securities

The marketable securities held by Bank Indonesia were in foreign currency with a balance at December 31, 2011 and December 31, 2010 of IDR843,126,744 million and IDR766,098,413 million, respectively, with the details being as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011			31 Desember 2010 December 31, 2010			Description
	Harga Perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto)	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima	Harga Perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto)	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima	
	<i>Acquisition cost (after premium/ discount amortization)</i>	<i>Revaluation</i>	<i>Fair value and Accrued Interest</i>	<i>Acquisition cost (after premium/ discount amortization)</i>	<i>Revaluation</i>	<i>Fair value and Accrued Interest</i>	
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	68.161.609	-	68.161.609	72.994.091	-	72.994.091	<i>Held to Maturity</i>
Tersedia Untuk Dijual:							<i>Available for Sale:</i>
• Portofolio BI	721.183.814	16.234.551	737.418.365	665.503.715	4.137.575	669.641.290	• <i>BI Portofolio</i>
• <i>External Portfolio Manager:</i>							• <i>External Portfolio Manager:</i>
- <i>Counterparty</i>	26.835.324	176.702	27.012.026	10.506.591	250.423	10.757.014	- <i>Counterparty</i>
- <i>Asian Bond Fund</i>	1.360.200	744.630	2.104.830	1.348.650	624.959	1.973.609	- <i>Asian Bond Fund</i>
• <i>Automatic Investment</i>	2.092.777	1.360.136	3.452.913	5.847.295	1.311	5.848.606	• <i>Automatic Investment</i>
Bunga Yang Masih Harus Diterima			4.977.001			4.883.803	<i>Accrued Interest</i>
	819.633.724		843.126.744	756.200.342		766.098.413	

SSB ini merupakan penempatan dalam denominasi valas USD, GBP, EUR, AUD, NZD, JPY, MYR, MXN, dan ZAR.

Untuk SSB Dimiliki Hingga Jatuh Tempo per 31 Desember 2011 sebesar Rp68.161.609 juta, terdiri dari: 1) sebesar Rp7.738.765 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun; 2) sebesar Rp54.152.071 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun; dan 3) sebesar Rp6.270.773 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 5-10 tahun. Dalam SSB dimiliki hingga jatuh tempo tersebut termasuk penempatan pada *Third Party Securities*

Marketable securities are placements denominated in foreign currencies, predominantly in USD, GBP, EUR, AUD, NZD, JPY, MYR, MXN and ZAR.

Held-to-Maturity securities outstanding as at December 31, 2011, amounted to IDR68,161,609 million, consisting of: 1) IDR7,738,765 million due within 1 year; 2) IDR54,152,071 million due within 1 to 5 years; and 3) IDR6,270,773 million due within 5 to 10 years. Included in Held-to-Maturity securities was Third Party Securities Lending (TPSL) amounting to IDR30,467,091 million. For the TPSL deals, Bank Indonesia received cash collateral of IDR16,841,761

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Lending (TPSL) sebesar Rp30.467.091 juta. Atas penempatan tersebut, Bank Indonesia menerima *collateral* dalam bentuk *cash* sebesar Rp16.841.761 juta sebagaimana dijelaskan pada Catatan C.14 dan Catatan C.29, serta dalam bentuk SSB (*non cash*) sebesar Rp14.365.573 juta yang ditatausahakan secara *extra comptable*.

TPSL dilakukan dengan cara meminjamkan sementara SSB milik Bank Indonesia kepada peminjam (*borrower*) melalui lembaga perantara (*securities lending agent*). TPSL dimaksudkan untuk memperluas pemanfaatan peluang pasar dalam rangka optimalisasi pengelolaan cadangan devisa. Atas transaksi TPSL, Bank Indonesia menerima jaminan (*collateral*) dalam bentuk *cash collateral* dan *non cash collateral*.

Cash collateral yang diterima melalui *securities lending agent* direinvestasikan, sehingga Bank Indonesia memperoleh tambahan pendapatan. Untuk transaksi TPSL tersebut, Bank Indonesia mendapatkan penjaminan ganda (*double indemnification*) dari *securities lending agent* baik dari sisi peminjaman SSB (*lending side*) maupun dari sisi reinvestasi. Dalam hal ini, apabila *borrower* mengalami *default*, maka kerugian akan ditanggung oleh *securities lending agent*.

Untuk SSB Tersedia untuk Dijual kategori Portofolio Bank Indonesia dan *Automatic Investment*, per 31 Desember 2011 sebesar Rp740.871.278 juta, terdiri dari: 1) sebesar Rp209.596.545 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun; 2) sebesar Rp363.285.817 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun; dan 3) sebesar Rp167.988.916 juta akan jatuh tempo dalam periode 5-10 tahun.

million as explained in Notes C.14 and C.29, while non cash securities collateral amounted to IDR14,365,573 million, which was administered on an extra comptable basis.

TPSL deals were carried by lending on a temporary basis securities held by Bank Indonesia to borrowers through securities lending agents. These deals were conducted so as to expand market opportunities in the context of optimizing the management of foreign exchange reserves. In respect of TPSL transactions, Bank Indonesia received collateral either in cash or non cash forms.

The cash collateral received through securities lending agents was reinvested so that Bank Indonesia obtained additional revenues. In respect of such TPSL transactions, Bank Indonesia received a double indemnification from securities lending agents on both the lend side and the reinvestment side. In this respect, should a borrower default, then the resulting loss would be borne by the securities lending agent.

Among the Available for Sale securities categorized in the BI Portfolio and Automatic Investments, as at December 31, 2011, these amounted to IDR740,871,278 million, consisting of: 1) IDR209,596,545 million due within less than 1 year; 2) IDR363,285,817 million due within 1 to 5 years; and 3) IDR167,988,916 million due within 5 to 10 years.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

8. Surat Utang Negara Republik Indonesia

Bank Indonesia memiliki Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia yang terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (ON). Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN dan SBSN dapat diperjualbelikan dan dikelompokkan sebagai SSB Tersedia untuk Dijual.

Saldo SUN dan SBSN per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing adalah sebesar Rp82.402.779 juta dan Rp27.479.241 juta dengan rincian sebagai berikut:

8. Government Bonds

Bank Indonesia holds Government of Indonesia securities (SUN) consisting of Treasury Notes (SPN) and Bonds (ON). In addition, Bank Indonesia also holds Government Sharia Securities (SBSN). SUN and SBSN are capable of being traded and are classified as Marketable Securities.

The balances of for SUN and SBSN as at December 31, 2011, and December 31, 2010, were IDR82,402,779 million and IDR27,479,241 million, respectively, with the details being as follows:

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011			31 Desember 2010 December 31, 2010			Description
	Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga yang Masih Harus Diterima	Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga yang Masih Harus Diterima	
	Acquisition cost	Revaluation	Fair value and Accrued Interest	Acquisition cost	Revaluation	Fair value and Accrued Interest	
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
a. Surat Utang Negara:							a. Government Securities:
1) Obligasi Negara							1) Government Bonds
- Tersedia untuk dijual	69.712.469	8.693.178	78.405.647	18.370.561	2.514.529	20.885.090	- Available for sale
- Bunga yang Masih Harus Diterima	0	0	1.995.874	0	0	696.320	- Accrued Interest
	69.712.469	8.693.178	80.401.521	18.370.561	2.514.529	21.581.410	
1) Surat Perbendaharaan Negara							2) Treasury Bills
- Tersedia untuk dijual	1.710.923	30.271	1.741.194	5.662.653	235.178	5.897.831	- Available for Sale
- Bunga yang Masih Harus Diterima	0	0	0	0	0	0	- Accrued Interest
	1.710.923	30.271	1.741.194	5.662.653	235.178	5.897.831	

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011			31 Desember 2010 December 31, 2010			Description
	Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima	Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima	
	Acquisition cost	Revaluation	Fair value and Accrued Interest	Acquisition cost	Revaluation	Fair value and Accrued Interest	
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
b. Surat Berharga Syariah Negara							b. Government Sharia Securities
Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS)							Sharia Treasury Bills (SPNS)
- Tersedia untuk dijual	256.483	3.581	260.064	-	-	-	- Available for Sale
- Bunga yang Masih Harus Diterima	0	0	0	-	-	-	- Accrued Interest
	256.483	3.581	260.064	-	-	-	
	71.679.875		82.402.779	24.033.214		27.479.241	

SUN dan SBSN diperoleh Bank Indonesia dalam rangka building stock, untuk digunakan sebagai instrumen moneter yang akan menggantikan SBI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SUN jenis ON diperoleh melalui pembelian di pasar sekunder sejak bulan April 2005, SUN jenis SPN diperoleh Bank Indonesia di pasar perdana sejak bulan Mei 2008, dan SBSN jangka pendek atau SPNS diperoleh di pasar perdana sejak bulan Agustus 2011.

SUN Tersedia untuk Dijual jenis SPN sebesar Rp1.741.194 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun. Surat berharga jenis ON sebesar Rp78.405.647 juta terdiri dari: (1) sebesar Rp819.075 juta akan jatuh tempo dalam periode

SUN and SBSN were acquired by Bank Indonesia for the purpose of building stock, which was intended to replace Bank Indonesia Certificates (SBI) as monetary instruments as required by the State Treasury Act (Number 1 of 2004). ON were acquired on the secondary market starting from April 2005, whereas SPN were acquired by Bank Indonesia through the primary market starting from May 2008, and short-term SBSN and SPNS on the primary market since August 2011.

SPN classified as Available for Sale amounted to IDR1,741,194 million due in less than one year. ON amounted to IDR78,405,647 million, consisting of: 1) IDR819,075 million due within less than one year; 2) IDR8,067,199 million due within 1 to 5 years; 3)

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

kurang dari satu tahun; (2) sebesar Rp8.067.199 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun; (3) sebesar Rp7.380.644 juta akan jatuh tempo dalam periode 5-10 tahun; dan (4) sebesar Rp62.138.729 juta akan jatuh tempo di atas 10 tahun. Sedangkan SBSN jangka pendek atau SPNS per 31 Desember 2011 sebesar Rp260.064 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun.

IDR7,380,644 million due within 5 to 10 years; and 4) IDR62,138,729 million due over 10 years. Meanwhile, short-term SBSN or SPNS per December 31, 2011 stood at IDR260,064 million, due within one year.

9. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Saldo Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Repo) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar nihil.

9. Securities Purchased under Resale Agreements

The balance for Securities Purchased under Resale Agreements as of December 31, 2011, and December 31, 2010, was zero.

10. Tagihan kepada Pemerintah

Tagihan kepada Pemerintah pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp247.552.945 juta dan Rp251.497.191 juta, terdiri dari:

10. Claims on Government

Claims on Government as at December 31, 2011, and December 31, 2010, amounted to IDR247,552,945 million and IDR251,497,191 million respectively, with the details being as follows:

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
- Surat Utang Pemerintah	117.938.490	121.734.229	- Government Bonds
- Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003	126.697.948	126.697.948	- Treasury Bonds (ON) SRBI-01/MK/2003
- Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya	2.916.507	3.065.014	- Other Claims on Government in Rupiah
	247.552.945	251.497.191	

a. Surat Utang Pemerintah (SUP)

Nilai SUP per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

a. Government Bonds (SUP)

The values of SUP as at December 31, 2011, and December 31, 2010, were as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
Nilai nominal:			Nominal value:
- SUP Nomor: SU-002/MK/1998	18.781.776	19.420.583	- SUP Number : SU-002/MK/1998
- SUP Nomor: SU-004/MK/1999	50.701.147	52.315.360	- SUP Number : SU-004/MK/1999
- SUP Nomor: SU-007/MK/2006	48.455.567	49.998.286	- SUP Number : SU-007/MK/2006
	117.938.490	121.734.229	

1) SUP Nomor SU-002/MK/1998 (SU-002)

SU-002 diterbitkan tanggal 23 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia (PT BEI).

Nilai nominal SU-002 adalah sebesar Rp20.000.000 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan addendum kelima SU-002 yang mengubah suku bunga dari 1% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran SU-002 dengan total sebesar Rp1.218.224 juta sejak 1 April 2010 s.d. 1 Oktober 2011, sehingga baki debit SU-002 pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp18.781.776 juta.

1) SUP Number SU-002/MK/1998 (SU-002)

SU-002 was issued on October 23, 1998 based on Presidential Decree Number 55 of 1998 concerning Domestic Loans in the form of Debt Securities in conjunction with Government Regulation Number 60 of 1998 concerning Addition of The Republic of Indonesia's Equity Participation in PT Bank Ekspor Impor Indonesia (PT. BEI).

The nominal value of SU-002 was IDR20,000,000 million, non-transferable and non-tradable.

Based on Act Number 41 of 2008 dated November 10, 2008 concerning the Government Income and Expenditure Budget for the year 2009, the Minister of Finance issued the fifth addendum to SU-002, which amends the interest rate from 1% to 0.1% per annum and has been effective since January 1, 2009.

The Government has paid the installments of SU-002 with a total amount of IDR1,218,224 million for the period of April 1, 2010, to October 1, 2011, so that the outstanding balance of SU-002 as at December 31, 2011, was IDR18,781,776 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

2) SUP Nomor SU-004/MK/1999 (SU-004)

SU-004 diterbitkan tanggal 28 Mei 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Persetujuan Bersama Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 6 Februari 1999.

Nilai nominal SU-004 adalah sebesar Rp53.779.500 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan addendum kelima SU-004 yang mengubah suku bunga dari 3% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran SU-004 dengan total sebesar Rp3.078.353 juta sejak 1 Juni 2010 s.d. 1 Desember 2011, sehingga baki debit SU-004 pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp50.701.147 juta.

3) SUP Nomor SU-007/MK/2006 (SU-007)

SU-007 diterbitkan tanggal 24 November 2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999 tanggal 18 April 2006. Nilai nominal SU-007 adalah sebesar Rp54.862.150 juta dan tidak dapat diperdagangkan.

SU-007 diterbitkan untuk mendudukkan tunggakan bunga dan hasil indeksasi SU-002 dan SU-004 sampai

2) SUP Number SU-004/MK/1999 (SU-004)

SU-004 was issued on May 28, 1999 based on Presidential Decree Number 55 of 1998 concerning Domestic Loans in the Form of Debt Securities in conjunction with the Agreement between the Government and Bank Indonesia dated February 6, 1999.

The nominal value of SU-004 was IDR53,779,500 million, non-transferable and non-tradable.

Based on Act Number 41 of 2008, dated November 10, 2008, concerning the Government Income and Expenditure Budget for the year 2009, the Minister of Finance issued the fifth addendum to SU-004 which amends the interest rate from 3% to 0.1% per annum and has been effective since January 1, 2009.

The Government has paid the installments on SU-004 in the total amount of IDR3,078,353 million for the period of June 1, 2010, to December 1, 2011, so that the outstanding balance of SU-004 as at December 31, 2011 was IDR50,701,147 million.

3) SUP Number SU-007/MK/2006 (SU-007)

SU-007 was issued on November 24, 2006, based on Act of the Republic of Indonesia Number 24 of 2002 concerning Government Bonds and the Agreement between the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia concerning the Restructuring of Government Bonds Number SU-002/MK/1998 and Number SU-004/MK/1999 dated April 18, 2006. The nominal value of SU-007 is IDR54,862,150 million and it is non-tradable.

SU-007 was issued to substitute interest and indexation arrears on SU-002 and SU-004

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

dengan tanggal 31 Desember 2005 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tunggalan bunga SU-002 sebesar Rp4.637.583 juta.
- b) Tunggalan bunga SU-004 sebesar Rp12.291.887 juta.
- c) Hasil indeksasi SU-002 sebesar Rp11.231.072 juta.
- d) Hasil indeksasi SU-004 sebesar Rp26.701.608 juta.

Adapun persyaratan Surat Utang ini adalah sebagai berikut:

- a) SU-007 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2025.
- b) Bunga SU-007 sebesar 0,1% per tahun yang dihitung dari sisa pokok dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap enam bulan sekali, yaitu pada tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 Februari 2006 dan tanggal 1 Agustus 2006.
- c) Pokok SU-007 diangsur sebanyak 38 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Februari 2007 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 Agustus dan 1 Februari setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Agustus 2025. Pembayaran angsuran pokok dilakukan secara tunai atau dibayar dengan Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan.

Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran SU-007 dengan total sebesar Rp6.406.583 juta sejak 1 Februari 2007 s.d. 1 Agustus 2011, sehingga baki debit SU-007 pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp48.455.567 juta.

until December 31, 2005, with the details being follows:

- a) SU-002 interest arrears amounting to IDR4,637,583 million.
- b) SU-004 interest arrears amounting to IDR12,291,887 million.
- c) SU-002 indexation arrears amounting to IDR11,231,072 million.
- d) SU-004 indexation arrears amounting to IDR26,701,608 million.

The terms and conditions of SU-007 are as follows:

- a) SU-007 became effective on January 1, 2006, and falls due on August 1, 2025.
- b) The SU-007 interest rate is 0.1% per annum calculated based on the remaining principal balances, and paid in cash by the Government to Bank Indonesia semi-annually on February 1 and August 1. The first interest payment was settled on December 1, 2006, to pay for interest due on February 1, 2006 and August 1, 2006.
- c) Principal repayment is divided into 38 installments. The first installment was due on February 1, 2007, the next installments will be due on August 1 and February 1 of each year until the final installment is due on August 1, 2025. Principal repayment may be settled in form of cash or marketable treasury bonds.

The Government has paid installments on SU-007 amounting to a total of IDR6,406,583 million for the period from February 1, 2007 to August 1, 2011, so that the outstanding balance on SU-007 as at December 31, 2011 was IDR48,455,567 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

**b. Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003
(SRBI-01)**

SRBI-01 diterbitkan sebagai pengganti SUP Nomor SU-001/MK/1998 dan Nomor SU-003/MK/1999 dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003. Nilai nominal SRBI-01 adalah sebesar Rp144.536.094 juta.

Adapun persyaratan SRBI-01 adalah sebagai berikut:

- 1) SRBI-01 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2003, tanpa indeksasi, berjangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang.
- 2) SRBI-01 dikenakan bunga tahunan sebesar 0,1% dari sisa pokok, yang dibayar oleh Pemerintah setiap enam bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus.
- 3) Pelunasan pokok SRBI-01 bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia di atas 10%. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3%, maka Pemerintah membayar *charge* kepada Bank Indonesia sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut. Dalam hal SRBI-01 telah dilunasi dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah sebelum jangka waktu 30 tahun, maka SRBI-01 tersebut dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran SRBI-01 dengan total sebesar Rp17.838.146 juta, sehingga baki debet pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp126.697.948 juta.

**b. Treasury Bond (ON) Number SRBI-01/MK/2003
(SRBI-01)**

SRBI-01 was issued as the substitute for SUP Number SU-001/MK/1998 and SU-003/MK/1999 in relation to the implementation of the Agreement between the Government and Bank Indonesia concerning the Settlement of Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) and the Financial Relationship between the Government and Bank Indonesia dated August 1, 2003. The nominal value of ON SRBI-01 is IDR144,536,094 million.

The terms and conditions of ON SRBI-01 are as follows:

- 1) SRBI-01 became effective on August 1, 2003, without indexation, has a 30-year maturity period and is extendable.
- 2) Interest on SRBI-01 is 0.1% per annum calculated based on the remaining principal balance, which will be paid by the Government semi-annually in February and August.
- 3) SRBI-01 redemption is funded from the surplus of Bank Indonesia which is accruing to the Government and shall be performed in the event that the capital to monetary liabilities ratio of Bank Indonesia has exceeded 10%. If the capital to monetary liabilities ratio is less than 3%, the Government is obliged to pay a charge in order to maintain the ratio at the 3% level. If the redemption of the SRBI-01 is accomplished before 30 years from the surplus of Bank Indonesia that is accruing to the Government, then SRBI-01 will be declared settled and will be no longer effective.

The Government has paid installments on SRBI-01 amounting to IDR17,838,146 million, so that the outstanding balance per December 31, 2011, stood at IDR126,697,948 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Pada tanggal 21 November 2011, Komisi XI DPR RI menyetujui perubahan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian BLBI serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003 selanjutnya disebut Surat Keputusan Bersama (SKB) Tahun 2003 yang memuat:

- 1) Menghapus ketentuan mengenai *charge* yang menetapkan bahwa dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3%, maka Pemerintah membayar *charge* kepada Bank Indonesia sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut, dan ketentuan lain dalam SKB Tahun 2003 yang terkait dengan pengenaan *charge* dimaksud.
- 2) Menambah ketentuan mengenai prosedur penambahan modal Bank Indonesia, dalam hal modal Bank Indonesia kurang dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah).
- 3) Merestrukturisasi Obligasi Negara Nomor Seri SRBI-01/MK/2003 dari semula pembayaran sekaligus (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo tahun 2003 dengan *system self-liquidating*, menjadi pembayaran dengan metode cicilan (*amortized*) sampai dengan jatuh tempo tahun 2043.

Revisi SKB Tahun 2003 tersebut merupakan bagian dari pembahasan *asset-liability management* antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, termasuk rencana restrukturisasi SU-002, SU-004, dan SU-007 menjadi Surat Utang yang dapat diperdagangkan.

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

On November 21, 2011, the DPR's Commission XI approved a changed in the Joint Agreement between the Government and Bank Indonesia on the resolution of BLBI and the Financial Relationship between the Government and Bank Indonesia dated August 1, 2003 (subsequently referred to as the Joint Agreement of 2003) so as to:

- 1) abolish the provision for the payment of a charge should the ratio of Bank Indonesia's capital to monetary obligations be less than 3%, in which case the Government was required to pay a charge in order to maintain the ratio at the 3% level, as well as other provisions in the Joint Agreement of 2003 concerning the said charge.
- 2) add a provision on the procedures for increasing Bank Indonesia's capital should it be less than IDR2,000,000,000,000.00 (two trillion Rupiah).
- 3) restructure Treasury Bond Series Number SRBI-01/MK/2003 from the original bullet payment upon maturity in 2003 to a self-liquidating system so that amortized payments would continue to be made until maturity in 2043.

The above amendments to the Joint Agreement of 2003 were part of the discussions on *asset-liability management* between the Ministry of Finance and Bank Indonesia, including the planned restructuring of SU-002, SU-004, and SU-007 into marketable securities.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

**c. Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah
Lainnya**

c. Other Claims on Government in Rupiah

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
1) Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Internasional	2.826.956	2.826.956	1) Claims due to Government membership Of international institutions
2) Tagihan bunga kepada Pemerintah	89.360	237.867	2) Claims due to loan interest
3) Tagihan lainnya dalam Rupiah	191	191	3) Other claims in Rupiah
Jumlah	2.916.507	3.065.014	Total

Kecuali Tagihan Bunga kepada Pemerintah, Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Bank Indonesia. Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya terdiri dari:

- a) Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Internasional sebesar Rp2.826.956 juta, terdiri dari tagihan kepada Pemerintah karena keanggotaan pada IMF sebesar Rp2.764.861 juta, keanggotaan pada *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) sebesar Rp57.434 juta dan keanggotaan lainnya sebesar Rp4.661 juta. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan telah mencatat Dana Talangan tersebut sebagai kewajiban/pasiva dalam pos "Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya". Pemerintah dan Bank Indonesia saat ini sedang melakukan pembahasan penyelesaian dana talangan tersebut.
- b) Tagihan bunga kepada Pemerintah per 31 Desember 2011 sebesar Rp89.360 juta terdiri dari:

Other than claims due to loan interest, other claims on Government in Rupiah were claims effective before the enactment of the Bank Indonesia Act, with the details being as follows:

- a) *Claims due to Government membership in International Institutions amounted to IDR2,826,956 million, consisting of IMF membership fee of IDR2,764,861 million, membership in the IBRD amounting to IDR57,434 million and other memberships amounted to IDR4,661 million. In the Central Government's Financial Statements for 2010, the Government, through the Ministry of Finance, recognized these claims as liabilities under "Other Domestic Long Term Liabilities". Resolution of the claims is being discussed between Bank Indonesia and the Government.*
- b) *Claims due to loan interest per December 31, 2011 amounted to IDR89,360 million, consisting of:*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements As at December 31, 2011

- Tagihan bunga SU-002, SU-004, dan SU-007 sebesar Rp29.403 juta.
- Tagihan bunga SRBI-01 sebesar Rp52.676 juta.
- Tagihan dalam rangka Subsidi Bunga Kredit Program sebesar Rp7.281 juta.

- Interest claims on SU-002, SU-004, and SU-007 amounting to IDR29,403 million.
- Interest claims on SRBI-01 amounting to IDR52,676 million.
- Claims arising from loan subsidy program of IDR7,281 million.

11. Tagihan kepada Bank

Saldo Tagihan Kepada Bank per tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp4.398.970 juta dan Rp5.564.489 juta dengan rincian sebagai berikut:

11. Claims on Banks

Claims on banks in Rupiah as at December 31, 2011, and December 31, 2010, amounted to IDR4,398,970 million and IDR5,564,489 million respectively, with the details being as follows:

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
- Pinjaman Subordinasi (SOL)	2.927.101	3.697.856	- Subordinated loans (SOL)
- Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) <i>executing</i>	1.365.149	1.849.076	- Executing Bank Indonesia Liquidity Credit (KLBI)
- Pinjaman Dua Tahap (TSL)	10.142	11.269	- Two Step Loans (TSL)
- Tagihan Bunga SOL, KLBI, dan TSL	96.578	6.288	- Interest claims on SOL, KLBI, and TSL
	4.398.970	5.564.489	

Tagihan kepada Bank berupa *Subordinated Loan* (SOL), KLBI dan TSL diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. KLBI adalah Kredit atau pembiayaan kepada bank yang sumber dananya berasal dari Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah. TSL adalah pinjaman luar negeri yang diterima oleh pemerintah yang diteruskan kepada bank pelaksana atau proyek melalui Bank Indonesia. Pinjaman Subordinasi (SOL) merupakan kredit yang diberikan kepada bank dalam rangka penyehatan

Claims on banks in the form of SOL, KLBI and TSL were extended based on Act Number 13 of 1968 on the Central Bank. KLBI is credit or financing provided to banks from Bank Indonesia's own funds to support the implementation of government programs. TSL are foreign loans received by the government which are on lend to implementing or project banks through Bank Indonesia. Subordinated loans, subsequently referred to as SOL, as credits to are provided to banks in the context of bank recovery efforts. Since the enactment of Act Number 23 of

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

bank. Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak diperbolehkan memberikan kredit berupa SOL, KLBI dan TSL. Saat ini Bank Indonesia masih mengelola SOL, KLBI dan TSL tersebut sampai dengan jatuh tempo.

1999 on Bank Indonesia, Bank Indonesia has been prohibited from providing SOL, KLBI and TSL credits. However, the bank is currently managing existing SOL, KLBI and TSL until their maturities.

12. Tagihan kepada Lainnya

Tagihan kepada Lainnya dalam Rupiah per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp6.838.078 juta dan Rp7.230.063 juta, terdiri dari:

12. Claims on Others

Claims on others in Rupiah as at December 31, 2011 and December 31, 2010, were IDR 6,838,078 million and IDR 7,230,063 million respectively, with the details being as follows:

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
- Tagihan pada BUMN yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pengalihan sisa kredit program	420.990	999.552	- Claims on appointed State-Owned Enterprises due to credit program hand-over
- Tagihan karena pemberian kredit <i>channeling</i>	5.842.935	5.851.580	- Claims on channeling loans
- Tagihan Lainnya	574.153	378.931	- Other claims
	6.838.078	7.230.063	

Tagihan pada BUMN yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pengalihan sisa kredit program adalah tagihan atas KLBI yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, yang selanjutnya sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tagihan tersebut dialihkan pengelolaannya kepada PT Permodalan Nasional Madani sebagai BUMN Koordinator.

Claims on appointed state owned enterprises due to credit program handover consisted of claims in respect of KLBI that had been extended based on Act Number 13 of 1968 on the Central Bank. Since the enactment of Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia, these claims have been transferred to PT Permodalan Nasional Madani as coordinator.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Tagihan karena pemberian kredit *channeling* adalah tagihan atas KLBI yang disalurkan melalui bank sebagai *channeling agent* namun hingga jatuh tempo tagihan tersebut masih belum terselesaikan. Termasuk dalam tagihan karena pemberian kredit *channeling* adalah tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) sebesar Rp5.702.027 juta.

BPK telah melakukan penelitian atas tunggakan KUT untuk memenuhi permintaan Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-152/MK.05/2008 tanggal 3 April 2008. Tujuan penelitian tersebut adalah menilai tunggakan KUT tahun penyediaan 1998/1999 pola *channeling* per 31 Desember 2009 sesuai prosedur yang disepakati bersama (*agreed upon procedure*) dalam rangka *risk sharing* antara Pemerintah, Bank Indonesia dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

BPK dengan surat Nomor 06/S/IV/01/2011 tanggal 14 Januari 2011 telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Direktur Utama Jamkrindo. Sesuai LHP BPK, dari nilai tunggakan KUT sebesar Rp5.702.027 juta diketahui antara lain:

- a. Sebesar Rp1.539.052 juta tidak didukung dengan dokumen penyaluran KUT yang lengkap di bank pelaksana, seperti surat perjanjian kredit, bukti transfer, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) atau rekomendasi Kepala Kantor Departemen Koperasi (Kakandepkop).
- b. Sebesar Rp266.869 juta merupakan tabungan beku di bank pelaksana.

Selanjutnya dalam rangka *risk sharing* BPK menyarankan agar Bank Indonesia, Pemerintah, dan Perum Jamkrindo, antara lain:

Claims on channeling loans are claims in respect of KLBI that was channeled through banks as channeling agents but which had not be settled as per the due dates. Included in claims on channeling laons are areas from the Agriculture Enterprise Credit (KUT) scheme amounting to IDR5,702,027 million.

The BPK RI has conducted an audit on the KUT arrears in accordance with the request from the Minister of Finance set out in Letter Number S-152/MK.05/2008 dated 3 April 2008. The purpose of the audit was to assess the arrears from KUT channeling credits provided in 1998/1999 as per 31 December 2009 in accordance with the procedures agreed in the context of risk sharing between the Government, Bank Indonesia and Perum Jamkrindo.

The BPK RI, through its Letter Number 06/S/IV/01/2011 dated 14 January 2011, submitted its audit report to the Minister of Finance, the Governor of Bank Indonesia and the Chief Executive of Jamkrindo. According to the BPK RI report, of the KUT arrears of IDR5,702,027 million, the following matters had been identified:

- a. *IDR1,539,052 million was not supported by full KUT documentation in the implementing banks, such as loan agreements, proof of transfer, Farmers' Group Needs Definitive Plans (RDKK) and recommendations from the Head of the Department of Cooperatives Office.*
- b. *IDR266,869 million was parked in frozen accounts in the implementing banks.*

As part of the risk sharing effort, the BPK RI subsequently recommended that Bank Indonesia, the Government and Perum Jamkrindo take the following actions, among others:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

- a. Menyepakati status tunggakan KUT Tahun Pengadaan (TP) 1998/1999 pola *channeling* yang tidak didukung dokumen penyaluran yang lengkap.
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemda dan bank pelaksana dalam rangka penyelesaian saldo rekening milik Pemda pada bank pelaksana yang digunakan untuk menampung pelunasan KUT TP 1998/1999 pola *channeling*.

Bank Indonesia telah meminta tanggapan kepada Kementerian Keuangan atas LHP BPK dan penegasan mengenai penyelesaian *risk sharing* tunggakan KUT 1998/1999 pola *channeling* melalui surat Nomor 13/3/GBI/DKBU tanggal 22 Juni 2011 namun belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Keuangan.

Selain itu, dalam Tagihan Lainnya juga terdapat tagihan kepada PT Rekakarya Mardi Sarana (RMS) sebesar Rp1.071,9 juta, USD761,661.10, dan £36,556.88 atau secara total setara Rp8.489 juta. Tagihan tersebut terkait dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 15 Agustus 2011 yang menetapkan bahwa PT RMS wajib membayar ganti rugi kepada Bank Indonesia. Selanjutnya Bank Indonesia dengan surat Nomor 13/193/DPU tanggal 21 Desember 2011 telah menyampaikan putusan pengadilan dan melakukan penagihan kepada PT RMS.

Termasuk di dalam Tagihan Lainnya terdapat tagihan kepada Perum Peruri. Hal tersebut terkait dengan telah disepakatinya biaya cetak final atas pencetakan uang tahun 2010 sebesar Rp1.409.595 juta dan tahun 2011 sebesar Rp1.052.139 juta. Berdasarkan perhitungan antara biaya cetak final dan biaya cetak sementara, terdapat kelebihan bayar kepada Perum Peruri untuk pencetakan uang tahun 2010 sebesar

- a. Agree on the status of KUT channeling arrears for 1998/1999 that are not backed by full supporting documentation.
- b. Coordinate with the relevant local governments and implementing banks for the purpose of settling the account balances of the local governments in the implementing banks used to accommodate the payment of channeling KUT loans in 1998/1999.

Bank Indonesia has sought the response of the Ministry of Finance to the BPK RI report and stressed the need for risk sharing in respect of the 1998/1999 channeling KUT arrears through Letter Number 13/3/GBI/DKBU dated June 22, 2011, but no official response from the Ministry has been forthcoming thus far.

In addition, Other Claims also contains claims against PT Rekakarya Mardi Sarana (RMS) of IDR1,071.9 million, USD761,661.10, and GBP36,556.88, or the equivalent of IDR 8,489 million. The said claim is related to the decision of the Central Jakarta District Court Number 83/PDT.G/2011/PN.JKT.PST, dated August 15, 2011, which held that PT RMS must pay compensation to Bank Indonesia. Subsequently, Bank Indonesia, through Letter Number 13/193/DPU, dated December 21, 2011, forwarded the court decision and submitted its claim to PT RMS.

Other Claims also contains a claim against Perum Peruri in connection with an agreement on the final cost for the printing of currency in 2010 in the amount of IDR1,409,595 million, and for 2011 in the amount of IDR1,052,139 million. Based on the calculation of the final printing costs and the interim printing costs, Perum Peruri was overpaid for printing in 2010 by IDR104,520 million, and underpaid for

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements As at December 31, 2011

Rp104.520 juta dan kekurangan bayar untuk pencetakan uang tahun 2011 sebesar Rp42.706 juta, sehingga masih terdapat tagihan kepada Perum Peruri sebesar Rp61.814 juta. Atas tagihan tersebut, Bank Indonesia telah menyampaikan tagihan kepada Perum Peruri pada tanggal 11 April 2012 – lihat Catatan C.45.

printing in 2011 by IDR42,706 million. Thus, Bank Indonesia has a claim against Perum Peruri of IDR61,814 million. In respect of this claim, Bank Indonesia submitted a demand on April 11, 2012 – see Note C.45.

13. Penyertaan

Bank Indonesia mempunyai penyertaan pada lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

13. Equity Participation

Bank Indonesia holds equity stakes in a number of banks and other financial institutions, with the details being as follows:

Uraian	Persentase kepemilikan Percentage of Ownership	31 Desember 2011 December 31, 2011	Persentase kepemilikan Percentage of Ownership	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	%	Rp juta IDR Millions	%	Rp juta IDR Millions	
Penyertaan pada:					Equity participation in:
- Bank for International Settlements	0,55	583.612	0,55	582.297	- Bank for International Settlements
- International Islamic Liquidity Management	6,67	45.340	0,00	0	- International Islamic Liquidity Management
		628.952		582.297	

a. Penyertaan pada Bank for International Settlements (BIS)

Tujuan penyertaan pada BIS adalah untuk memperoleh akses lebih besar terhadap kegiatan BIS dalam pengambilan keputusan, memanfaatkan fasilitas yang disediakan, meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia, meningkatkan kerjasama di bidang kebanksentralan yang berkaitan dengan kebijakan

a. Participation in Bank for International Settlements (BIS)

The purpose of the equity participation is to gain more access in BIS decision-making activities, to utilize the provided facilities, as well as to increase international investors' confidence towards Indonesia and cooperation with other central banks concerning monetary policy, financial system stability, payment system and banking

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, dan pengaturan perbankan. Bank Indonesia membeli 3.000 lembar saham (0,55% dari total saham yang beredar) pada tanggal 29 September 2003 dengan nilai nominal SDR5,000.00/saham dengan total harga perolehan SDR42,054,000.00. Posisi penyertaan tersebut pada tanggal 31 Desember 2011 setara dengan Rp583.612 juta.

b. International Islamic Liquidity Management (IILM)

IILM merupakan lembaga yang didirikan untuk mendorong perkembangan perbankan syariah khususnya dan industri keuangan syariah secara umum melalui peningkatan efisiensi pengelolaan likuiditas secara *cross-border*. Bank Indonesia dapat berinvestasi pada sukuk atau instrumen keuangan syariah lainnya yang diterbitkan oleh IILM.

Bank Indonesia melakukan penyertaan pada tanggal 30 Maret 2011 sebesar USD5,000,000.00. Per 31 Desember 2011 nilai penyertaan tersebut setara dengan Rp45.340 juta.

14. Aktiva Lain-lain

Posisi Aktiva Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp41.022.806 juta dan Rp40.284.416 juta, dengan rincian sebagai berikut:

regulation. On September 29, 2003, Bank Indonesia purchased 3,000 shares (0.55% of total issued shares) with a nominal value of SDR 5,000/shares and total acquisition cost of SDR42,054,000.00. The balance of the equity participation as at December 31, 2011 is equivalent to IDR583,612 million.

b. International Islamic Liquidity Management (IILM)

IILM is an institution that was established to encourage the development of sharia banking in particular and the sharia financial services industry in general through increased efficiency in the cross-border management of liquidity. Bank Indonesia may invest in sukuk or other sharia financial instrument issued by IILM.

Bank Indonesia made an investment on March 30, 2011 in the amount of USD5,000,000.00. As of December 31, 2011, the value of this investment amounted to the equivalent of IDR45,340 million.

14. Other Assets

The balances of Other Assets as at December 31, 2011 and December 31, 2010 were IDR41,022,806 million and IDR40,284,416 million respectively, with the details being as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
- Reinvestasi <i>Cash Collateral</i>	16.841.761	19.683.577	- <i>Reinvestment of Cash Collateral</i>
- Aktiva Tetap dan Aktiva Tidak Berwujud (Nilai buku)	15.953.662	6.667.599	- <i>Fixed assets and intangible assets (book value)</i>
- Aktiva Lain-lain pada IPBV	362.039	359.810	- <i>Other assets in IPBV</i>
- Persediaan Bahan Uang dan Uang Muka Pengadaan Uang	289.367	721.894	- <i>Currency Inventory and Currency Procurement Advances</i>
- Aktiva Pajak Tangguhan	7.014.689	6.950.398	- <i>Deferred Tax Assets</i>
- Lainnya	561.288	5.901.138	- <i>Other assets</i>
	41.022.806	40.284.416	

a. Reinvestasi *Cash Collateral*

Saldo reinvestasi *cash collateral* yang berasal dari *cash collateral* program TPSL per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp16.841.761 juta dan Rp19.683.577 juta - lihat Catatan C.7 dan Catatan C.29.

a. *Reinvestment of Cash Collateral*

The balance for *Reinvestment of Cash Collateral* originating from *cash collateral* under the TPSL program per December 31, 2011, and December 31, 2010, were respectively IDR16,841,761 million and IDR19,683,577 million – see Notes C.7 and C.29.

b. Aktiva Tetap dan Aktiva Tidak Berwujud

Nilai buku Aktiva Tetap dan Aktiva Tidak Berwujud per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp15.953.662 juta dan Rp6.667.599 juta, dengan rincian sebagai berikut:

b. *Fixed Assets and Intangible Assets*

The book value of *fixed assets and intangible assets* as at December 31, 2011 and December 31, 2010 were IDR15,953,662 million and IDR6,667,599 million respectively, with the details being as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
Harga Perolehan/Revaluasi			Cost of Fixed Assets/Revaluation of Fixed Assets
Aktiva Tetap:			Fixed Assets:
- Tanah dan Bangunan	14.888.080	6.332.382	- Land and Buildings
- Selain Tanah dan Bangunan	1.581.177	1.464.412	- Non-Land and Buildings
Aktiva Tidak Berwujud	215.176	206.616	Intangible Assets
Aktiva dalam Penyelesaian	498.284	361.883	Assets in Process
	17.182.717	8.365.293	
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi			Accumulated Depreciation/Amortization
Aktiva Tetap:			Fixed Assets :
- Bangunan	34.082	657.764	- Buildings
- Selain Bangunan	1.060.517	926.527	- Non-Buildings
Aktiva Tidak Berwujud	134.456	113.403	Intangible Assets
	1.229.055	1.697.694	
Nilai Buku	15.953.662	6.667.599	Book Value

Nilai Aktiva Tetap berupa tanah dan bangunan di Kantor Pusat dan Kantor Bank Indonesia disajikan sebesar nilai setelah revaluasi.

The value of fixed assets in the form of land and buildings at Head Office and Bank Indonesia Offices is presented based on value after revaluation.

Pada tahun 2011 Bank Indonesia telah melakukan penyesuaian kembali (revaluasi) atas nilai persil (tanah) dan bangunan. Tujuan dilakukannya revaluasi tersebut adalah agar nilai persil (tanah) dan bangunan lebih wajar (sesuai harga pasar), mengingat revaluasi persil (tanah) dan bangunan oleh Bank Indonesia terakhir dilaksanakan tahun 2000. Revaluasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang Bank Indonesia.

In 2011, Bank Indonesia revalued its parcels of land and its buildings. The objective of the revaluation was to ensure that the value of the said parcels and buildings was fairer based on market values bearing in mind that the last revaluation was conducted in 2000. The revaluation was carried out based on article 6 of the Bank Indonesia Act.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Pelaksana pekerjaan revaluasi (*appraisal*) aktiva tetap Bank Indonesia adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto dan Rekan, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 13/15/DLP/BPrI tanggal 30 Desember 2011. Sesuai laporan hasil revaluasi Nomor : V.PP.11.00.0376 tanggal 15 Maret 2012, nilai revaluasi per 31 Desember 2011 sebesar Rp14.710.874 juta. Selisih antara nilai tercatat sebelum dan sesudah revaluasi adalah sebesar Rp9.190.565 juta. Nilai tersebut terdiri dari selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp9.266.042 juta yang dicatat di neraca dalam pos Modal (lihat Catatan C.30 dan Catatan C.31) dikurangi selisih kurang penilaian kembali (kerugian hasil revaluasi aktiva tetap) sebesar Rp75.477 juta yang dicatat di surplus (defisit) dalam pos Beban Umum dan Lainnya, lihat Catatan C.47.

Revaluasi Aktiva Tetap meliputi persil dan bangunan di seluruh Bank Indonesia di dalam negeri. Sedangkan persil dan bangunan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri akan dilakukan revaluasi pada tahun 2012.

c. Aktiva Lain-lain pada IPBV

Aktiva Lain-lain pada IPBV merupakan tagihan kepada IPBV, suatu perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola *Non Performing Loans* (NPL) eks Indover Bank, yang terdiri dari tagihan *Floating Principal Note* (FPN) dan tagihan lainnya yang digunakan sebagai cadangan untuk biaya operasional IPBV.

Tagihan FPN merupakan tagihan yang berasal dari NPL eks Indover Bank yang dialihkan pengelolaannya kepada IPBV. Secara periodik (triwulanan), IPBV memutakhirkan nilai FPN

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

The appraisal of Bank Indonesia's fixed assets was carried out by the Public Appraisers Office of Toto Suharto and Partners, as set out in the Work Agreement Number 13/15/DLP/BPrI dated December 30, 2011. Based on the Revaluation Report (Number V.PP.11.00.0376, dated March 15, 2012, the value of the assets per December 31, 2011 was IDR14,710,874 million. The difference between the value recorded previously and the revaluation value was IDR9,190,565 million. The value consists of the difference between the revaluation value of fixed assets value of IDR9,266,042 million as recorded in the balance sheet under Capital (see Notes C.30 and Note C.31, less the difference in the revaluation (loss on the revaluation of fixed assets) of IDR75,477 million, which is recorded in Surplus (Deficit) in the General and Other Costs account-see Note C. 47.

The revaluation of fixed assets covers all Bank Indonesia parcels of land and buildings throughout Indonesia. Lands and buildings at Bank Indonesia's overseas representative offices will be revalued in 2012.

c. Other Assets in IPBV

Other Assets in IPBV are claims against IPBV, a company appointed to manage non-performing loans ex Indover Bank, which consist of the Floating Principle Note (FPN) claim and other claims used as a reserve for IPBV's operational expenditures.

FPN claims are claims from Non-Performing Loans (NPL) of ex-Indover Bank that have been transferred to IPBV. Quarterly, IPBV renews the FPN values to represent the current NPL value

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

tersebut untuk menggambarkan nilai NPL terkini yang dikelola. Untuk pertama kali nilai FPN yang dikeluarkan IPBV pada tanggal 26 Januari 2004 sebesar USD294,232,949.00.

Berdasarkan laporan triwulanan IPBV tanggal 31 Desember 2011, IPBV masih mengelola NPL dari 11 debitur senilai USD38,598,104.78 atau setara dengan Rp350.008 juta, dengan nilai FPN sebesar nilai NPL tersebut.

Sementara itu, nilai tagihan lainnya kepada IPBV adalah sebesar USD66,194.03 atau setara dengan Rp600 juta dan EUR973,765.36 (ekuivalen USD1,260,587.95) atau setara dengan Rp11.431 juta. Dari jumlah tagihan lainnya tersebut oleh IPBV disimpan di Indover Bank Amsterdam sebesar EUR393,960.20 serta di ING Bank Amsterdam sebesar USD66,194.03 dan EUR579,805.16.

d. Aktiva Pajak Tangguhan

Posisi Aktiva Pajak Tangguhan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp7.014.689 juta dan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp6.950.398 juta.

Sesuai SE Nomor 13/47/INTERN tanggal 23 Desember 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Nomor 8/50/INTERN tanggal 28 September 2006 tentang PAKBI disebutkan bahwa nilai tercatat Aktiva Pajak Tangguhan ditinjau kembali pada tanggal Neraca (31 Desember) dengan memperhatikan prediksi Surplus (Defisit) fiskal di tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2011, Bank Indonesia tidak memperhitungkan Aktiva Pajak Tangguhan tahun 2011 yang berasal dari rugi fiskal karena Aktiva

that it manages. The First FPN was issued on January 26, 2004, in the amount of USD294,232,949.00.

Based on IPBV's latest quarterly report dated December 31, 2011, IPBV continues to manages NPLs from 11 debtors in the amount of USD38,598,104.78, or the equivalent of IDR350,008 million, with the value of the FPN being the same as the value of the NPLs.

Meanwhile, the balance of other claims on IPBV was USD66,194.03 or the equivalent of IDR600 million and EUR973,765.36 (or the equivalent of USD1,260,587.95), which is equal to IDR11,431 million. Of the said, those kept by IPBV in Indover Bank amount to EUR393,960.20, while those in ING Bank Amsterdam amount to USD66,194.03 and EUR579,805.16.

d. Deferred Tax Assets

The balance of Deferred Tax Assets as at December 31, 2011 was IDR7,014,689 million and as at December 31, 2010 was IDR6,950,398 million.

Under Circular Number 13/47/INTERN, dated December 23, 2011 on the amendment of Circular Number 8/50/INTERN, dated September 28, 2006 on PAKBI, the recorded value of deferred tax assets were to reviewed as per the date of the Balance Sheet (31 December) having regard to the predicted fiscal Surplus (Deficit) for the subsequent year.

In 2011, Bank Indonesia did not calculated deferred tax assets for 2011 originating from the fiscal loss as Deferred Tax Assets as recognized

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Pajak Tangguhan yang sudah diakui diperkirakan cukup untuk dikompensasi dengan perkiraan surplus lima tahun yang akan datang. Penjelasan lebih rinci mengenai Aktiva Pajak Tangguhan dijelaskan dalam Catatan C.30.

e. Lainnya

Termasuk dalam Pos Lainnya adalah penempatan dana pada Indover Bank Amsterdam (IBA) yang terdiri dari USD48,797,259.98 atau setara dengan Rp442.494 juta dan EUR4,987,667.93 atau setara dengan Rp58.550 juta per 31 Desember 2011 serta Aktiva Lainnya sebesar Rp502.738 juta.

Pada tanggal 5 November 2009, dalam *Creditors Meeting* di Pengadilan Amsterdam, Belanda, tagihan Bank Indonesia di IBA ditetapkan sebagai *disputed claim also provisionally acknowledged*. Selanjutnya pada bulan Maret 2010, Bank Indonesia telah mengajukan *Statement of Claim* ke Pengadilan Amsterdam meminta agar *claim* Bank Indonesia di IBA tersebut dapat sepenuhnya diakui menjadi *acknowledged claim*. Berdasarkan *Eleventh Public Liquidation Report* dari *Stibbe* tanggal 28 Februari 2012, proses pengadilan atas *claim* Bank Indonesia tersebut masih berlangsung – lihat Catatan E.4.

Tagihan Bunga FSD eks BTO PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. sebesar Rp5.322.248 juta yang semula disajikan dalam pos Tagihan kepada Bank direklasifikasi menjadi pos Aktiva Lain-lain. Bank Indonesia sesuai Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 26 April 2012 telah meng-off *balance sheet*-kan tagihan bunga FSD tersebut – lihat Catatan C.15 dan E.8.

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

is considered sufficient to compensate based on the estimated surpluses in the coming five years. Further explanations on Deferred Tax Assets are provided in Note C.30.

e. Others

Included in Others is the placement of funds in Indover Bank Amsterdam (IBA) in the amount of USD48,797,259.98 or the equivalent of IDR442,494 million and EUR4,987,667.93 or equivalent to IDR58,550 million as at December 31, 2011, and Other Assets amounting to IDR502,738 million.

On November 5, 2009, at the Creditors Meeting in the Amsterdam Court in the Netherlands, Bank Indonesia's claims in IBA were recognized as "disputed claims also provisionally acknowledged." In March 2010, Bank Indonesia proposed a Statement of Claim to the Amsterdam Court requesting that Bank Indonesia's claim in IBA be declared an acknowledged claim. According to the Eleventh Public Liquidation Report from Stibbe, dated February 28, 2012, the hearing on Bank Indonesia's claim is still in process – see Note E.4.

The claim on FSD interest ex BTO PT Bank Danamon Indonesia Tbk in the amount of IDR5,322,248 million, which was originally presented on Claims on Banks, has been reclassified to the Other Assets account. Bank Indonesia, in accordance with the Board of Governors' Resolution dated April 26, 2012, has removed the said FSD interest claim from the Balance Sheet – see Notes C.15 and E.8.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

15. Penyisihan Aktiva

Total penyisihan aktiva pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp11.263.320 juta dan Rp15.649.892 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
- Saldo awal	15.649.892	15.409.756	- Beginning Balance
- Pemulihan penyisihan aktiva	0	0	- Asset Recovery
- Penggunaan untuk penghapusbukuan aktiva	(5.323.327)	(799)	- Assets write-off
- Pengurangan (penambahan) pembentukan penyisihan aktiva	936.755	240.935	- Decrease (addition) of allowance for bad debts
- Saldo akhir	11.263.320	15.649.892	- Ending Balance

Pada tahun 2011 Bank Indonesia meng-off balance sheet-kan tagihan bunga FSD eks BTO PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. sebesar Rp5.322.248 juta—lihat Catatan C.14 dan E.8.

In 2011, Bank Indonesia removed from the balance sheet its FSD interest claim ex BTO PT Bank Danamon Indonesia Tbk in the amount of IDR5,322,248 million—see Notes C.14 and E.8.

16. Uang dalam Peredaran

Uang dalam Peredaran merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia dengan posisi per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing adalah sebesar Rp372.982.462 juta dan Rp318.585.280 juta dengan rincian sebagai berikut:

16. Currency in Circulation

Currency in Circulation consists of valid payment instruments not under the possession of Bank Indonesia, and had a position as at December 31, 2011 and December 31, 2010 amounting to IDR372,982,462 million and IDR318,585,280 million respectively, with details as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
Uang yang dicetak:	463.026.198	441.530.239	<i>Printed Money:</i>
- Uang Kertas	458.859.086	437.056.520	- Banknotes
- Uang Logam	4.156.584	4.463.191	- Coins
- Uang Khusus	10.528	10.528	- Special Editions
Uang yang telah dicabut dan ditarik dari Peredaran	(1.003)	(3.158)	<i>Currency withdrawn from circulation</i>
Uang dalam Persediaan	(90.027.554)	(122.926.647)	<i>Currency Inventory</i>
Lainnya	(15.179)	(15.154)	<i>Others</i>
Jumlah Uang dalam Peredaran	372.982.462	318.585.280	<i>Currency in Circulation</i>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang antara lain diatur bahwa dalam kegiatan pemusnahan uang Rupiah, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah, dan pelaksanaan pemusnahannya didasarkan pada nota kesepahaman, yang berisi teknis pelaksanaan pemusnahan Rupiah, termasuk pembuatan berita acara pemusnahan Rupiah. Selain itu jumlah dan nilai nominal Rupiah yang dimusnahkan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia dalam suratnya kepada Presiden Republik Indonesia Nomor 13/9/GBI/DHK tanggal 15 September 2011 tentang Laporan Dampak Penerapan Undang-Undang Mata Uang, menyampaikan bahwa sambil menunggu nota kesepahaman dimaksud, Bank Indonesia tetap melakukan pemusnahan uang Rupiah sebagaimana mestinya. Ketentuan yang masih berlaku saat ini antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan Rupiah, sebagaimana telah diubah

Act Number 7 of 2011 on Currency governs, among other things, the destruction of Rupiah currency. This must be carried out by Bank Indonesia in coordination with the government based on an MoU, setting out the technical details of the destruction operation, including the need to prepare an official report. In addition, the amount and nominal value of the Rupiah destroyed must be published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia.

The Governor of Bank Indonesia in his letter to the President of the Republic of Indonesia, Number 13/9/GBI/DHK, dated September 15, 2011, which contained a report on the impact of the application of the Currency Act, stated that while awaiting the said MoU Bank Indonesia would continue to destroy Rupiah as required. The provisions that continue to be effective include Bank Indonesia Regulation Number 6/14/PBI/2004, dated June 22, 2004 on the issuance, circulation, withdrawal and destruction of Rupiah, as amended by Bank Indonesia

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

dengan PBI Nomor 9/10/PBI/2007 tanggal 30 Agustus 2007.

Pemerintah dan Bank Indonesia sampai saat ini masih terus melakukan penyelesaian nota kesepahaman sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Mata Uang. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-113/MK.05/2012 tanggal 20 Februari 2012, Menteri Keuangan menyatakan setuju terhadap draft nota kesepahaman yang telah disiapkan dan dibahas oleh Tim Teknis. Namun demikian Bank Indonesia berpendapat bahwa lampiran surat Menteri Keuangan tersebut (berupa draft nota kesepahaman) terdapat sedikit perbedaan dengan hasil pembahasan Tim Teknis. Atas dasar ini, Gubernur Bank Indonesia telah menanggapi surat Menteri Keuangan tersebut yaitu dengan surat Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/2/GBI/DHK tanggal 16 April 2012 yang pada intinya Gubernur Bank Indonesia mendukung agar draft nota kesepahaman segera difinalisasi, dengan menghapus pasal 7 draft nota kesepahaman yang berisi ketentuan mengenai proses penggunaan gambar pahlawan dan/atau Presiden dalam desain Rupiah.

BI melaksanakan kegiatan pemusnahan uang terhadap uang yang sudah tidak layak edar (UTLE) dan mengganti dengan uang baru. Proses pemusnahan tersebut dilakukan melalui suatu prosedur dan pengawasan pelaksanaan pemusnahan uang yang ketat serta menetapkan tingkat kelusuhan uang yang dapat dimusnahkan. Penetapan UTLE tersebut melalui setting mesin sortasi berupa penentuan *soil level* (tingkat kelusuhan) dan secara manual melalui standarisasi visual uang layak edar. Pemusnahan uang kertas oleh Bank Indonesia menggunakan mesin sortasi uang kertas (MSUK) dan mesin racik uang kertas (MRUK), sedangkan pemusnahan uang logam dilakukan melalui peleburan yang berada di bawah pengawasan penuh Bank Indonesia.

Regulation Number 9/10/PBI/2007 dated August 30, 2007.

The Government and Bank Indonesia are currently still in the process of finalizing the MoU, as mandated by the Currency Act. Based on the Minister of Finance's letter Number S-113/MK.05/2012, dated February 20, 2012, the Minister of Finance has agreed to the draft MoU that was prepared and agreed upon by the Technical Team. Nevertheless, Bank Indonesia is of the opinion that attachment to the said Minister of Finance's letter (in the form of a draft MoU) differs slightly from what was agreed upon during the Technical Teams discussions. As a consequence, the Governor of Bank Indonesia responded to the Minister of Finance's letter through Governor of Bank Indonesia letter Number 14/2/GBI/DHK, dated April 16, 2012, which in essence supports the speedy finalization of the MoU through the deletion of article 7 of the draft MoU, which contains rules governing the use of images of heroes and/or the President in the design of Rupiah.

Bank Indonesia has destroyed Rupiah that is no longer fit to circulate and replaced it with new Rupiah. The destruction process was based on strict procedures and supervision, and an evaluation of the condition of the money to be destroyed. This was done through the use of a sorting machine set to "soil level", as well as manually through the application of visual standards. The destruction of paper money by Bank Indonesia is carried out using a paper money sorting machine and a paper money shredding machine, while coins are destroyed by melting down under tight supervision by Bank Indonesia.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Pemusnahan uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar 2.991.797.544 bilyet uang kertas dan 71.015.500 keping uang logam dengan total nilai nominal sebesar Rp83.280.777 juta dengan rincian sebagai berikut:

Between June 28, 2011 and December 31, 2011, a total of 2,991,797,544 bank notes and 71,015,500 coins (with a total of nominal value of IDR83,280,777 million) were destroyed, with the details being as follows:

Uraian	Bilyet Notes	Keping Coins	Nominal (Rp juta) Nominal Value (IDR millions)	Description
Uang Tidak Layak Edar	2.989.726.063	33.888.000	83.209.538	Money unfit for circulation
Uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran	2.071.481	37.127.500	71.239	Money withdrawn from circulation
	2.991.797.544	71.015.500	83.280.777	

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Mata Uang yaitu bahwa jumlah dan nilai nominal uang yang dimusnahkan harus ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, maka Bank Indonesia telah menyampaikan surat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 30 Januari 2012 untuk meminta agar jumlah dan nilai nominal uang yang dimusnahkan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Namun demikian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga saat ini belum dapat menempatkan jumlah dan nilai nominal uang yang dimusnahkan tersebut dalam Lembaran Negara Republik Indonesia karena yang dapat ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia hanya peraturan perundangan. Dalam kaitan ini sedang dilakukan pembahasan antara Bank Indonesia dengan pihak Pemerintah (c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mencari solusi agar informasi mengenai jumlah dan nilai nominal uang yang dimusnahkan dapat ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

For the purpose of fulfilling the requirement of the Currency Act to the effect that the amount and nominal value of destroyed currency be published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia, Bank Indonesia submitted a letter to the Ministry of Law and Human rights on January 30, 2012 asking that the amount and nominal value of destroyed currency be published in the Official Gazette. However, the Ministry has yet to publish the currency figures as to date only laws and regulations may be published in the Official Gazette. In this respect, discussions are currently underway between Bank Indonesia and the Government (through the Ministry of Law and Human Rights) for the purpose of seeking a solution so that information on the amount and nominal value of destroyed currency may be published in the Official Gazette.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

17. Giro Pemerintah

Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemegang kas Pemerintah, mengelola giro Pemerintah dengan rincian:

17. Government Demand Deposits

In performing its function as the account holder of the Government, Bank Indonesia manages Government demand deposits, with the details being as follows:

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
- Dalam Rupiah	56.494.255	62.137.088	- In Rupiah
- Dalam valas	33.877.075	28.856.995	- In Foreign Currency
	90.371.330	90.994.083	

a. Giro Pemerintah dalam Rupiah per 31 Desember 2011, antara lain terdiri dari:

- 1) Rekening Kementerian Keuangan yang diberikan jasa giro oleh Bank Indonesia terdiri dari:
 - a) Rekening Kas Umum Negara (RKUN) senilai Rp2.347.823 juta.
 - b) Rekening Penempatan terdiri dari:
 - (1) Rekening Kas Penempatan sebesar Rp4.790.148 juta
 - (2) Rekening lainnya yang dikategorikan sebagai Rekening Penempatan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp49.314.591 juta, antara lain terdiri dari:
 - (a) Rekening giro Sub Bendahara Umum Negara dalam rangka program penjaminan sebesar Rp83.469 juta yang dananya berasal dari penerbitan SUP Nomor SU-004/MK/1999.

a. *Government demand deposits in Rupiah as at December 31, 2011, included the following:*

- 1) *Accounts of Ministry of Finance provided with demand deposit services by Bank Indonesia, consisting of:*
 - a) *General State Cash Account (Rekening Kas Umum Negara – RKUN) amounting to IDR2,347,823 million.*
 - b) *Placement accounts consisting of:*
 - (1) *Placement Cash Accounts amounting to IDR4,790,148 million,*
 - (2) *Other accounts categorized as Placement Accounts by the Ministry of Finance amounting to IDR49,314,591 million, consisting of:*
 - (a) *Sub BUN demand deposits for the purpose of guarantee program amounting to IDR83,469 million, with funds raised from the issuance of SUP Number SU-004/MK/1999.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

- (b) Rekening Direktorat Jenderal
Perbendaharaan sebesar
Rp48.505.945 juta, antara lain untuk
menampung dana Sisa Anggaran
Lebih (SAL).
- 2) Rekening Pemerintah Lainnya yang tidak
diberikan jasa giro sebesar Rp41.693 juta.
- b. Giro Pemerintah dalam valas per 31 Desember 2011,
antara lain terdiri dari:
- 1) Rekening Kementerian Keuangan yang
diberikan jasa giro oleh Bank Indonesia, terdiri
dari:
- a) Rekening Kas Umum Negara terdiri dari
RKUN sebesar USD5,627,362.40 dan
JPY9,144,976,104 atau setara dengan
Rp1.119.191 juta.
- b) Rekening Penempatan terdiri dari:
- (1) Rekening Kas Penempatan dalam USD
sebesar USD2,569,653,825.12 atau setara
dengan Rp23.301.620 juta.
- (2) Rekening lainnya yang telah dikategorikan
sebagai Rekening Penempatan oleh
Kementerian Keuangan dalam valuta USD
dan non USD setara dengan Rp9.185.544
juta.
- 2) Rekening Pemerintah Lainnya dalam valas yang
tidak diberikan jasa giro setara dengan Rp270.720
juta.

Tingkat bunga atas RKUN Rupiah, RKUN valuta USD,
dan RKUN valas non USD per tahun adalah 0,1%.
Sementara itu tingkat bunga atas rekening
penempatan dalam Rupiah, rekening penempatan
dalam valuta USD, dan rekening penempatan valas
non USD per tahun adalah 65% dari suku bunga
acuan. Tingkat bunga atas Rekening Pemerintah
tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama

- (b) Directorate General of Treasury
accounts amounting to IDR48,505,945
million, among others to keep excess
funds from Budget Surplus (Sisa
Anggaran Lebih – SAL).
- 2) Other Government Accounts not provided with
demand deposit services, amounting to IDR41,693
million.
- b. Government demand deposits in foreign currency
as at December 31, 2011, consisting of:
- 1) Ministry of Finance Accounts provided with
demand deposit services by Bank Indonesia, with
details as follow:
- a) State Cash Account amounting to
USD5,627,362,40 and JPY9,144,976,104, or
equivalent to IDR1,119,191 million.
- b) Placement accounts consisting of:
- (1) USD Cash Placements Accounts amounting
to USD2,569,653,825.12 or equivalent to
IDR23,301,620 million
- (2) Other accounts categorized as Placement
Accounts by the Ministry of Finance in
USD and non USD equivalent to
IDR9,185,544 million.
- 2) Other Government Accounts without demand
deposit facilities in foreign currency equivalent
to IDR270,720 million.

The interest rate for RKUN in Rupiah, RKUN in USD,
and RKUN in non USD is 0.1% per annum. The
interest rates for placement accounts in Rupiah,
placement accounts in USD, and placement accounts
in non USD per annum is 65% of the reference
interest rate and is determined based on an
Agreement between The Ministry of Finance and
the Governor of Bank Indonesia concerning

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang mengatur mengenai koordinasi pengelolaan Uang Negara dan untuk pertama kali berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/KMK.05/2009 dan Nomor 11/3/KEP.GBI/2009.

Coordination of the Management of State Funds, and for the first time based on the Joint Decree of the Ministry of Finance and the Governor of Bank Indonesia Number 17/KMK.05/2009 and Number 11/3/KEP.GBI/2009.

18. Giro Bank

Giro Bank adalah saldo giro bank umum minimal berisi Giro Wajib Minimum (GWM) yang harus dipenuhi oleh Bank sesuai PBI Nomor 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valas.

18. Bank Demand Deposits

Bank demand deposits are the balance of demand deposits of commercial banks in order to comply with Minimum Reserve Requirement (Giro Wajib Minimum - GWM). GWM is regulated by Bank Indonesia Regulation Number 13/10/PBI/2011 dated February 9, 2011, on Minimum Reserve Requirements of Commercial Banks in Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currency.

Saldo Giro Bank per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Bank Demand Deposits as at December 31, 2011 and December 31, 2010 were as follows:

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
Dalam Rupiah	207.537.910	159.105.607	<i>In Rupiah</i>
Dalam Valas	43.849.664	7.057.702	<i>In Foreign Currency</i>
	251.387.574	166.163.309	

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements As at December 31, 2011

19. Giro Lainnya

19. Other Demand Deposits

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
Rekening Giro IMF	1.003.592	1.023.825	IMF
Rekening Giro Bank Dunia	57.421	16.167	World Bank
Rekening Giro ADB	196.480	15.831	ADB
Rekening Giro Lainnya	115.864	484.315	Others
	1.373.357	1.540.138	

Rekening giro IMF merupakan gabungan dari IMF Account Nomor 1 dan IMF Account Nomor 2. IMF Account Nomor 1 digunakan untuk transaksi keuangan dengan IMF antara lain terkait dengan pembayaran kuota Indonesia dalam Rupiah, *purchases* dan *repurchases* fasilitas IMF, sedangkan IMF Account Nomor 2 digunakan untuk transaksi administratif IMF di Indonesia.

The IMF Demand Deposit accounts consist of IMF Account Number 1 and IMF Account Number 2. IMF Account Number 1 is used for financial transactions related to Indonesia's quota payments in Rupiah, and purchases and repurchases of IMF facilities, whereas IMF Account Number 2 is used for IMF administrative transactions in Indonesia.

Rekening giro IMF direvaluasi setiap tanggal 30 April berdasarkan kurs yang ditetapkan IMF pada tanggal tutup buku IMF. Penyesuaian kurs ini atas beban atau untuk untung Bank Indonesia dan Pemerintah. Revaluasi yang menjadi bagian Pemerintah tersebut, apabila diselesaikan dengan menerbitkan *promissory note*, akan menambah atau mengurangi nilai *promissory note* Pemerintah yang diadministrasikan dan disimpan oleh Bank Indonesia. Total kuota Indonesia dan total nilai *promissory note* per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar SDR2,079,300,000.00 dan Rp25.871.091 juta.

The balance of IMF Demand Deposits Account is revalued every April 30 based on the exchange rate at the date of closing of the IMF books. This exchange rate adjustment concerns expenses or gains accruing to Bank Indonesia and the Government. The revaluation that the Government is liable for, if settled by Promissory Note, will increase or reduce the balance of the Government's promissory notes administered and kept by Bank Indonesia. Indonesia's total quota and the total value of promissory notes as at December 31, 2011, were SDR2,079,300,000.00 and IDR25,871,091 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

20. Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 tercatat masing-masing sebesar Rp117.367.163 juta dan Rp195.500.837 juta. Rincian Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

20. Bank Indonesia Certificates

Bank Indonesia Certificates as at December 31, 2011 and December 31, 2010 amounted to IDR117,367,163 million and IDR195,500,837 million respectively, with the details being as follows:

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
Nilai nominal menurut jangka waktu:			Nominal Value by Tenor:
- 3 bulan	0	10.000.000	- 3 months
- 6 bulan	0	135.219.999	- 6 months
- 9 bulan	119.776.999	54.892.997	- 9 months
Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi	(2.409.836)	(4.612.159)	Less: Un-amortized discount (interest paid in advance)
	117.367.163	195.500.837	

21. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 tercatat masing-masing sebesar Rp3.476.000 juta dan Rp2.997.000 juta. Rincian Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah sebagai berikut:

21. Bank Indonesia Sharia Certificates

Bank Indonesia Sharia Certificates as at December 31, 2011 and December 31, 2010, amounted to IDR3,476,000 million and IDR2,997,000 million respectively, with the details being as follows:

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
Nilai nominal menurut jangka waktu:			Nominal value by tenor:
- 3 bulan	0	1.576.000	- 3 months
- 6 bulan	0	1.421.000	- 6 months
- 9 bulan	3.476.000	0	- 9 months
	3.476.000	2.997.000	

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

22. Penempatan Berjangka

Penempatan Berjangka (*Term Deposit*) yang berjangka waktu paling singkat satu hari dan paling lama 12 bulan, pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing tercatat sebesar Rp152.839.020 juta dan Rp171.192.385 juta, dengan rincian sebagai berikut:

22. Term Deposits

Term Deposits, with minimum terms of one day and maximum terms of 12 months, as at December 31, 2011 and December 31, 2010 amounted to IDR152,839,020 million and IDR171,192,385 million respectively, with the details being as follows:

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
Nilai Nominal	154.381.100	172.645.500	Nominal Value
- 1 hari <i>overnight</i>	0	0	- <i>overnight</i>
- 2 s/d 90 hari	22.002.000	102.523.500	- 2 - 90 days
- >90 hari	132.379.100	70.122.000	- >90 days
Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi	(1.542.080)	(1.453.115)	Less: Un-amortized discount (interest paid in advance)
	152.839.020	171.192.385	
Tingkat Diskonto			Discount Rate
- 1 hari <i>overnight</i>	-	-	- <i>Overnight</i>
- 2 s/d 90 hari	4,54% - 7,19%	6,07% - 6,35%	- 2 - 90 days
- >90 hari	4,59% - 7,40%	6,22% - 6,32%	- >90 days

23. Penempatan Dana

Penempatan Dana (*Deposit Facility*) yang berjangka waktu *overnight* pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing tercatat sebesar Rp152.474.286 juta dan Rp92.038.216 juta. Rincian Penempatan Dana adalah sebagai berikut:

23. Deposit Facilities

Overnight Deposit Facilities per December 31, 2011 and December 31, 2010, respectively amounted to IDR152,474,286 million and IDR92,038,216 million, with the details being as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
Nilai nominal	152.512.400	92.080.400	Nominal value
Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi	(38.114)	(42.184)	Less: Un-amortized discount (interest paid in advance)
	152.474.286	92.038.216	

24. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) yang berjangka waktu *overnight* pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 tercatat masing-masing sebesar Rp17.403.100 juta dan Rp9.175.700 juta.

24. Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities

Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah - FASBIS) as at December 31, 2011 and December 31, 2010 amounted to IDR17,403,100 million and IDR9,175,700 million respectively.

25. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (*Reverse Repo*) pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 tercatat masing-masing sebesar Rp68.752.428 juta dan Rp7.000.320 juta.

25. Securities Sold Under Repurchase Agreements

Securities Sold Under Repurchase Agreements (*Reverse Repo*) as at December 31, 2011 and December 31, 2010 amounted to IDR68,752,428 million and IDR7,000,320 million respectively.

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
a. SUN yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali			a. SUN sold under repurchase agreement
- Nilai Nominal <i>Outstanding Reverse Repo</i>	68.857.208	7.058.243	- Reverse Repo Outstanding Nominal Value
- Dikurangi: bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi	(313.693)	(57.923)	- Less: Un-amortized discount (interest paid in advance)
	68.543.515	7.000.320	

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
b. SBSN yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali			b. SBSN sold under repurchase agreement
- Nilai Nominal <i>Outstanding Reverse Repo</i>	209.325	-	- Reverse Repo Outstanding Nominal Value
- Dikurangi: bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi	(412)	-	- Less: Un-amortized discount (interest paid in advance)
	208.913	-	
	68.752.428	7.000.320	

Jangka waktu transaksi *Reverse Repo* adalah satu hari sampai dengan satu tahun. Bank Indonesia membuka *window time* transaksi lelang *Reverse Repo* SBSN untuk pertama kalinya pada tanggal 7 Desember 2011. Transaksi ini diselenggarakan berdasarkan SE Nomor 13/27/DPM tanggal 1 Desember 2011 perihal Tata Cara Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga Syariah Negara dengan Bank Indonesia dalam rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah.

Reverse Repo transactions have a time limit of one day up to one year. Bank Indonesia opened the time window for SBSN reverse repo auction transactions for the first time on December 7, 2011. This transaction was conducted based on Circular Number 13/27/DPM, dated December 1, 2011, on procedures for reverse repo transactions with Bank Indonesia involving Sharia securities as part of Sharia open market operations.

26. Pinjaman dari Pemerintah

Pinjaman dari Pemerintah terdiri dari:

26. Loans from Government

Loans from Government consisted of:

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
- Dalam Rupiah	103.731	117.561	- In Rupiah
- Dalam valas	15.353	22.834	- In foreign currency
	119.084	140.395	

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Pinjaman dari Pemerintah dalam Rupiah antara lain terdiri dari penerimaan pinjaman Pemerintah dalam rangka program *Two Step Loan* (TSL), yaitu ASEAN Japan Development Fund for Indonesia (AJDF) untuk Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) sebesar Rp103.112 juta dan bunga sebesar Rp619 juta. Pinjaman dari Pemerintah dalam valas per 31 Desember 2011 adalah pinjaman dari Pemerintah dalam rangka TSL dari Asian Development Bank (ADB) sebesar USD1,693,080.00 atau setara dengan Rp15.353 juta. Pinjaman tersebut merupakan sisa dari pinjaman Bank Indonesia yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Loans from Government in Rupiah consisted of Government loans revenue due to Two Step Loans (TSL), i.e. ASEAN Japan Development Fund for Indonesia (AJDF) for Major Commercial Plantations (Perkebunan Besar Swasta Nasional - PBSN) program in the amount of IDR103,112 million and interest in the amount of IDR619 million. Loans from Government in foreign currency as at December 31, 2011 consisted of loans from Government due to Two Step Loans from the Asian Development Bank (ADB) amounting to USD1,693,080.00 or the equivalent of IDR15,353 million. The said amount represents the outstanding balance on a loan obtained by Bank Indonesia based on Act Number 13 of 1968 on the Central Bank.

27. Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman Luar Negeri terdiri dari:

27. Foreign Borrowings

Foreign borrowings consisted of:

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
a. Pinjaman sindikasi dari bank luar negeri	4.445.423	5.182.599	a. Syndicated loans from foreign banks
b. Pinjaman non sindikasi dari bank luar negeri	29.365	32.350	b. Non-syndicated loans from foreign banks
c. Bunga yang masih harus dibayar	2.815	2.903	c. Deferred interest payable
	4.477.603	5.217.852	

Pinjaman Luar Negeri tersebut merupakan sisa dari pinjaman Bank Indonesia yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, yaitu:

The above amounts represent the outstanding balances on loans obtained by Bank Indonesia based on Act Number 13 of 1968 on the Central Bank, namely:

a. Pinjaman Sindikasi dari Bank Luar Negeri

Pinjaman Sindikasi dari bank luar negeri merupakan pinjaman sindikasi dari bank-bank

a. Syndicated Loans from Foreign Banks

Syndicated loans from foreign banks represent syndicated loans from international banks to Bank

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

internasional kepada Bank Indonesia atas nama Pemerintah yang digunakan untuk cadangan devisa nasional. Pinjaman Sindikasi terdiri dari:

Indonesia on behalf of the Government for monetary reserve purposes. Syndicated loans consisted of:

Uraian	31 Desember 2011 <i>December 31, 2011</i>	31 Desember 2010 <i>December 31, 2010</i>	Description
	Rp juta <i>IDR Millions</i>	Rp juta <i>IDR Millions</i>	
1) Pinjaman Sindikasi Tahun 1994	650.955	1.001.984	1) <i>Syndicated loan of 1994</i>
2) Pinjaman Sindikasi Tahun 1995	3.794.468	4.180.615	2) <i>Syndicated loan of 1995</i>
	4.445.423	5.182.599	

1) Pinjaman Sindikasi Tahun 1994

Merupakan pinjaman sindikasi dari kreditur luar negeri dengan Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Hongkong Branch yang bertindak sebagai *agent*, dengan jumlah pinjaman sebesar USD500,000,000.00. Pinjaman tersebut ditandatangani pada tanggal 28 Maret 1994.

Dalam kesepakatan *London Club II* telah dilakukan amandemen kedua tanggal 28 September 2000, yakni menjadwalkan ulang pinjaman pokok sebesar USD150,000,000.00 untuk periode pembayaran 28 Maret 2002 sampai dengan 28 Maret 2013. Tingkat bunga pinjaman yang diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar USD47,621,700.03 atau setara dengan Rp431.834 juta dan JPY1,875,988,168.00 atau setara dengan Rp219.121 juta.

1) Syndicated Loan of 1994

Represents a syndicated loan from foreign creditors with Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Hong Kong Branch as the agent, amounted to USD500,000,000.00, and was signed on March 28, 1994.

Under the London Club II agreement, the second amendment took place on September 28, 2000, i.e., to reschedule loan principal amounting to USD150,000,000.00 for the payment period of March 28, 2002 to March 28, 2013. The interest rates amended were LIBOR + 0.875% and TIBOR + 0.875%.

The balance as at December 31, 2011, amounted to USD47,621,700.30 or the equivalent of IDR431,834 million and JPY1,875,988,168.00 or the equivalent of IDR219,121 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

2) Pinjaman Sindikasi Tahun 1995

Merupakan pinjaman sindikasi dari kreditur luar negeri dengan The Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore *Branch* yang bertindak sebagai *agent*, dengan jumlah pinjaman sebesar USD500,000,000.00. Pinjaman tersebut ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1995.

Dalam kesepakatan *London Club III* telah dilakukan amandemen kedua tanggal 6 September 2002 yakni menjadwalkan ulang pokok pinjaman sebesar USD300,000,000.00 untuk periode pembayaran 14 Desember 2008 sampai dengan 14 Desember 2019. Tingkat bunga pinjaman yang diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar USD310,886,400.00 atau setara dengan Rp2.819.118 juta dan JPY8,350,368,596.00 atau setara dengan Rp975.350 juta.

b. Pinjaman Non Sindikasi dari Bank di Luar Negeri

Pinjaman Non Sindikasi diberikan oleh International Cooperation and Development Fund (pengalihan dari The Export Import Bank of the Republic of China, Taipei) dengan plafon sebesar USD10,000,000.00 dan tingkat bunga 3,5% setahun. Pinjaman ini diangsur dalam 36 cicilan secara semesteran mulai tanggal 27 April 2003 dan akan berakhir pada tanggal 27 Oktober 2020.

Posisi pinjaman non sindikasi adalah sebesar USD3,238,287.48 atau setara dengan Rp29.365 juta per 31 Desember 2011, dan sebesar

2) Syndicated Loan of 1995

Represents a syndicated loan from foreign banks with The Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore Branch as the agent, amounted to USD500,000,000.00, and was signed on June 14, 1995.

Under the London Club III Agreement, the second amendment took place on September 6, 2002, i.e., to reschedule loan principal amounting to USD300,000,000.00 for payment period of December 14, 2008, to December 14, 2019. The interest rates amended were LIBOR + 0.875% and TIBOR + 0.875%.

The balance as at December 31, 2011, amounted to USD310,886,400.00 or the equivalent of IDR2,819,118 million and JPY 8,350,368,596.00 or the equivalent of IDR975,350 million.

b. Non-Syndicated Loans from Foreign Banks

The non-syndicated loan was provided by the International Cooperation and Development Fund (was The Export Import Bank of the Republic of China - Taipei) with the ceiling amounting to USD10,000,000.00 and an interest rate of 3.5% per annum. The loan is to be repaid in 36 semiannual installments, starting on April 27, 2003, with the final installment due on October 27, 2020.

The balance for non-syndicated loans amounted to USD3,238,287.48 or the equivalent of IDR29,365 million as per December 31, 2011,

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

USD3,598,097.20 atau setara dengan Rp32.350 juta per 31 Desember 2010. Bank Indonesia telah menyalurkan kembali kepada Bank Bukopin sebesar Rp20.457 juta.

28. Alokasi Hak Tarik Khusus

IMF mempunyai kewenangan mengalokasikan Hak Tarik Khusus atau SDR (*Article XV Section 1 dan Article XVIII*) untuk menambah likuiditas global jika dibutuhkan dan untuk menambah cadangan devisa negara-negara anggota dengan biaya relatif murah. Keputusan Alokasi SDR tersebut memerlukan dukungan 85% hak suara negara anggota IMF. Tidak seperti halnya fasilitas pinjaman IMF pada umumnya, Alokasi SDR tidak mengandung *conditionality*. Besaran suku bunga Alokasi SDR sama dengan suku bunga Hak Tarik Khusus, sehingga negara anggota akan memperoleh pendapatan bunga bila saldo Hak Tarik Khusus lebih besar dibandingkan dengan Alokasi SDR, dan sebaliknya negara anggota akan membayar bunga bila saldo Hak Tarik Khusus lebih kecil dibandingkan dengan Alokasi SDR. Atas pengelolaan SDR tersebut, IMF mengenakan biaya administrasi yang besarnya kurang dari 0,01% per tahun.

Sejak diciptakannya SDR pada tahun 1969, IMF telah tiga kali memberikan Alokasi Umum SDR kepada negara anggota yaitu: 1) Alokasi SDR yang disampaikan secara bertahap pada periode tahun 1970 – 1972; 2) Alokasi SDR yang disampaikan secara bertahap pada periode tahun 1979 – 1981; dan 3) Alokasi SDR yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2009. Di samping Alokasi Umum SDR, IMF juga telah memberikan Alokasi Khusus SDR yang dilakukan satu kali pada tahun 1997, namun baru dialokasikan kepada negara anggota pada tanggal 9 September 2009 karena persetujuan 85% hak suara negara anggota baru diperoleh pada bulan Agustus 2009. Alokasi khusus ini dilakukan untuk

*Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011*

and USD3,598,097.20 or the equivalent of IDR32,350 million as at December 31, 2010. Bank Indonesia has channeled back IDR20,457 million to Bank Bukopin.

28. Allocation of Special Drawing Rights

The IMF has the authority to allocate SDR (Article XV Section 1 and Article XVIII) to add global liquidity if needed and augment the foreign reserves of member countries at minimum cost. A decision to allocate SDRs needs the voting support of 85% of IMF member countries. SDR allocations are not subject to conditionality. The interest on SDR allocations is the same as the interest on Special Drawing Rights so that member countries will get interest income of their SDR balance is bigger than their SDR Allocation. On the other hand, members will have to pay interest when their SDR balance is smaller than their SDR Allocation. The IMF charges an administration fee of less than 0.01% annually to manage SDRs.

Since the inception of SDRs in 1969, the IMF has allotted SDR General Allocations to member countries three time: 1) SDR Allocations allotted in several phases during the period 1970 – 1972; 2) SDR Allocations allotted in several phases during the period 1979 – 1981; and 3) the SDR Allocations allotted on August 28, 2009. Other than General SDR Allocations, the IMF also added Special SDR Allocations once in 1997, but these were only allotted to member countries on September 9, 2009 after it was approved by 85% of the voting rights of IMF member countries in August 2009. This special allotment was intended to provide SDR allocations to countries that joined the IMF after

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

memberikan alokasi SDR kepada negara-negara anggota yang bergabung dengan IMF setelah alokasi umum tahun 1981 dan untuk menyeimbangkan alokasi negara-negara anggota lainnya sejalan dengan perkembangan ekonominya.

Berdasarkan surat IMF tanggal 3 September 2009, pencatatan Alokasi SDR diklasifikasikan sebagai *other debt liabilities* dalam kelompok *long-term liabilities* sesuai *Balance of Payment Manual 6 (BPM6)*. Klasifikasi ini sesuai dengan karakteristik Alokasi SDR yang memiliki jangka waktu panjang sehingga dikategorikan sebagai utang jangka panjang.

Saldo Alokasi Hak Tarik Khusus per 31 Desember 2011 sebesar SDR1,980,435,720.00 atau setara dengan Rp27.483.875 juta dan per 31 Desember 2010 sebesar SDR1,980,435,720.00 atau setara dengan Rp27.421.967 juta.

29. Kewajiban Lain-Lain

Kewajiban Lain-Lain per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 terdiri dari:

the general allocation of 1981, and to bring the allocations of other countries into line with their economic growth.

Based on the IMF letter dated September 3, 2009, SDR Allocations are classified as other debt liabilities in the long-term liabilities section according to the guidance in The Balance of Payment Manual 6 (BPM6). This classification is in accordance with the characteristics of SDR Allocations, which are long term and categorized as long-term liabilities.

The Special Drawing Rights Allocation balance per December 31, 2011, stood at SDR1,980,435,720.000, or the equivalent of IDR27,483,875 million, and per December 31, 2010 at SDR 1,980,435,720, or the equivalent of IDR27,421,967 million.

29. Other Liabilities

Other Liabilities as at December 31, 2011 and December 31, 2010 consisted of:

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
- Cash Collateral	16.841.761	19.683.577	- Cash Collateral
- Setoran jaminan pembukaan L/C dalam valas	17.501	601.981	- Collateral for opening L/C in foreign currency
- Kewajiban Imbalan Kerja	2.085.926	1.790.777	- Employee Benefits Liabilities
- Utang pajak	123.323	23.448	- Tax Payables
- Lainnya	2.693.751	1.146.262	- Other
	21.762.262	23.246.045	

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

a. Cash Collateral

Cash collateral merupakan jaminan yang diterima oleh Bank Indonesia atas transaksi peminjaman SSB milik Bank Indonesia (*Third Party Securities Lending*) kepada pihak ketiga (*borrower*) melalui *securities lending agent*. Selanjutnya *cash collateral* di-reinvestasikan sebagaimana dijelaskan pada Catatan C.7 dan Catatan C.14.

b. Kewajiban Imbalan Kerja

Bank Indonesia menyelenggarakan program imbalan kerja yang terdiri dari imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya dilakukan oleh aktuaris independen pada posisi 31 Desember 2011 dengan tingkat diskonto sebesar 7,25% untuk Manfaat Pensiun serta 6,5% untuk Tunjangan Hari Tua (THT), Imbalan Pasca Kerja, dan Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya.

Kewajiban Imbalan Pasca Kerja terdiri dari program pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh DAPENBI, Tunjangan Hari Tua (THT) Baperum yang dikelola oleh YKKBI, dan kewajiban imbalan pasca kerja tanpa pendanaan antara lain berupa Uang Perpisahan Pegawai. Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya antara lain berupa Uang Cuti Besar dan Uang Penghargaan Pengabdian.

Kewajiban imbalan kerja THT telah disesuaikan dengan komposisi kekayaan pendanaan Baperum sebesar 32,5% dari kekayaan pendanaan YKKBI sesuai dengan keputusan rapat pembina YKKBI tanggal 25 April 2011 – lihat Catatan D.3.

Mutasi aktiva, kewajiban, dan beban imbalan kerja pada periode Januari sampai dengan Desember 2011 adalah sebagai berikut:

a. Cash Collateral

Cash collateral is collateral received by Bank Indonesia in respect of third party securities lending to borrowers through securities lending agents. Such cash collateral is then reinvested, as explained in Notes C.7 and C.14.

b. Employee Benefits

Bank Indonesia provides post and long-term employment benefit program. The actuarial calculation on post and long-term employment benefit program was performed by an independent actuary for the position as per December 31, 2011 with a discount rate of 7.25% for pension benefits and 6.5% for Retirement Benefits (Tunjangan Hari Tua - THT), Post and Long-Term Employment Benefits.

The post employment programs consist of a defined benefit pension plan managed by DAPENBI, Retirement Benefit Program (Tunjangan Hari Tua - BKP and Baperum) managed by YKKBI, and other post employment benefits programs without funding, which consist of Employee Farewell Paid Leave. Other long-term benefits include Extended Leave and Long Service Payments.

THT obligations have been adjusted in accordance with the Baperum funding composition in the amount of 32.5% of the funding assets of the YKKBI based on the decision of the YKKBI Trustees' meeting of 25 April 2011 – see Note D.3.

Changes in employee benefit assets, liabilities and expenses for the period of January to December 2011 were as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Uraian	Manfaat Pensiun	Tunjangan Hari Tua	Imbalan Pasca Kerja	Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	Pajak untuk Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	Jumlah	Description
	<i>Pension Benefits</i>	<i>Retirement Benefit Program</i>	<i>Other Post Employment Benefits</i>	<i>Other Long-Term Benefits</i>	<i>Tax</i>	<i>Total</i>	
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2010	(394.051)	46.206	(309.644)	(970.798)	(162.490)	(1.790.777)	<i>Assets/(Liabilities) Balance as at Dec 31, 2010</i>
Beban Imbalan Kerja	(138.649)	(120.025)	(56.221)	(398.905)	(56.143)	(769.943)	<i>Employee Benefit Expenses</i>
Kontribusi Bank Indonesia	112.587	120.025	0	0	0	232.612	<i>Bank Indonesia's contribution</i>
Pembayaran Manfaat	0	0	29.071	176.693	36.418	242.182	<i>Benefit payments</i>
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2011	(420.113)	46.206	(336.794)	(1.193.010)	(182.215)	(2.085.926)	<i>Assets/(Liabilities) balance as at December 31, 2011</i>

Adapun total kewajiban imbalan kerja manfaat pensiun, THT, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pajak untuk imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp2.085.926 juta. Kewajiban Imbalan Kerja THT telah disesuaikan dengan komposisi kekayaan pendanaan Baperum sesuai dengan keputusan rapat Pembina YKKBI tanggal 25 April 2011 – lihat Catatan D.3.

Pada posisi 31 Desember 2011, pendanaan DAPENBI berasal dari iuran pegawai dan pemberi kerja masing-masing sebesar 7% dan 13,3%

Total Employee Benefits liabilities for pension benefits, Other Post Employment Benefits, Tax and Other Long-Term Benefits as at December 31, 2011 amounted to IDR2,085,926 million. The balance of THT has been adjusted in accordance with the Baperum funding composition based on the decision of the meeting of the YKKBI Trustees on April 25, 2011 - see note D.3.

As at December 31, 2011, DAPENBI's funding was derived from employee and Bank Indonesia contributions amounting to 7% and 13.3%

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

dari penghasilan dasar pensiun. Berdasarkan laporan Aktuaris Berkala DAPENBI oleh aktuaris independen, pada posisi 31 Desember 2011 DAPENBI berada pada kondisi Kualitas Pendanaan tingkat II, sehingga Bank Indonesia memberikan iuran tambahan sebesar Rp4.473 juta per bulan yang dibayarkan selama 24 bulan atau sampai dengan rasio pendanaan DAPENBI mencapai 100%.

Pada posisi 31 Desember 2011, iuran THT dari Bank Indonesia kepada YKKBI adalah sebesar 20% dari gaji pokok pegawai dengan memperhatikan indeks kota.

c. Utang Pajak

Saldo utang pajak per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp123.323 juta dan Rp23.448 juta. Penjelasan lebih rinci mengenai utang pajak dijelaskan dalam Catatan C.30.

d. Lainnya

Bagian terbesar dari kewajiban lainnya adalah pembayaran kumulatif *Domestic Market Obligation* (DMO) fee Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas dan PT Pertamina (Persero) sebesar Rp2.527.631 juta, yang masih harus diselesaikan oleh Bank Indonesia terkait dengan tugas Bank Indonesia sebagai kasir Pemerintah.

30. Perpajakan

a. Penerimaan (Beban) Pajak Penghasilan

Penerimaan (Beban) pajak penghasilan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

*Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011*

respectively, based on basic pension salary. According to the DAPENBI Periodic Actuary Statement from an Independent Actuary, as at December 31, 2011 DAPENBI was classified as having Funding Quality Second Grade, therefore Bank Indonesia paid an additional premium amounting to IDR4,473 million to DAPENBI for 24 months or until the funding ratio of DAPENBI reaches 100%.

As at December 31, 2011, YKKBI's premiums from Bank Indonesia amounted to 20% of basic salary having regard to the city index.

c. Taxes Payable

The balance of taxes payable as at December 31, 2011 and December 31, 2010 amounted to IDR123,323 million and IDR23,448 million respectively. Detailed explanations on taxes payable can be found in Note C.30.

d. Others

The biggest part of Other Liabilities consisted of the cumulative payment of domestic market obligation (DMO) fees to contract of work contractors (KKKS) in the oil and gas sector and PT Pertamina (Persero), which amounted to IDR2,527,631 million and still must be settled by Bank Indonesia in connection with Bank Indonesia's duties as the Government cashier.

30. Taxation

a. Income Tax Revenues (Expenses)

Income tax revenues (expenses) for the periods of January 1 to December 31, 2011 and 2010 were as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Uraian	Jan – Des 2011 Jan – Dec 2011	Jan – Des 2010 Jan – Dec 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
- Pajak Kini	0	0	- Current Tax
- Pajak Tangguhan	64.291	6.823.268	- Deferred Tax
Jumlah Penerimaan (Beban) Pajak Tangguhan	64.291	6.823.268	Total Deferred Tax Income (Expenses)

b. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi antara Surplus (Defisit) sebelum pajak penghasilan yang ditunjukkan dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Penerimaan (Beban) pajak penghasilan:

b. Reconciliation

The reconciliation between the surplus (deficit) before income tax shown in the financial statements and the income tax revenues (expenses) account is as follows:

Uraian	Jan – Des 2011 Jan – Dec 2011	Jan – Des 2010 Jan – Dec 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
Surplus (defisit) sebelum pajak penghasilan	(25.213.004)	(27.982.456)	Surplus (deficit) before income tax
Koreksi Fiskal Positif			Positive Fiscal Correction
Beda Tetap:			Permanent Differences:
1) Natura dan Kenikmatan	551.916	535.574	1) Benefits
2) Bantuan atau Sumbangan	47.958	26.952	2) Grants and Assistance
3) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	24.201	28.536	3) Fixed Asset and Inventory Depreciation
4) Lainnya	124.064	100.485	4) Others
Jumlah	748.139	691.547	Total
Beda Waktu:			Temporal Differences:
1) Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	704.404	738.509	1) Post Employment and Other Long-Term Employment Benefits
2) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	2.159	49.892	2) Fixed Asset and Inventory Depreciation
Jumlah	706.563	788.401	Total

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Uraian	Jan – Des 2011	Jan – Des 2010	Description
	Jan – Dec 2011	Jan – Dec 2010	
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
Koreksi Fiskal Negatif			Negative Fiscal Correction
Beda Tetap:	(3.102)	(2.162)	Permanent Differences:
	(3.102)	(2.162)	
Beda Waktu:			Temporary Differences:
1) Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	(433.566)	(420.971)	1) Post Employment and Other Long-Term Employment Benefits
2) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	(15.832)	(5.359)	2) Fixed Asset and Inventory Depreciation
	(449.398)	(426.330)	
Selisih Lebih Hasil Revaluasi Aktiva Tetap	9.266.042	0	Difference after Revaluation of Fixed Assets
Surplus (Defisit) Kena Pajak	(14.944.760)	(26.931.000)	Taxable Surplus (Deficit)
Perhitungan Pajak Terutang			Calculation of Current Tax
25% x Rp0	0	0	25% x Rp0
Jumlah Pajak Terutang	0	0	Current Tax
Kredit Pajak:			Tax Credit:
Angsuran PPh pasal 22	0	19.431	Article 22 Income Tax installments
Angsuran PPh pasal 25	0	0	Article 25 Income Tax Installments
PPh Badan Lebih (Kurang) Bayar	0	19.431	Income Tax Payable

c. Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan

Posisi Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 merupakan pengaruh beda waktu dengan rincian sebagai berikut:

c. Deferred Tax Assets (Liabilities)

The position for deferred tax assets (liabilities) as at December 31, 2011 and December 31, 2010 was the result of time differences as shown below:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
1) Imbalan Pasca Kerja	23.393	18.058	1) Post Employment Benefits
2) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	221.382	121.882	2) Other Long Term Employment Benefits
3) Imbalan Pasca Kerja Manfaat Pensiun	26.063	(11.046)	3) Post Employment Benefits – Pension
4) Tunjangan Hari Tua	0	188.644	4) Retirement Benefits
5) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	(13.673)	44.533	5) Fixed Assets and Inventory Depreciation
Jumlah Koreksi Fiskal Beda Waktu	257.165	362.071	Total Temporary Differences Fiscal Correction
Rugi Fiskal	14.944.760	26.931.000	Fiscal Loss
Jumlah	15.201.925	27.293.071	Total
Aktiva (kewajiban) Pajak Tangguhan tahun berjalan	64.291	6.823.268	Deferred tax assets (liabilities) in current year
Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan tahun sebelumnya	6.950.398	127.130	Deferred tax assets (liabilities) in previous year
Saldo Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan	7.014.689	6.950.398	Deferred tax assets (liabilities) Balance

Bank Indonesia pada tahun 2011 mengalami defisit fiskal, sehingga PPh terutang nihil.

Aktiva Pajak Tangguhan tahun 2010 sebesar Rp6.823.268 juta memperhitungkan defisit fiskal dan perbedaan temporer yaitu masing-masing 25% x rugi fiskal sebesar Rp26.931.000 juta dan 25% x perbedaan temporer (beda waktu) sebesar Rp362.071 juta. Aktiva Pajak Tangguhan tahun 2011 sebesar Rp64.291 juta hanya memperhitungkan perbedaan temporer yaitu 25% x perbedaan temporer sebesar Rp257.165 juta, dengan pertimbangan aktiva pajak tangguhan sudah memadai untuk dikompensasi dengan surplus fiskal pada masa mendatang – lihat Catatan C.14.d.

As Bank Indonesia incurred a fiscal deficit in 2011, the taxes payable balance was zero.

Deferred Tax Assets in 2010 of IDR6,823,268 million also included the fiscal deficit and time differences, namely 25% x fiscal loss of IDR26,931,000 million and 25% x time difference amounting to IDR362,071 million, respectively. Deferred Tax Assets for 2011 of IDR64,291 million only included time differences, namely, 25% x time difference amounting to IDR257,165 million, based on the consideration that deferred tax assets were already sufficient to compensate for fiscal surpluses in the future – see Note C.14.d.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

d. Utang Pajak

d. Tax Liabilities

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
PPh Pasal 25/29	0	0	Article 25/29
Pasal 21	16.851	19.547	Article 21
Pasal 22	24	958	Article 22
Pasal 23	1.309	967	Article 23
Pasal 26	218	93	Article 26
Pasal 4 ayat 2	25.415	1.850	Article 4 (2)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	79.506	33	Value Added Tax (VAT)
Jumlah	123.323	23.448	Total

Bank Indonesia telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00167/WJP.07/KP.103/2006 tanggal 1 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP BUMN).

Bank Indonesia has been registered as a Taxable Enterprise based on the Taxable Enterprise Registration Registration Certificate Number PEM-00167/WJP.07/KP.103/2006 dated December 1, 2006, which was issued by the Tax Office for State-Owned Enterprises (KPP BUMN).

Bank Indonesia melaksanakan kewajiban sebagai PKP mulai Januari 2012. Untuk kewajiban sebagai PKP dari periode Desember 2006 s.d Desember 2011, Bank Indonesia telah melakukan *self assessment* utang PPN yaitu sebesar Rp79.379 juta, belum termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan denda - lihat Catatan E.9.

Bank Indonesia will fulfill its obligations as a Taxable Enterprise commencing January 2012. As regards its obligations as a Taxable Enterprise from December 2006 to December 2011, Bank Indonesia has conducted a self-assessment of VAT liabilities and determined these to be IDR79,379 million, not including administrative sanctions in the form of interest and penalties – see Note E.9.

31. Modal

Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-

31. Capital

Based on the Bank Indonesia Act, the capital of Bank Indonesia shall be at least IDR2,000,000,000,000

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). Modal ini harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum atau hasil revaluasi aset. Modal pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp16.876.926 juta dan Rp7.610.885 juta. Dalam modal per 31 Desember 2011 sudah termasuk penambahan berupa selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp9.266.042 juta – lihat Catatan C.14.

32. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan

Dalam Pasal 62 Undang-Undang Bank Indonesia diatur bahwa surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:

- a. 30% untuk Cadangan Tujuan; dan
- b. Sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Selanjutnya dalam Pasal II angka 3 diatur bahwa selama penyelesaian BLBI belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10%.

Pada penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Bank Indonesia disebutkan pula bahwa Cadangan Tujuan digunakan antara lain untuk biaya penggantian dan/atau pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia, serta penyertaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penggunaan Cadangan Tujuan periode Januari sampai dengan Desember 2011 adalah sebesar Rp464.422 juta dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembaruan/penggantian harta tetap sebesar Rp393.901 juta.

(two trillion Rupiah). This capital must be increased to up to 10% (ten percent) of total monetary liabilities, with funds to be derived from general reserves or asset revaluation reserves. The capital of Bank Indonesia as at December 31, 2011 and December 31, 2010 was IDR16,876,926 million and IDR7,610,885 million respectively. Bank Indonesia's capital as at December 31, 2011 included an increase of IDR9,266,042 million the surplus arising from the revaluation of fixed assets – see Note C.14.

32. General and Statutory Reserves

According to Article 62 of the Bank Indonesia Act 6 of 2009, a surplus arising from Bank Indonesia's operations shall be distributed as follows:

- a. 30% for the Statutory Reserves;
- b. The remainder to be reinvested as General Reserves so that the sum of capital and General Reserves becomes 10% of the monetary liabilities as referred to in Article 6 (2).

Furthermore, as stated in Article II Number 3, as long as the settlement of BLBI has not been completed, Statutory Reserves shall be set at 10%.

According to the elucidation on Article 62 of the Bank Indonesia Act, Statutory Reserves are to be used for, among other things, financing the replacement and or renewal of fixed assets, the procurement of equipment, and organizational and human resources development as part of the implementation of the duties and powers of Bank Indonesia, as well as the investments needed to implement the duties of Bank Indonesia. The Statutory Reserves utilized in the period of January up to December 2011 amounted to IDR464,422 million, with the details being as follows:

- a. Replacement/renewal of fixed assets amounting to IDR393,901 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements As at December 31, 2011

- b. Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp25.181 juta.
- c. Penyertaan sebesar Rp45.340 juta.

- b. Organizational and human resources development amounting to IDR25,181 million.
- c. Equity protections amounting to IDR45,340 million.

Posisi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan pada tanggal 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp41.555.776 juta dan Rp13.906.146 juta.

The balances of General Reserves and Statutory Reserves as at December 31, 2011, amounted to IDR41,555,776 million and IDR13,906,146 million.

33. Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi

Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi per tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp42.382.140 juta dan Rp5.725.994 juta yang terdiri atas:

33. Unrealized Gains/Losses

The balances of Unrealized Gains/Losses as at December 31, 2011 and December 31, 2010 amounted to IDR42,382,140 million and IDR5,725,994 million respectively, with the details being as follows:

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
- Revaluasi harga emas	32.667.619	28.917.019	- Revaluation of gold price
- Revaluasi SSB dalam valas	18.516.019	5.014.268	- Revaluation of marketable securities in foreign currency
- Revaluasi SSB dalam Rupiah	8.727.030	2.749.708	- Revaluation of marketable securities in Rupiah
- Selisih kurs valas	(17.528.528)	(30.955.001)	- Differences in foreign exchange rate
	42.382.140	5.725.994	

Peningkatan keuntungan yang belum direalisasi dari Rp5.725.994 juta menjadi Rp42.382.140 juta karena kenaikan harga pasar emas, kenaikan harga pasar SSB dalam valas, dan kenaikan selisih kurs valas akibat melemahnya nilai tukar rupiah terutama terhadap valas EUR, USD, dan XAU.

The increase in unrealized gains from IDR5,725,994 million to IDR42,382,140 million was due to an increase in the market price of gold, an increase in the market price of foreign currency marketable securities and an increase in the exchange rate differential as a result of Rupiah weakness against the EUR, USD and XAU.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

34. Penerimaan Pengelolaan Devisa

Penerimaan dari Pengelolaan Devisa pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 terdiri atas:

34. Revenues from Foreign Reserves Management

Revenues from foreign reserves management for the periods of January 1 to December 31, 2011 and 2010 consisted of:

Uraian	Jan – Des 2011 Jan – Dec 2011	Jan – Des 2010 Jan – Dec 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
- Bunga sektor valas	16.855.434	13.512.496	- Interest in foreign exchange sector
- Provisi sektor valas	142.235	1.762	- Provisions in foreign exchange sector
- Penerimaan valas lainnya	6.423.676	4.455.695	- Other foreign exchange revenues
	23.421.345	17.969.953	

Penerimaan valas lainnya tahun 2011 terutama berasal dari keuntungan SSB sebesar Rp6.320.522 juta.

Other foreign exchange revenues in 2011 primarily consisted of securities capital gains amounting to IDR6,320,522 million.

35. Penerimaan Pengelolaan SSB dalam Negeri

Penerimaan dari Pengelolaan SSB Dalam Negeri pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp3.756.152 juta dan Rp2.726.377 juta.

35. Revenues from Domestic Securities

Revenues from Domestic Securities for the periods January 1 to December 31, 2011 and January 1 to December 31, 2010 amounted to IDR3,756,152 million and IDR2,726,377 million respectively.

36. Penerimaan Pemberian Kredit dan Pembiayaan

Penerimaan dari Pemberian Kredit dan Pembiayaan pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp515.888 juta dan Rp283.870 juta. Penerimaan sebagian besar berasal dari bunga Surat Berharga yang dikeluarkan Pemerintah sebesar Rp246.562 juta.

36. Revenues from Credit and Financing

Revenues from credit and financing for the period of January 1 to December 31, 2011 and 2010 amounted to IDR515,888 million and IDR283,870 million respectively. Included in that amount were accrued revenues from Government Bond interest, amounting to IDR246,562 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

37. Selisih Kurs karena Transaksi Valas

Selisih kurs karena transaksi valas pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar negatif Rp11.693.801 juta dan negatif Rp16.435.753 juta.

Penurunan kerugian selisih kurs dari Rp16.435.753 juta menjadi Rp11.693.801 juta karena melemahnya nilai tukar rupiah terutama terhadap valuta EUR, USD, dan XAU.

38. Penerimaan Pengelolaan Sistem Pembayaran

Penerimaan dari Pengelolaan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp223.897 juta dan Rp201.130 juta. Penerimaan dari Pengelolaan Sistem Pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 berasal dari Jasa Penyelenggaraan Transfer sebesar Rp223.882 juta dan Jasa Pengelolaan Rekening sebesar Rp15 juta.

39. Penerimaan Pengawasan Perbankan

Penerimaan dari Pengawasan Perbankan pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp17.467 juta dan Rp28.422 juta.

40. Penerimaan Lainnya

Penerimaan Lainnya pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp1.108.197 juta dan Rp1.277.911 juta.

Dalam penerimaan lainnya tahun 2011, termasuk di dalamnya keuntungan uang kertas/uang logam yang ditarik dari peredaran sebesar Rp840.074 juta.

37. Exchange Differences

The value of Exchange Differences for the period of January 1 to December 31, 2011, and January 1 to December 31, 2010 amounted to negative IDR11,693,801 million and negative IDR16,435,753 million respectively.

The Decrease in the loss on Exchange Differences from IDR16,435,753 million to IDR11,693,801 million was due to a weakening in the Rupiah, particularly against EUR, USD and XAU.

38. Revenues from Payment System Services

Revenues from payment system services for the periods of January 1 to December 31, 2011 and 2010 amounted to IDR223,897 million and IDR201,130 million respectively. Revenues from payment system services for the period of January 1 to December 31, 2011 were derived from transfer service fees of IDR223,882 million and account administration fees of IDR15 million.

39. Revenues from Banking Supervision

Revenues of Banking Supervision for the periods from January 1 to December 31, 2011, and January 1 to December 31, 2010, amounted respectively to IDR17,467 million and IDR28,422 million.

40. Other Revenues

Other Revenues for the periods from January 1 to December 31, 2011, and January 1 to December 31, 2010, amounted respectively to IDR1,108,197 million and IDR1,277,911 million.

Other Revenues in 2011 included gains from the withdrawal of banknotes/coins in the amount of IDR840,074 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

41. Beban Operasi Pasar Terbuka

Beban Operasi Pasar Terbuka terdiri atas:

Uraian	Jan – Des 2011 Jan – Dec 2011	Jan – Des 2010 Jan – Dec 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
- Pengembangan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Uang Beredar	30.074.985	24.163.726	- Policy Development, Endorsement and Execution for Base Money
- Penelitian Uang Beredar	17.030	13.075	- Research on Base Money
	30.092.015	24.176.801	

Beban Operasi Pasar Terbuka merupakan bagian pengeluaran terbesar Bank Indonesia periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp30.092.015 juta (70,70%) dari total beban dan Rp24.176.801 juta (71,04%) dari total beban.

Termasuk dalam Pengembangan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan Uang Beredar adalah Biaya Diskonto untuk SBI, Penempatan Dana, Penempatan Berjangka, dan Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali - SUN sebesar Rp28.521.353 juta, beban imbalan untuk SBIS dan FASBIS sebesar Rp478.309 juta, serta beban jasa giro atas pemenuhan GWM dalam Rupiah sebesar Rp1.047.260 juta.

42. Beban Pengelolaan Devisa

Beban Pengelolaan Devisa pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp67.827 juta dan Rp38.787 juta.

43. Beban Pinjaman Luar Negeri

Beban Pinjaman Luar Negeri pada periode 1 Januari

41. Open Market Operations Expenses

Open Market Operations Expenses consisted of:

Open market operations expenses was Bank Indonesia's largest expense during the periods of January 1 to December 31, 2011 and 2010, amounting to IDR30,092,015 million (70.70%) of total expenses, and to IDR24,176,801 million (71.04%) of total expenses, respectively.

Included in Policy Execution Expenses were SBI discounts, Term Deposit discounts, Deposit Facilities discount, Term Deposit discounts and Reverse Repo Transaction - SUN discounts amounting to IDR28,521,353 million, SBIS and FASBIS Bonus expenses amounting to IDR478,309 million, and GWM interest expenses in rupiah amounting to IDR1,047,260 million.

42. Foreign Reserves Management Expenses

Foreign Reserves Management Expenses for the periods from January 1 to December 31, 2011, and January 1 to December 31, 2010, amounted respectively to IDR67,827 million and IDR38,787 million.

43. Foreign Loans Management Expenses

Foreign Loans Management Expenses for the periods

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp178.422 juta dan Rp158.643 juta.

from January 1 to December 31, 2011, and January 1 to December 31, 2010, amounted respectively to IDR178,422 million and IDR158,643 million.

44. Beban Jasa Giro Pemerintah

Beban Jasa Giro Pemerintah pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp4.666.712 juta dan Rp2.434.310 juta. Jasa Giro diberikan atas Giro Pemerintah yang berupa Rekening Kas Umum Negara dan Rekening Penempatan. Peningkatan jasa giro terjadi karena meningkatnya rata-rata bulanan volume giro Pemerintah di Bank Indonesia dari Rp145.059.896 juta pada tahun 2010 menjadi Rp203.678.537 juta pada tahun 2011 atau meningkat 40,41%.

44. Government Account Interest Expenses

Government Account Interest Expenses for the periods of January 1 to December 31, 2011 and 2010 amounted to IDR4,666,712 million and IDR2,434,310 million respectively. Such interest was attributed to General State Cash Account and Placement Accounts. An increase in account services occurred because of the increase in the average monthly volume of government giro transactions from IDR145,059,896 million in 2010 to IDR203,678,537 million in 2011, which represents an increase of 40.41%.

45. Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp2.010.016 juta dan Rp2.703.376 juta. Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran tahun 2011 antara lain terdiri dari Beban Pelaksanaan Pengadaan Bahan Uang sebesar Rp617.607 juta dan Pelaksanaan Pencetakan Uang sebesar Rp1.259.573 juta. Dalam beban pelaksanaan pencetakan uang sebesar Rp1.259.573 juta terdapat pembayaran biaya cetak kepada Perum Peruri sebesar Rp1.252.887 juta yang terdiri dari pembayaran atas pencetakan uang tahun 2011 sebesar Rp1.052.139 juta dan pembayaran atas pencetakan uang tahun 2010 (carry over) sebesar Rp200.748 juta. Biaya cetak kepada Perum Peruri sebesar Rp1.252.887 juta sudah memperhitungkan kelebihan pembayaran untuk pencetakan uang tahun 2010 sebesar Rp104.520 juta dan kekurangan pembayaran untuk pencetakan uang tahun 2011 sebesar Rp42.706 juta – lihat Catatan C.12.

45. Payment System Operating Expenses

Payment system services expenses for the periods of January 1 up to December 31, 2011 and 2010 amounted to IDR2,010,016 million and IDR2,703,376 million respectively. Payment system services expenses for 2011 included currency procurement expenses amounting to IDR617,607 million, and currency printing expenses of IDR1,259,573 million which included a payment for currency printing to Perum Peruri of IDR1,252,887 million which consisted of payment for currency printing in 2011 in the amount of IDR1,052,139 million and payment for 2010 (carry over) in the amount of IDR200,748 million. The cost of printing at Perum Peruri (IDR1,252,887 million) also takes account of overpayment for printing services in 2010 of IDR104,520 million and underpayment in 2011 of IDR42,706 million – see Note C.12.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

46. Beban Pengaturan dan Pengawasan Perbankan

Beban Pengaturan dan Pengawasan Perbankan pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp174.917 juta dan Rp149.878 juta.

46. Banking Regulation and Supervision Expenses

Banking Regulation and Supervision Expenses for the periods of January 1 up to December 31, 2011 and 2010 amounted to IDR174,917 million and IDR149,878 million respectively.

47. Beban Umum dan Lainnya

Pos Beban Umum dan Lainnya pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 terdiri atas:

47. General and Other Expenses

General and Other Expenses for the periods of January 1 to December 31, 2011 and 2010 consisted of:

Uraian	Jan – Des 2011 Jan – Dec 2011	Jan – Des 2010 Jan – Dec 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
- Sumber Daya Manusia	3.401.743	3.245.503	- Human resources
- Logistik dan Pengamanan	878.532	783.025	- Logistics and security
- Sistem Teknologi Informasi	14.564	37.819	- IT system
- Lainnya	1.058.056	278.088	- Other
	5.352.895	4.344.435	

Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur ditetapkan paling banyak dua kali gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia.

Under the Bank Indonesia Act, the salary, other income and facilities of the Governor, Senior Deputy Governor and Deputy Governors shall be prescribed by the Board of Governors. The amount of such salary and other income of the Governor shall be determined at a maximum of two times the salary and other income of an employee of the highest grade in Bank Indonesia.

Dalam beban SDM termasuk juga imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp769.943 juta sebagaimana dijelaskan

Included in Human Resources expenses were post employment and other long-term employment expenses for the period from January 1 to December 31, 2011, amounting to IDR769,943 million as

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

dalam pos Kewajiban Lain-lain, serta gaji, insentif, tunjangan hari raya keagamaan, dan uang cuti tahunan bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp17.184 juta dan Rp16.862 juta.

Di dalam beban SDM tersebut, termasuk juga Tunjangan Hari Tua berupa Program Bantuan Pemilikan Rumah dan Program Jamsostek sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Dalam beban Logistik dan Pengamanan, sebesar Rp75.477 juta merupakan selisih kurang penilaian kembali (kerugian hasil revaluasi aktiva tetap) – lihat Catatan C.14.

48. Rasio Modal

Rasio Modal (Modal, Cadangan Umum dan Defisit tahun berjalan) terhadap Kewajiban Moneter per tanggal 31 Desember 2011 adalah 2,71%. Jumlah Modal dan Kewajiban Moneter yang diperhitungkan dalam perhitungan Rasio Modal per tanggal 31 Desember 2011 masing-masing adalah Rp33.283.989 juta dan Rp1.227.288.311 juta. Modal, Kewajiban Moneter, dan Rasio Modal per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

*Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011*

explained in the Other Liabilities item, as well as salaries, incentives, holiday bonuses (tunjangan hari raya), and annual leave payments to the Board of Governors for the period of January 1 to December 31, 2011 and 2010, which amounted to IDR17,184 million and IDR16,862 million, respectively.

Included in the Human Resources expenses were Bank Indonesia's membership expenses in the Housing Ownership program and Jamsostek program, which are compulsory under the Jamsostek Act (Number 3 of 1992), including accident insurance, life insurance and retirement insurance.

The Logistics and Security Expenses item included IDR75,477 million arising out of the difference from revaluation (loss on revaluation of fixed assets) – see Note C.14.

48. Capital Ratio

The ratio of Capital (Capital, General Reserves, and Current Year Deficit) to Monetary Liabilities as at December 31, 2011 was 2.71%. The Capital and Monetary Liabilities used in the Capital Ratio calculation at December 31, 2011 amounted to IDR33,283,989 million and IDR1,227,288,311 million, respectively. The Capital, Monetary Liabilities, and Capital Ratio as at December 31, 2011 were as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Millions	
a. Modal		a. Capital
- Modal	16.876.926	- Capital
- Cadangan Umum	41.555.776	- General Reserves
- 100% Defisit Tahun Berjalan (setelah pajak)	(25.148.713)	- 100% of Current Year Deficit (after tax)
Jumlah	33.283.989	Total
b. Kewajiban Moneter		b. Monetary Liabilities
- Uang dalam Peredaran	372.982.462	- Currency in Circulation
- Giro Pemerintah	90.371.330	- Government Demand Deposits
- Giro Bank	251.387.574	- Bank Demand Deposits
- Giro Lainnya (kecuali Giro IMF, Bank Dunia, dan ADB)	115.864	- Other demand deposits (excluding IMF, World Bank, and ADB demand deposits)
- Surat Berharga yang Diterbitkan (SBI, SBIS, Penempatan Berjangka, Penempatan Dana, FASBIS, Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali)	512.311.997	- Issued Securities (SBI, SBIS, Long Term Placements, Fund Placements, FASBIS, Securities Sold Under Repurchase Attorneys General)
- Pinjaman dari Pemerintah	119.084	- Loans from Government
Jumlah	1.227.288.311	Total
c. Rasio Modal		c. Capital Ratio
$\frac{\text{Modal} + \text{Cadangan Umum} + 100\% \text{ Defisit Tahun Berjalan}}{\text{Kewajiban Moneter}} =$	2,71%	$\frac{\text{Capital} + \text{General Reserves} + 100\% \text{ of Current Year Deficit}}{\text{Monetary Liabilities}}$

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements As at December 31, 2011

D. PENJELASAN LAINNYA

1. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

D. OTHERS

1. Related Party Transactions

Related party transactions consisted of:

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	31 Desember 2010 December 31, 2010	Description
	Rp juta IDR Millions	Rp juta IDR Millions	
- Tagihan pada Indover Bank	501.044	498.368	- Claims on Indover Bank
- Pinjaman karyawan	439.704	373.331	- Employee Loans
	940.748	871.699	

Tagihan pada Indover Bank per 31 Desember 2011 sebesar Rp501.044 juta sebagaimana dijelaskan pada C.14.

The claims on Indover Bank per December 31, 2011 stood at IDR501,044 million as explained in C.14.

Bank Indonesia memberikan pinjaman kepada karyawan berdasarkan PDG Nomor 4/9/PDG/2002 jo.PDG Nomor 8/12/PDG/2006 tentang Pinjaman Multiguna bagi Pegawai dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Bank Indonesia Indonesia provides loans to employees based on Board of Governors Decisions Number 4/9/PDG/2002 and Number 8/12/PDG/2006 on multipurpose loans to Bank Indonesia employees and members of the Board of Governors.

Di samping itu, terdapat tanah/bangunan yang digunakan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)/Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI)/Persatuan Pensiunan Bank Indonesia (PPBI)/Yayasan Perguruan KORPRI Unit Bank Indonesia (YASPORBI)/Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia (PIPEBI) dengan cara pinjam pakai/sewa/bangun guna serah.

In addition, there are Lands/Buildings used by the Indonesia Banking Development Foundation (Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia - YPPI), Bank Indonesia's Employee Welfare Foundation (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia - YKKBI), Bank Indonesia Retired Employees Association (Persatuan Pensiunan Bank Indonesia - PPBI), the Bank Indonesia KORPRI Unit Foundation (Yayasan Perguruan KORPRI Unit Bank Indonesia - YASPORBI), and Bank Indonesia Employees' Wives association (Persatuan Isteri Pegawai Bank Indonesia - PIPEBI) under loan, rental or build operate transfer (BOT) agreements.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

2. Dana Kesejahteraan Pegawai

Berdasarkan Pasal 47 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia diwajibkan mengalokasikan 7,5% dari laba bersih setelah pajak yang telah disahkan untuk Dana Kesejahteraan Pegawai (DKP). DKP digunakan sebagai sumber pinjaman pegawai dan selebihnya ditempatkan dalam bentuk deposito dan surat berharga Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 3/11/KEP/GBI/INTERN/2001 tanggal 29 Juni 2001, pengelolaan DKP dilakukan oleh YKKBI.

Posisi DKP per 31 Desember 2011 adalah Rp875.770 juta terdiri dari pinjaman pegawai Bank Indonesia sebesar Rp439.704 juta, dana di Bank Indonesia namun belum disalurkan kepada pegawai sebesar Rp12.758 juta dan dana yang dikelola oleh YKKBI sebesar Rp423.308 juta.

3. Dana Tunjangan Hari Tua

Berdasarkan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia mengadakan Tunjangan Hari Tua (THT) untuk pegawai dalam rangka memiliki rumah tempat tinggal. Program THT dikelola oleh YKKBI dan dikenal dengan program Baperum. Dalam rapat Pembina YKKBI tanggal 25 April 2011, telah ditetapkan pemisahan kekayaan pendanaan YKKBI untuk program THT (Baperum) dan program YKKBI lainnya (non-Baperum) terhitung sejak 1 Januari 2011 dengan komposisi untuk Baperum sebesar 32,5% dan untuk non Baperum sebesar 67,5%. Pada tahun 2011, YKKBI sedang mengkaji pemisahan kekayaan pendanaan.

4. Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang

2. Employee Welfare Funds

Under Article 47(6) of the Republic of Indonesia Central Bank Act (Number 13 of 1968), Bank Indonesia is obliged to allocate 7.5% of its after-tax net profit that has been validated to the employee welfare fund (Dana Kesejahteraan Pegawai - DKP). The DKP is used as a source of employee loans. Meanwhile, idle funds are placed in time deposits and government bonds. Based on the Governor of Bank Indonesia Decision Number 3/11/KEP/GBI/INTERN/2001 dated June 29, 2001, the YKK-BI was appointed as the fund manager of the DKP.

As at December 31, 2011, the DKP balance amounted to IDR875,770 million, which consisted of Bank Indonesia employee loans amounting to IDR439,704 million, undistributed funds for employees amounting to IDR12,758 million and funds managed by the YKK-BI amounting to IDR423,308 million.

3. Retirement Benefit Fund

Under Article 43 (1) of the Central Bank Act (Number 13 of 1968), Bank Indonesia operates a Retirement Benefit (Tunjangan Hari Tua - THT) program to support employees acquire houses. The THT program is managed by YKKBI and is known as House Ownership Fund (Bantuan Pemilikan Rumah - Baperum) program. At the YKKBI trustees meeting held on April 25, 2011, it was decided to separate the YKKBI funds for the THT program % and other YKKBI program funds (non Baperum), with the ratio being 32.5% for Baperum and 67.5% for non-Baperum starting from January 1, 2011. In 2011 YKKBI was in the process of studying the implementation of such separation.

4. Financial Services Authority

Under Article 55(2) of Act Number 21 of 2011, dated 22 November 2011, on the Financial Services

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Otoritas Jasa Keuangan; fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan mulai tanggal 31 Desember 2013 beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Persiapan yang diperlukan dalam rangka pembentukan OJK diatur sebagaimana Surat Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 43/KMK.010/2012 dan Nomor 14/6/KEP.GBI/INTERN/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam Rangka Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.

5. Uang Titipan PT Bank Global Internasional, Tbk. Dalam Likuidasi

Berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menitipkan barang bukti perkara tindak pidana pada PT Bank Global Internasional, Tbk. (dalam likuidasi) berupa uang tunai sebesar Rp16.550 juta.

6. Hibah

Berdasarkan dokumen *Greenbook* Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk periode proyek tahun 2010-2012 Bank Indonesia memperoleh hibah Pemerintah dalam bentuk *Technical Assistance* sebesar USD1,318,000.00 untuk pelaksanaan proyek *Capacity Development for Supporting Industry Development: Credit Guarantee System* yang berasal dari lembaga donor *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dan *Extension of Promotion of Small Financial Institution* (ProFi) yang berasal dari lembaga donor *Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit* (GTZ) GmbH. Di tahun 2011 alokasi hibah yang diberikan dalam bentuk *technical assistance* dinilai sebesar USD1,000,000.00 dengan

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Authority, the functions, duties and powers of regulating and supervising financial services in the banking sector will be transferred from Bank Indonesia to the Financial Service Authority (OJK) on December 31, 2013.

The preparation required for the establishment of the OJK are provided for in the Joint Decision of the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia, number 43/KMK.010/2012 and Number 14/6/KEP.GBI/INTERN/2012 dated February 14, 2012 on the establishment of a joint team from the Ministry of Finance and Bank Indonesia in the context of the establishment of the Financial Service Authority.

5. Funds belonging to PT Bank Global Internasional Tbk, in liquidation

As evidenced by the Official Report on the Entrustment of Evidence, the Jakarta Provincial Prosecutor's Office entrusted evidence in the form of IDR16,550 million to Bank Indonesia. The said evidence is related to a criminal case involving PT Bank Global Internasional Tbk (in liquidation).

6. Grants

According to the Green Book produced by the National Planning Agency (Bappenas), during the project years 2010-2012 Bank Indonesia received government grants in the form of Technical Assistance amounting to USD1,318,000.00 for the implementation of the Capacity Development for Supporting Industry Development: Credit Guarantee System (the said funds originated from donor agency Japan International Cooperation Agency (JICA)) and the Extension of Promotion of Small Financial Institution (ProFi), which funds originated from donor agency Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. In 2011, Bank Indonesia received USD1,000,000.00 in technical

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

rincian sebesar USD800,000.00 dari JICA dan sebesar USD200,000.00 dari GTZ.

assistance, with USD800,000.00 originating from the JICA and USD200,000.00 from GTZ.

E. KOMITMEN DAN KONTINJENSI**E. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES****1. Pinjaman Dua Tahap (Two Step Loans)**

Merupakan pinjaman dari lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, Japan Bank for International Cooperation, dan ADB kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk diteruskan kepada bank melalui Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam skim kredit ini adalah sebagai pemegang kas Pemerintah, untuk memberikan dan menagih kembali pinjaman yang diteruskan kepada bank-bank nasional. Bank-bank nasional ini seterusnya akan mengambil alih risiko kredit dan menyalurkan kredit tersebut kepada pemakai akhir yang memenuhi syarat.

1. Two Step Loans

Two Step Loans (TSL) are loans from financial foreign institutions, such as the World Bank, Japan Bank for International Cooperation and the Asian Development Bank, to the Government of the Republic of Indonesia to be channeled to banks through Bank Indonesia. The role of Bank Indonesia in these credit schemes is as the account holder of the Government, to distribute the loans and to collect payments from the national banks. Thus, these national banks bear the credit risk and distribute the loans to qualified borrowers.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-2147/LK/2000 tanggal 16 Mei 2000 menyatakan bahwa Bank Indonesia hanya bertindak sebagai agen pelaksana dari skim-skim ini, oleh karena itu tidak akan menanggung risiko kredit.

The letter of the Minister of Finance Number S-2147/LK/2000 dated May 16, 2000, states that Bank Indonesia only acts as the executing agent of these schemes and therefore bears no credit risk.

Peminjam (*borrower*) dalam penerusan TSL adalah Pemerintah Republik Indonesia, kecuali untuk fasilitas dari EXIM Taiwan yang bertindak sebagai peminjam adalah Bank Indonesia dan diteruskan kepada Bank Bukopin.

The borrower in a TSL is the Government of Republic of Indonesia, except for the borrower of loans from EXIM Taiwan, which is Bank Indonesia, with the loan in turn being channeled to Bank Bukopin.

Pinjaman TSL diteruskan kepada bank dalam valuta Rupiah, USD, dan EUR dengan posisi saldo pinjaman per 31 Desember 2011 setara dengan Rp664.033 juta.

TSL are distributed to recipient banks in IDR, USD and EUR with balance as at December 31, 2011 standing at IDR664,033 million.

Di samping itu, terdapat tagihan Pemerintah kepada BUMN/BUMD/Pemda dengan *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang ditandatangani oleh Bank Indonesia atas dasar Surat Kuasa dari Menteri

There are also Government claims against State-owned Enterprises (Badan Usaha Milik Negara - BUMN)/Local Government-owned Enterprises (Badan Usaha Milik Daerah - BUMD), where the Subsidiary

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Keuangan dalam rangka *Project Aid* yang sumber dananya berasal dari *Foreign Exchange Loan* dan Rekening Dana Investasi dengan nilai *outstanding* per 31 Desember 2011 setara dengan Rp273.412 juta.

Saldo pinjaman masing-masing skim tersebut diatas merupakan sisa saldo penerusan pinjaman sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan penatausahaannya tidak dicatat dalam neraca Bank Indonesia namun dicatat pada rekening *off balance sheet* Bank Indonesia.

2. Transaksi Valas

Pada tanggal 31 Desember 2011, jumlah komitmen tagihan dan komitmen kewajiban surat-surat berharga, deposito, dan swap Bank Indonesia setara dengan Rp21.590.260 juta dan Rp20.758.491 juta.

3. Perlindungan Hukum bagi Pelaksana Tugas Kedinasan (PTK)

Bank Indonesia atas dasar Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia (PDG) Nomor 4/13/PGD/2002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang Perlindungan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia telah memberikan perlindungan hukum kepada tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia terkait dengan kasus BLBI. Selanjutnya, berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tanggal 10 Juni 2005, tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah.

Loan Agreements (SLA) were signed by Bank Indonesia based on authorization from the Minister of Finance for the purpose of project aid. The funds originated from Foreign Exchange Loans (FEL) and Investment Fund Accounts (Rekening Dana Investasi-RDI) with the outstanding value as at December 31, 2011 being IDR273,412 million.

The loan balances for each of the above schemes represents the balances that were channeled prior to the entry into effect of the Bank Indonesia Act (Number 23 of 1999). Their administration is not recorded on the Bank Indonesia Balance Sheet but rather on the Bank Indonesia Off Balance Sheet Account.

2. Foreign Currency Transactions

As at December 31, 2011, commitment receivables and commitment payables of marketable securities, time deposits, and swaps were equal to IDR21,590,260 million and IDR20,758,491 million, respectively.

3. Legal Protection for Persons Performing Official Duties (PTK)

In accordance with the Board of Governors Regulation (PDG) Number 4/13/PGD/2002 dated October 22, 2002, concerning "Bank Indonesia Legal Protection for Persons Performing Official Duties," Bank Indonesia provides legal protection for three ex-members of Bank Indonesia's Board Directors in connection with the Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) case. With the cassation decision in the Republic of Indonesia's Supreme Court (Mahkamah Agung Republik Indonesia - MA RI), dated June 10, 2005, the said three ex members of the Board of Governors were found guilty.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Sejalan dengan PDG Nomor 4/13/PDG/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Dewan Gubernur (DG) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 20 Juni 2005 telah menyetujui agar seluruh biaya penanganan perkara yang telah diterima oleh tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia untuk dikembalikan kepada Bank Indonesia. Selanjutnya dalam RDG tanggal 11 April 2006 telah disetujui secara prinsip bagi tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) dan penundaan kewajiban mengembalikan seluruh biaya penanganan perkara sampai adanya putusan PK.

Upaya hukum PK dimaksud hingga saat ini belum dapat dilaksanakan mengingat tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia tersebut mengajukan permohonan penundaan pengajuan upaya hukum PK, yang terakhir sampai dengan akhir bulan Desember 2012. Permohonan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa situasi dan kondisi Bank Indonesia saat ini dirasakan belum mendukung upaya hukum PK dimaksud.

4. N.V. De Indonesische Overseeze Bank (Indover Bank)

Sejak tanggal 6 Oktober 2008, Indover Bank dikenakan tindakan darurat (*emergency measures*) karena adanya kesulitan likuiditas yang dialaminya. Pada tanggal 1 Desember 2008, Indover Bank telah dinyatakan pailit/bangkrut oleh Pengadilan Amsterdam dan berstatus dilikuidasi dalam wilayah kedaulatan Belanda. Alasan dilikuidasinya Indover Bank adalah ekuitas yang telah negatif dan tidak ada tambahan modal yang dapat diharapkan untuk menutup ekuitas negatif tersebut, baik melalui tambahan modal dari Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank maupun dari investor lainnya.

Based on PDG Number 4/13/PDG/2002, dated October 22, 2002, Bank Indonesia's Board of Directors at the Board of Governors Meeting on June 20, 2005, resolved that all of the costs involved in the handling of the case on behalf of the three former members of Bank Indonesia's Board of Directors must be returned. Furthermore, the Board of Governors at its Meeting on April 11, 2006, agreed in principle that the three ex members of Bank Indonesia's Board of Directors seek a Final Review (Peninjauan Kembali - PK) of their case, and suspended the obligation to return all court expenses until the process of Final Review had been completed.

Until now, the process of Final Review has not been completed as the three ex members of Bank Indonesia's Board of Directors sought a suspension of the Final Review process until, at the latest, the end of December 2012. Their grounds for doing so were that the circumstances and condition of Bank Indonesia at the present time were felt to be not conducive to the Final Review.

4. N.V. De Indonesische Overseeze Bank (Indover Bank)

Since October 6, 2008, emergency measures have been applied to Indover Bank due to a shortage of liquidity. On December 1, 2008, Indover Bank was declared bankrupt by the Amsterdam Court and its status was being liquidated in the Netherlands. The reason for Indover Bank's liquidation was its negative equity and a lack of additional capital that could be expected to cover that negative equity, by way of additional capital from Bank Indonesia as the sole shareholder of Indover Bank or from other investors.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Dengan telah dipailitkannya Indover Bank oleh Pengadilan Belanda, maka Indover Bank berada di bawah pengelolaan dan pengawasan kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Amsterdam Belanda.

Sampai dengan saat ini, masih terdapat *dispute* antara Bank Indonesia dan kurator mengenai hak dan kewajiban Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal dan kreditor terkait dengan pelaksanaan likuidasi Indover Bank. Pada bulan Maret 2010, Bank Indonesia sebagai kreditor telah mengajukan *statement of claim* atas deposito dan giro Bank Indonesia di Indover Bank ke Pengadilan Amsterdam. Atas klaim Bank Indonesia tersebut di atas, pada bulan April 2010 Kurator menyampaikan *statement of counterclaim* di Pengadilan Belanda mendalilkan bahwa Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank berkewajiban untuk menanggung defisit Indover Bank dan men-*set off* tagihan Bank Indonesia yang ada di Indover Bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia tetap berpendirian bahwa sesuai hukum perusahaan, tanggung jawab Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal pada Indover Bank hanya sebatas penyertaan Bank Indonesia pada Indover Bank.

Dalam perkembangannya, sebagaimana yang disampaikan *Stibbe* dalam *Eleventh Public Liquidation Report* bulan Februari 2012, proses penyelesaian *dispute* tersebut masih berlangsung di Pengadilan Amsterdam.

5. Perkara Hukum yang Ditangani Bank Indonesia

Pada tahun 2011, Bank Indonesia menangani lima perkara perdata yang berada di luar negeri terkait penyelesaian kewajiban Indover Bank Amsterdam di Pengadilan Distrik Amsterdam. Selain itu, Bank Indonesia juga menangani 57 perkara di dalam

With the declaration of bankruptcy of Indover Bank by the Amsterdam Court, Indover bank was placed under the control and supervision of Trustees appointed by the Amsterdam Court.

To date, there is still a dispute outstanding between Bank Indonesia and the Trustees concerning the rights and liabilities of Bank Indonesia as the sole shareholder and the creditors in the liquidation of Indover Bank. In March 2010, Bank Indonesia as a creditor filed a statement of claim to its time and demand deposits with Indover Bank with the Amsterdam Court. Related to that claim, on April 2010 the Trustees filed a statement of counterclaim with the Amsterdam Court, arguing that Bank Indonesia as the sole shareholder must bear the deficit in Indover Bank and set off of Bank Indonesia's claims against Indover Bank. In this regard, Bank Indonesia is of the opinion that based on company law, Bank Indonesia's responsibility as the sole shareholder of Indover Bank is limited to Bank Indonesia's equity participation in Indover Bank.

In the latest development, as reported by Stibbe in the Eleventh Public Liquidation Report in February 2012, the process of resolving the dispute is still underway in the Amsterdam Court.

5. Legal Matters

In 2011, Bank Indonesia was dealing with five overseas legal cases related to the Indover Bank bankruptcy settlement in the Netherlands, and 57 cases in Indonesia, consisting of 52 civil cases, and four administrative law cases, and one freedom of

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

negeri, yang terdiri dari perkara Perdata sebanyak 52 perkara, perkara Tata Usaha Negara sebanyak empat perkara, dan sengketa informasi sebanyak satu perkara. Dari 57 perkara di dalam negeri, telah diputus oleh pengadilan sebanyak 43 perkara.

Pada tahun 2011, Bank Indonesia menghadapi gugatan di pengadilan sebanyak 64 perkara, masing-masing terdiri dari lima perkara perdata yang berada di luar negeri terkait penyelesaian kewajiban Indover Bank Amsterdam di Pengadilan Distrik Amsterdam, 51 perkara perdata dan lima perkara Tata Usaha Negara serta satu perkara sengketa informasi di dalam negeri.

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia, maka dari 51 perkara perdata yang ditangani dapat dirinci berdasarkan sektornya sebagai berikut:

- a. Gugatan perdata terkait dengan tugas Bank Indonesia di sektor Perbankan sebanyak 43 perkara (mengenai fungsi pengawasan bank, Sistem Informasi Debitur, dan proses likuidasi bank)
- b. Gugatan perdata terkait dengan tugas Bank Indonesia di sektor Sistem Pembayaran sebanyak lima perkara terkait APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) yaitu sengketa antara nasabah dengan bank, dan Bank Indonesia ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut karena Bank Indonesia adalah sebagai otoritas perbankan dan sistem pembayaran.
- c. Gugatan perdata terkait dengan tugas Bank Indonesia di sektor Manajemen Intern sebanyak tiga perkara yaitu terkait dengan kepemilikan hak atas tanah (aset Bank Indonesia) dan kelogistikan.

information case. Of the 57 domestic cases, 43 have been decided by the courts.

In 2011, Bank Indonesia was defending 64 court actions, consisting of five overseas legal cases related to the Indover Bank bankruptcy settlement in the Netherlands, and 51 civil cases in Indonesia, five administrative law cases, and one freedom of information case.

If we relates these to Bank Indonesia's duties, the 51 civil cases may be classified as follows:

- a. *43 civil actions related to the duties of Bank Indonesia in the banking sector (bank supervision, debtor information system, and bank liquidation process).*
- b. *Five cases related to the duties of Bank Indonesia in the Payments System sector. These cases concern Card-Based Payment Equipment (APMK) and involve disputes between banks and their customers, with Bank Indonesia being joined as a defendant as it is the payments system and banking regulator.*
- c. *Three cases related to Bank Indonesia's duties in the Internal Management sector. These three cases involve disputes over land ownership (Bank Indonesia assets) and logistical matters.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Sementara lima perkara Tata Usaha Negara terdiri dari dua perkara terkait dengan hasil proses *Fit and Proper Test* pengurus bank dan tiga perkara terkait dengan kepegawaian dan pembatalan sertifikat hak milik. Sedangkan satu perkara sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat terkait dengan permintaan data dan informasi berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

6. Aset Bank Indonesia yang Dalam Proses Penyelesaian

a. Aset Bank Indonesia yang Diperoleh Dari Putusan Pengadilan

Terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi terpidana Lee Darmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat, telah ada Putusan MARI Nomor 1662K/Pid/1991 tanggal 21 Maret 1992. Dalam amar putusan MARI tidak ada klausula denda apabila uang pengganti tidak dibayar dan tidak ada batas waktu pembayaran uang pengganti dimaksud. Eksekusi putusan pengadilan tersebut merupakan kewenangan pihak Kejaksaan sedangkan Bank Indonesia hanya menerima penyerahan uang pengganti hasil eksekusi dari Kejaksaan. Adapun putusan MARI Nomor 1662K/Pid/1991 tanggal 21 Maret 1992 menetapkan sebagai berikut:

- 1) Eksekusi pembayaran uang pengganti sebesar Rp85.000 juta
 Sesuai keputusan MARI tersebut ditetapkan bahwa terdakwa Lee Dharmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat harus membayar uang pengganti kepada negara c.q. Bank Indonesia sebesar Rp85.000 juta.

Dalam amar putusan MARI tidak ada klausula denda apabila uang pengganti tidak dibayar

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

The five administrative law cases consist of two cases involving the outcomes of fit and proper tests for bank executives and three cases related to personnel matters and the cancellation of freehold title certificates. Finally, the one freedom of information case involves a request for information under the Access to Public Information Act.

6. Safeguarding Bank Indonesia Assets

a. Bank Indonesia Assets Secured by Judicial Decision

In the corruption case involved convicted defendant Lee Darmawan alias Lee Chin Kiat, the Supreme Court (MA) of the Republic of Indonesia has handed down Decision Number 1662K/Pid/1991 dated March 21, 1992. The court order, however, does not impose penalties if compensation is not paid, and sets no time limit for the payment of compensation. Execution of the decision is the responsibility of the Prosecution Service, while Bank Indonesia only receives the compensation funds resulting from execution by the Prosecution Service. The said Supreme Court Decision rules as follows:

- 1) *Execution of Payment of Compensation amounting to IDR85,000 million
 In its decision, the Supreme Court stated that the defendant Lee Dharmawan Kertaraharja Haryanto aka Lee Chin Kiat should pay compensation to the state, in this case Bank Indonesia, in the amount of IDR85,000 million.*

The court order, however, does not impose penalties if compensation is not paid, and

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

dan tidak ada batas waktu pembayaran uang pengganti dimaksud. Eksekusi putusan pengadilan tersebut merupakan kewenangan pihak Kejaksaan, sedangkan Bank Indonesia hanya menerima penyerahan uang pengganti hasil eksekusi dari Kejaksaan.

Sejak putusan MARI tanggal 21 Maret 1992 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga April 2011, Bank Indonesia belum menerima hasil eksekusi uang pengganti. Bank Indonesia telah mengajukan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 12/193/DHk tanggal 24 Mei 2010 dan Nomor 12/400/DHk tanggal 6 Oktober 2010 yang isinya menanyakan pelaksanaan eksekusi uang pengganti tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dengan surat Nomor B-4383/O.1.12/Fu.1/10/2010 tanggal 20 Oktober 2010, menyatakan bahwa terkait eksekusi pembayaran uang pengganti sebesar Rp85.000 juta dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terpidana Lee Darmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat telah dilakukan pembayaran kepada kas negara sejumlah Rp1.384 juta. Pembayaran tersebut masih kurang sebesar Rp83.616 juta dari putusan uang pengganti yang ditetapkan MARI.

Melalui surat Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kepada Direktur UKPA Nomor B-2661/O.1.12/Ft1/05/2011 tanggal 27 Mei 2011, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menginformasikan bahwa hasil eksekusi atas aset terpidana Lee Darmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat sebesar Rp4.263 juta telah disetor ke Kas Negara.

sets no time limit for the payment of compensation. Execution of the decision is the responsibility of the Prosecution Service, while Bank Indonesia only receives the compensation funds resulting from execution by the Prosecution Service.

Since the decision of the Supreme Court on March 21, 1992, which has had permanent legal force since April 2011, Bank Indonesia has received the proceeds of execution of compensation. Therefore, Bank Indonesia has submitted letters to the Head of the West Jakarta District Prosecution Office (Number 12/193/DHk dated May 24, 2010) and Number 12/400/DHk dated October 6, 2010, asking for the compensation order to be enforced.

The Head of the West Jakarta District Prosecution Office, through letter Number B-4383/O.1.12/Fu.1/10/2010, dated October 20, 2010, stated that in connection with the payment of compensation of IDR85,000 million, the convicted defendant Lee Darmawan alias Lee Chin Kiat has made cash payments into the State Cash Account amounting to IDR1,384 million, leaving a shortfall of IDR83,616 million in respect of the compensation that the Supreme Court ordered be paid.

Through its letter to the UKPA Director (Number B-2661/O.1.12/Ft1/05/2011 dated 27 May 2011), the West Jakarta District Prosecution Office informed Bank Indonesia that IDR4,263 million had been raised from execution against the assets of Lee Darmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat, and that the funds had been paid into the State Cash Account.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Surat Bank Indonesia kepada Dirjen Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan Nomor 13/4/DpG/UKPA tanggal 30 Desember 2011, Bank Indonesia meminta agar hasil eksekusi sebesar Rp4.263 juta yang merupakan hak Bank Indonesia disetorkan kepada Bank Indonesia.

In its letter to the Director General of the Treasury at the Ministry of Finance (Number 13/4/DpG/UKPA dated December 30, 2011), Bank Indonesia requested that the above mentioned IDR4,263 million to which Bank Indonesia is entitled, be paid over to Bank Indonesia.

Berdasarkan Rapat di Kementerian Keuangan pada tanggal 16 Januari 2012 yang dihadiri Kementerian Keuangan, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan Bank Indonesia serta surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-910/PB/2012 tanggal 27 Januari 2012, diinformasikan bahwa Uang Pengganti atas kasus Lee Darmawan yang terlanjur disetorkan ke Kas Negara oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dapat dikembalikan kepada pihak yang menderita kerugian (Bank Indonesia). Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia dapat mengajukan surat permohonan pengembalian atas Uang Pengganti tersebut melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Following a meeting at the Ministry of Finance on January 16, 2012, which was attended by the Minister of Finance, West Jakarta District Prosecutor, and representatives of Bank Indonesia, and based on the letter of the Minister of Finance Number S-910/PB/2012 dated January 27, 2012, it was agreed that the funds that had been paid into the State Cash Account by the West Jakarta District Prosecution Office should be handed over to the party that suffered loss (Bank Indonesia), and that Bank Indonesia should submit a request for the handover of the funds to the West Jakarta District Prosecution Office.

- 2) Rampasan Barang Bukti Berupa Tanah dan/atau Bangunan
Sesuai keputusan MARI Nomor 1662K/Pid/1991 tanggal 21 Maret 1992 tersebut di atas, ditetapkan bahwa barang bukti berupa tanah dan/atau bangunan dirampas untuk Negara c.q. Bank Indonesia yang apabila dijumlahkan mencapai ±1.193 Ha. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 1993, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) telah menyerahkan sebagian barang bukti rampasan kepada Negara c.q. Bank Indonesia yang berupa dokumen-dokumen untuk bidang tanah seluas ±1.001 Ha. Pada saat ini, aset rampasan tersebut masih dalam

- 2) *Confiscation of Evidence in the Form of Lands and/or Buildings*
Supreme Court Decision Number 1662K/Pid/1991 dated March 21, 1992 ordered that evidence in the form of lands and/or buildings be forfeit to the State, in this case Bank Indonesia. The said lands extend to approximately 1193 hectares. On March 30, 1993, the West Jakarta District Prosecution Office handed over some of the seized evidence to Bank Indonesia in the form of land documents for approximately 1001 hectares. At the present time, the process of resolving problems related to these assets is still underway in collaboration with the

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

proses penyelesaian, bekerja sama dengan Yayasan Tridaya. Aset rampasan tersebut tersebar di beberapa lokasi, dan pada posisi 31 Desember 2011, Bank Indonesia telah melakukan penjualan aset rampasan sebanyak 61 bidang senilai Rp4.463 juta.

Yayasan Tridaya. The said assets are located in a number of different places. As of December 31, 2011, Bank Indonesia had sold 61 lots of the confiscated assets, raising IDR4,463 million in proceeds.

b. Aset Bank Indonesia yang masih perlu diselesaikan dengan Pihak Lain

b. Bank Indonesia Assets Under Resolution with Third Parties

Uraian	Nilai (Rp juta) Value (IDR Millions)	Description
1) Jl. Juanda - Jakarta (proses tukar menukar dengan PT Bank Mandiri)	70.820	1) Jl. Juanda - Jakarta (process of exchange with PT Bank Mandiri)
2) Jl. Raden Saleh No. 11 - Jakarta	9.356	2) Jl. Raden Saleh No. 11 - Jakarta
3) Jl. Tubagus Ismail - Bandung	2.302	3) Jl. Tubagus Ismail - Bandung
4) Jl. Taman Kebon Sirih No. I/8 (No. 125) dan III/30 - Jakarta Pusat	9.035	4) Jl. Taman Kebon Sirih No. I/8 (No. 125) and III/30 - Jakarta Pusat
	91.513	

7. Tagihan Kepada PT Bank IFI

Melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/19/KEP.GBI/2009 tanggal 17 April 2009, Bank Indonesia mencabut izin usaha PT Bank IFI terhitung sejak tanggal 17 April 2009. Bank Indonesia mempunyai tagihan atas dana kelolaan PT Ustraindo yang ada di PT Bank IFI sebesar Rp50.817 juta yang terdiri dari pokok sebesar Rp38.850 juta dan bunga sebesar Rp11.967 juta.

7. Claims on PT Bank IFI

Through Governor of Bank Indonesia Decision Number 11/19/KEP.GBI/2009, dated April 17, 2009, Bank Indonesia has revoked the license of PT Bank IFI starting on April 17, 2009. Bank Indonesia has a claim on funds managed by PT Ustraindo from PT Bank IFI amounting to IDR50,817 million that consists of principal of IDR38,850 million and interest of IDR11,967 million.

8. Tagihan Bunga FSD

Pada tahun 1998/1999 Bank Indonesia telah memberikan BLBI kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 di Indonesia sebesar Rp144.536.094 juta.

8. FSD Interest Claims

In 1998/1999, Bank Indonesia provided Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) to banks experiencing liquidity problems at the time of the monetary crisis in Indonesia in 1998. The said assistance amounted to IDR144,536,094 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Sebagai tindak lanjut Persetujuan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999, telah dilakukan pengalihan BLBI posisi tanggal 29 Januari 1999 dari Bank Indonesia kepada Pemerintah c.q. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp144.536.094 juta dengan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Akta Cessie) tanggal 22 Februari 1999, dan di sisi lain Pemerintah menerbitkan Surat Utang SU-001/MK/1998, sebesar Rp80.000.000 juta dan SU-003/MK/1999, sebesar Rp64.536.094 juta.

Dari total BLBI yang telah dialihkan kepada Pemerintah q.q. BPPN sebesar Rp144.536.094 juta, termasuk didalamnya FSD sebesar Rp54.460.896 juta. Dalam jumlah FSD tersebut terdapat FSD eks. Bank Take Over (BTO) yaitu PT Bank Danamon Tbk., PT Bank PDFCI Tbk., dan PT Bank Tiara Asia Tbk., sebesar Rp20.129.741 juta. Terhadap FSD sebesar Rp20.129.741 juta tersebut terdapat beban bunga FSD sebesar Rp5.322.248 juta dengan rincian sebagai berikut:

As a follow-up to the Joint Agreement between the Governor of Bank Indonesia and the Minister of Finance dated 6 February 1999, the BLBI position per 29 January 1999 was transferred from Bank Indonesia to the Government through the BPPN in the amount of IDR144,536,094 million based on the Deed of Surrender and Transfer of Title (Cessie Deed) dated February 22, 1999. For its part, the Government issued Treasury Bond SU-001/MK/1998 in the amount of IDR80,000,000 million and Treasury Bond SU-003/MK/1999 in the amount of IDR64,536,094 million.

The BLBI of IDR144,536,094 million that was transferred to the Government via the BPPN included FSD amounting to IDR54,460,896 million. This figure included FSD ex Bank Takeovers (BTO) of PT Bank Danamon Tbk., PT Bank PDFCI Tbk., and PT Bank Tiara Asia Tbk., in the amount of IDR20,129,741 million. In respect of this FSD, interest of IDR5,322,248 million has accrued, with the details being as follows:

Uraian	Pokok FSD (Rp juta) FSD Principal (IDR Millions)	Bunga FSD (Rp juta) FSD Interest (IDR Millions)	Description
- PT Bank Danamon Tbk.	16.691.825	4.379.861	- PT Bank Danamon Tbk.
- PT Bank PDFCI Tbk.	1.995.000	534.959	- PT Bank PDFCI Tbk.
- PT Bank Tiara Asia Tbk.	1.442.916	407.428	- PT Bank Tiara Asia Tbk.
	20.129.741	5.322.248	

Atas tagihan bunga sebesar Rp5.322.248 juta tidak ikut dialihkan kepada pemerintah karena tidak tercatat dalam pembukuan *on balance sheet* Bank Indonesia per tanggal 29 Januari 1999.

The claims in respect of this IDR5,322,248 million in interest were not transferred to the Government as they were not recorded on the Bank Indonesia balance sheet per January 29, 1999.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

Sesuai Pasal 6 Persetujuan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999 dinyatakan bahwa pembayaran oleh Pemerintah atas tagihan BLBI yang timbul setelah tanggal 29 Januari 1999 masih dimungkinkan dilaksanakan berdasarkan tagihan yang diajukan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah. Sehubungan dengan itu, pada bulan Mei 1999 tagihan bunga FSD kepada eks. BTO dibukukan oleh Bank Indonesia sebagai "Tagihan kepada BPPN".

Article 6 of the Joint Agreement between the Governor of Bank Indonesia and the Minister of Finance dated 6 February 1999 stated that payment by the Government of BLBI claims arising after January 29, 1999 could still be effected based on the submission of claims by Bank Indonesia to the Government. In this regard, in May 1999 the FSD interest ex BTO was recorded by Bank Indonesia as "Claims on BPPN."

a. Penyajian tagihan bunga FSD pada LKTBI

- Pada LKTBI Tahun 1999-2002 (*audited*), tagihan Bunga FSD disajikan sebagai bagian dari pos "Tagihan Kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya". Dalam Catatan atas LKTBI Tahun 2002 (*audited*) dijelaskan bahwa:
 - Tambahan BLBI berupa tagihan kepada BPPN sebesar Rp9.125.397 juta dan tagihan karena saldo debit giro BBO/BBKU sebesar Rp5.324.396 juta atau seluruhnya sebesar Rp14.449.793 juta merupakan tambahan BLBI sampai dengan tanggal 13 Maret 1999 yang telah dijaminakan dengan SUP Nomor SU-004/MK/1999, namun pengalihan secara *cessie* kepada Pemerintah atas tambahan BLBI tersebut belum dilaksanakan. Bank Indonesia, terakhir dengan surat Nomor 3/3/DG/BKr tanggal 15 Februari 2001 menyatakan bahwa seluruh persyaratan pengalihan BLBI telah terpenuhi yaitu Bank Indonesia telah melakukan penagihan dan Departemen Keuangan telah menunjuk BPPN sebagai kuasa Pemerintah. Hal ini

a. Presentation of FSD interest in the Bank Indonesia Annual Financial Statements

- *In the 1999-2002 audited Bank Indonesia Financial Statements, the FSD interest claims were presented as part of "Other Rupiah Claims on Government," while in the 2002 audited Bank Indonesia Notes to the Financial Statements it was explained as follows:*
 - *"Additional BLBI in the form of claims on the BPPN amounting to IDR9,125,397 million and claims of IDR5,324,396 million arising out of BBO/BBKU demand deposit debit balance, or a total of IDR14,449,793 million represent additional BLBI up to March 13, 1999 which has been guaranteed by SUP Number SU-004/MK/1999, although the transfer of the additional BLBI by way of cession to the Government has not been carried out. Bank Indonesia, most recently by Letter Number 3/3/DG/BKr, dated February 15, 2001, stated that all of the requirements for the transfer of BLBI had been fulfilled, that is, Bank Indonesia had submitted a claim and the Ministry of Finance had appointed the BPPN as the Government*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

*Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011*

telah sesuai dengan isi Persetujuan Bersama tanggal 6 Februari 1999 pasal 2 ayat 3 yang menyatakan bahwa atas pengambilalihan hak tagih (*cessie*) akan dilakukan verifikasi yang disepakati kedua belah pihak. Demikian pula dengan akta *cessie* masing-masing bank yang menyatakan bahwa kegiatan verifikasi dimaksudkan dalam rangka kepastian hak tagih (*cessie*) disamping juga untuk kepastian hak jaminan, apabila ada.

- Menteri Keuangan dengan Surat Nomor S-174/MK.06/2001 tanggal 3 April 2001 menyatakan bahwa pengalihan secara *cessie* atas BLBI BBU sebesar Rp14,4 triliun oleh Bank Indonesia dapat dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi atas jumlah BLBI dan hal-hal lain. Adapun mengenai kewajiban atas bunga FSD sebesar Rp13,9 triliun masih menunggu hasil verifikasi atas jumlah BLBI sebesar Rp14,4 triliun.
- Pada LKTBI 2003 (*audited*), terdapat pengalihan penyajian atas tagihan Bunga FSD yang semula disajikan sebagai bagian dari pos "Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya" menjadi bagian dari pos "Tagihan kepada Bank dalam Rupiah". Hal ini dikarenakan adanya penyelesaian permasalahan tambahan BLBI antara Bank Indonesia dan Pemerintah serta pembubaran BPPN (sesuai Keppres Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 BPPN telah dibubarkan oleh Pemerintah karena masa kerjanya telah selesai).

representative. This is in accordance with Articles 2 and 3 of the Joint Agreement dated February 6, 1999, which stated that verification of the cessie arrangement will be conducted as agreed by the parties. Thus, through the Deed of Cessie, each bank stated that verification was intended to ensure certainty of rights under the cessie and verify guarantees, if any.

- *By virtue of Letter Number S-174/MK.06/2001, dated April 3, 2001, the Minister of Finance stated that the the assignment by way of cessie of BLBI BBU in the amount of IDR14.4 trillion by Bank Indonesia could be carried out after verification of the BLBI amount and other matters had been conducted. However, as regards FSD interest of IDR13.9 trillion, the process would have to await the outcome of verification on BLBI amounting to IDR14.4 trillion.*
- *In the audited Bank Indonesia Financial Statements for 2003, the FSD interest was reclassified from "Other Rupiah Claims on Government" to "Rupiah Claims on Banks." This was due to the fact that the problem of additional BLBI between Bank Indonesia and the Government had been resolved, and the dissolution of the BPPN (in accordance with Presidential Decree Number 15 of 2004, dated February 27, 2004, the BPPN was dissolved by the Government as its term of existence had come to an end).*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

- Dalam LKTBI Tahun 2010 (*unaudited*), Bank Indonesia melakukan reklasifikasi penyajian tagihan bunga FSD dari semula sebagai bagian dari pos “Tagihan kepada Bank” menjadi bagian dari pos “Tagihan kepada Pemerintah”. Hal ini sejalan dengan surat-surat yang disampaikan oleh Bank Indonesia kepada BPPN dan Pemerintah, terakhir surat kepada Menkeu Nomor 12/1/GBI/DKBU tanggal 30 April 2010. Namun demikian surat-surat Bank Indonesia tidak mendapat jawaban/tanggapan dari pemerintah.
- Pada LKTBI Tahun 2011 Bank Indonesia menyajikan tagihan bunga FSD BTO tersebut dalam pos Aktiva Lain-Lain dan telah membentuk cadangan penyisihan aktiva yang memadai.

b. Kronologis penyelesaian tagihan bunga FSD

- Sesuai lampiran surat Menkeu Nomor SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999, bunga Fasilitas Saldo Debet (FSD) termasuk dalam angka sementara rincian kewajiban bank yang dapat dibiayai penjaminan Pemerintah namun dengan catatan pelaksanaan pembayaran masih akan dibicarakan kembali.
- BPPN dengan surat Nomor PB-443/BPPN/0799 tanggal 15 Juli 1999 tentang Pembebanan Bunga FSD menjawab surat Bank Indonesia Nomor 1/121/UK, Nomor 1/122/UK, Nomor 1/123/UK dan Nomor 1/24/UK tertanggal 6 Juli 1999, yang masing-masing ditujukan kepada PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero), PT Bank PDFCI, Tbk., PT Bank Tiara Asia Tbk., dan PT Bank Danamon Tbk. tentang

- *In the 2010 unaudited Bank Indonesia Financial Statements, the presentation of FSD interest was again reclassified from “Claims on Banks” to “Claims on Government.” This was in line with the letters sent by Bank Indonesia to the BPPN and Government, most recently the letter to letter to the Minister of Finance, Number 12/1/GBI/DKBU dated April 30, 2010. However, no response was forthcoming from the Government to these letters.*
- *In the 2011 Bank Indonesia Financial Statements, FSD BTO interest has been presented in the “Other Assets” account, and a sufficient provision has been established.*

b. Chronology of FSD Interest Claims

- *In accordance with the attachment to Minister of Finance Letter Number SR-176/MK.01/1999 dated May 31, 1999, Debit Balance Facility (FSD) interest was included in the interim bank liabilities amount that could be financed by Government guarantee, subject to the provision that payment implementation would be further discussed.*
- *The BPPN, through its letter Number PB-443/BPPN/0799, dated July 15, 1999, on FSD interest, responded to Bank Indonesia Letters Number 1/121/UK, Number 1/122/UK, Number 1/123/UK and Number 1/24/UK dated July 6, 1999, which were addressed respectively to PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero), PT Bank PDFCI, Tbk., PT Bank Tiara Asia Tbk., and PT Bank Danamon*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

*Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011*

Pembebanan Bunga FSD. Dalam surat BPPN butir 3-5 menyatakan bahwa:

- 1) "... beban bunga FSD PT Bank PDFCI Tbk., PT Bank Tiara Asia Tbk. dan PT Bank Danamon Tbk., yang dalam surat Saudara dinyatakan timbul selama Agustus 1998 sampai dengan Januari 1999, telah menjadi hak pemerintah q.q. BPPN"
- 2) Atas beban bunga tersebut, selanjutnya Pemerintah q.q. BPPN akan memperhitungkan dengan bank-bank tersebut secara terpisah.
- 3) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Bank Indonesia tidak melakukan pendebitan rekening atas beban bunga FSD bank-bank dimaksud kecuali terhadap PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero).

- Bank Indonesia dengan surat kepada Menkeu Nomor 3/1/DGS/BKt tanggal 19 Februari 2001 meminta agar Pemerintah menyelesaikan kewajiban bunga FSD mengingat pokok FSD telah diakui dan menjadi beban Pemerintah.
- Menanggapi surat Bank Indonesia tersebut, Menkeu melalui surat Nomor S-174/MK.06/2001 tanggal 3 April 2001 menyatakan bahwa penyelesaian atas kewajiban bunga FSD menunggu hasil verifikasi atas jumlah tambahan BLBI sebesar Rp14,45 triliun.

Tbk. IN the said BPPN letter, items 3-5 stated that:

- 1) "... the FSD interest in respect of PT Bank PDFCI Tbk., PT Bank Tiara Asia Tbk. And PT Bank Danamon Tbk., which in your letter was stated to have accrued between August 1998 and January 1999, has become the entitlement of the Government through the BPPN."
- 2) *In respect of the said interest, the Government, in this case the BPPN, will calculate it separately with each of the banks involved.*
- 3) *In the light of the above, Bank Indonesia should not debit the FSD interest for the said banks, save in the case of PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero).*

- *Bank Indonesia in its letter to the Minister of Finance Number 3/1/DGS/BKt, dated February 19, 2001, asked that the government resolve the matter of FSD interest obligations bearing in mind that the FSD principal had been recognized and taken over by the Government.*
- *In response to the said letter from Bank Indonesia, the Minister of Finance through Letter Number S-174/MK.06/2001, dated April 3, 2001, stated that the settlement of FSD interest liabilities would have to await verification of the additional BLBI of IDR14.45 trillion.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

- Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia dengan surat kepada Menkeu Nomor 3/6/DpG/DHk/Rahasia tanggal 30 April 2001 berpendapat bahwa penyelesaian bunga FSD tidak perlu menunggu pendapat Komisi IX DPR RI atas penyelesaian BLBI sebesar Rp144,5 triliun.
- Bank Indonesia dengan surat kepada BPPN Nomor 6/32/BKt tanggal 6 Februari 2004 menyatakan bahwa mengingat BPPN telah memperhitungkan tagihan bunga FSD PT BDI dalam program rekapitalisasi, maka diharapkan agar BPPN membayar kewajiban bunga FSD PT Bank Danamon Tbk. kepada Bank Indonesia.
- Bank Indonesia dengan surat kepada Presiden RI Nomor 6/1/GBI/DPIP dan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6/2/GBI/DPIP masing-masing tanggal 24 Februari 2004 antara lain menginformasikan bahwa masih terdapat tagihan bunga FSD kepada bank-bank yang merger ke PT Bank Danamon Tbk. sebesar Rp5,32 triliun yang telah diperhitungkan oleh BPPN secara set off dengan obligasi rekapitalisasi, sehingga mengurangi obligasi rekapitalisasi yang diterima oleh PT Bank Danamon Tbk.
- Bank Indonesia dengan surat kepada Deputi Ketua Keuangan, Audit dan Likuidasi BPPN Nomor 6/63/BKt tanggal 10 Maret 2004 meminta agar BPPN membayar kewajiban bunga FSD PT Bank Danamon Tbk. kepada Bank Indonesia, mengingat BPPN telah memperhitungkan kewajiban bunga FSD PT Bank Danamon Tbk. dalam program rekapitalisasi.
- *In this regard, Bank Indonesia through its letter Number 3/6/DpG/DHk/Rahasia, dated April 30, 2001, expressed the view that the settlement of FSD interest did not need to await the opinion of Commission IX of the DPR on BLBI amounting to IDR144.5 trillion.*
- *Bank Indonesia in its letter to the BPPN Number 6/32/BKt, dated February 6, 2004, stated that bearing in mind that the BPPN had calculated the FSD interest claim in respect of PT BDI as part of the recapitalization program, Bank Indonesia hoped that the BPPN would pay the FSD interest liabilities of PT Bank Danamon Tbk to Bank Indonesia.*
- *In its letters to the President Number 6/1/GBI/DPIP and the Coordinating Minister for the Economy Number 6/2/GBI/DPIP, both dated February 24, 2004, Bank Indonesia informed that there were still outstanding FSD interest claims in respect of the banks that merged with PT Bank Danamon Tbk amounting to IDR5.32 trillion that had been calculated by the BPPN as a set off against recapitalization bonds so as to reduce the recapitalization bonds received by PT Bank Danamon Tbk.*
- *In its letter to the BPPN's Deputy Chairman for Finance, Auditing and Liquidations, Number 6/63/BKt, dated March 10, 2004, Bank Indonesia asked that the BPPN pay the FSD interest liabilities of PT Bank Danamon to Bank Indonesia bearing in mind that the BPPN had calculated the said FSD interest obligations in the recapitalization program.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

- Bank Indonesia dengan surat kepada Menkeu Nomor 6/4/GBI/BKr tanggal 12 Mei 2004 menyatakan bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tugas BPPN dan mengingat kewajiban bunga FSD PT Bank Danamon Tbk. telah diperhitungkan dalam program rekapitalisasi, maka Bank Indonesia mengharapkan agar Pemerintah dapat memberikan tanggapan dan penjelasan atas kewajiban bunga FSD PT Bank Danamon Tbk. kepada Bank Indonesia.
- Surat Keputusan Bersama Menkeu dengan GBI Nomor 7/23/KEP.GBI/2005 tanggal 29 April 2005 mencakup permasalahan bunga FSD dalam agenda yang dibahas antara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Tim Kerja. Namun demikian sampai dengan SKB dimaksud berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, belum diperoleh penyelesaian atas permasalahan bunga FSD.
- Bank Indonesia dengan surat kepada Menkeu Nomor 9/8/DpG/BKr tanggal 1 Agustus 2007 meminta penjelasan apakah tagihan bunga FSD eks.BTO dapat dibayar oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia.
- Bank Indonesia dengan surat kepada Menkeu Nomor 10/15/DpG/DKBU tanggal 12 Desember 2008 meminta penjelasan apakah tagihan bunga FSD eks.BTO dapat dibayar oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia.
- Bank Indonesia dengan surat kepada Menkeu Nomor 12/1/GBI/DKBU tanggal 30 April 2010 meminta bantuan mengenai penyelesaian tagihan bunga FSD eks.BTO.
- *In its letter to the Minister of Finance Number 6/4/GBI/BKr, dated May 12, 2004, Bank Indonesia stated that in relation to the expiry of the BPPN's mandate and the fact that the FSD obligations of PT Bank Danamon Tbk had already been included as part of the recapitalization program, Bank Indonesia hoped that the Government would provide a response and clarification as regards the FSD interest obligations of PT Bank Danamon Tbk to Bank Indonesia.*
- *The Joint Decision of the Minister of Finance and the Board of Governors Number 7/23/KEP.GBI/2005, dated April 29, 2005, included the issue of FSD interest as part of the agenda to be discussed by the Government and Bank Indonesia through a Working Committee. Nevertheless, by the expiry of the Joint Decision on December 31, 2005, there had still been no resolution to the FSD interest issue.*
- *In its letter to the Minister of Finance Number 9/8/DpG/BKr, dated August 1, 2007, Bank Indonesia requested that its claim to FSD interest ex BTO be paid by the Government to Bank Indonesia.*
- *In its letter to the Minister of Finance Number 10/15/DpG/DKBU, dated December 12, 2008, Bank Indonesia requested confirmation as to whether its claim to FSD interest ex BTO would be paid by the Government to Bank Indonesia.*
- *In its letter to the Minister of Finance Number 12/1/GBI/DKBU, dated April 30, 2010, Bank Indonesia asked for assistance as regards the resolution of the FSD interest ex BTO issue.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

- Menkeu melalui surat Nomor S-228/MK.01/2011 tanggal 5 Mei 2011 menyatakan bahwa mengingat dalam LKTBI tahun 2009, tagihan FSD dicatat sebagai tagihan kepada Bank (dan bukan kepada Pemerintah), dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berikut penjelasannya yang tertuang dalam Catatan atas Laporan Keuangan, hingga laporan tahun 2009 tidak terdapat pengakuan terhadap tagihan dimaksud, maka bunga FSD kepada BTO seyogyanya dibebankan kepada BI dan bukan APBN.
- Menanggapi surat Menteri Keuangan Nomor S-228/MK.01/2011 tanggal 5 Mei 2011 tersebut, Bank Indonesia telah menyampaikan surat Nomor 14/1/GBI/DKBU tanggal 26 Maret 2012. Dalam surat tersebut Bank Indonesia menyatakan bahwa:
 - Dalam LKTBI Tahun 2009 dan 2010 (*audited*) tagihan bunga FSD kepada eks. BTO memang disajikan sebagai "Tagihan kepada Bank sesuai angka 2 surat Kementerian Keuangan Nomor S-228/MK.01/2011 tanggal 5 Mei 2011. Namun demikian, berdasarkan catatan atas LKTBI dimaksud dijelaskan bahwa tagihan bunga FSD kepada eks. BTO telah diperhitungkan oleh Pemerintah c.q. BPPN dalam proses rekapitalisasi eks. BTO tersebut.
 - Dengan telah diperhitungkannya tagihan bunga FSD kepada eks. BTO dalam proses rekapitalisasi oleh Pemerintah c.q. BPPN dan berdasarkan penelitian terhadap dokumen pendukung yang diserahkan
- *Through his letter Number S-228/MK.01/2011, dated May 5, 2011, the Minister of Finance stated that bearing in mind that in the Bank Indonesia Financial Statements for 2009, the FSD claims had been recorded as claims on banks rather than as claims on government, up until the 2009 Central Government's annual financial statements and the Notes to the Financial Statements, there had been no recognition of the claims so that the FSD interest should be borne by Bank Indonesia rather than the National Budget.*
- *In response to the said letter number S-228/MK.01/2011, dated May 5, 2011, Bank Indonesia sent letter Number 14/1/GBI/DKBU dated March 26, 2012 in which Bank Indonesia stated the following:*
 - *That it was true that the Bank Indonesia Financial Statements for 2009 and 2010 (audited) presented the FSD interest claim as "Claims on Banks", as stated in the Minister of Finance's Letter Number S-228/MK.01/2011, dated May 5, 2011. However, in the Notes to the Financial Statements it was explained that the FSD interest claims had been included by the Government (through the BPPN) in the recapitalization process.*
 - *With the inclusion of the FSD interest claims in the recapitalization process by the Government (through the BPPN) and based on a study of supporting documents provided by PT Bank Danamon Tbk, the*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2011

oleh PT Bank Danamon Tbk., maka tagihan bunga FSD kepada eks. BTO yang semula "Tagihan kepada Bank" menjadi "Tagihan kepada Pemerintah".

Pada tanggal 26 April 2012, Bank Indonesia sesuai Keputusan Rapat Dewan Gubernur meng-*off balance sheet*-kan tagihan bunga FSD tersebut. Namun demikian, Bank Indonesia tetap melanjutkan tugas pengelolaan tagihan bunga FSD eks. BTO termasuk upaya penagihan, dengan mempertimbangkan bahwa tagihan tersebut merupakan aset yang masih memerlukan tindak lanjut yang komprehensif – lihat Catatan C.14 dan C.15.

9. Utang PPN

Atas utang PPN periode Desember 2006 s.d. Desember 2009 dan Januari s.d. Desember 2011, Bank Indonesia dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan denda sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

10. Tagihan Kepada PT MNN

PT MNN melakukan wanprestasi pekerjaan pemeliharaan mesin sortasi uang kertas. Sesuai perjanjian, Bank Indonesia berhak menunjuk pihak lain untuk meneruskan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan yang belum diselesaikan oleh PT MNN, apabila biaya penyelesaian pekerjaan pemeliharaan yang telah diselesaikan oleh pihak lain lebih besar daripada biaya yang wajib dibayarkan kepada PT MNN, maka pihak PT MNN membayar selisih biaya tersebut. Saat ini sedang dilakukan klarifikasi atas kewajiban PT MNN.

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2011

FSD interest claims on the ex BTO had been reclassified as "Claims on Government" rather than "Claims on Banks."

On April 26, 2012, Bank Indonesia, in accordance with a Resolution of the Board of Governors, removed the FSD interest claims from the balance sheet. Nevertheless, Bank Indonesia will continue to perform its duty to manage the FSD interest claims, including endeavoring to ensure their recovery, based on the consideration that these claims constitute assets that require comprehensive resolution – see Notes C.14 and C.15.

9. VAT Arrears

In respect of VAT arrears for the periods of December 2006 to December 2009 and January to December 2011, Bank Indonesia is liable to administrative sanctions in the form of interest and penalties under Act Number 28 of 2007 on the Third Amendment to Act Number 6 of 1983 on General Taxation Provisions and Procedures.

10. Claims on PT MNN

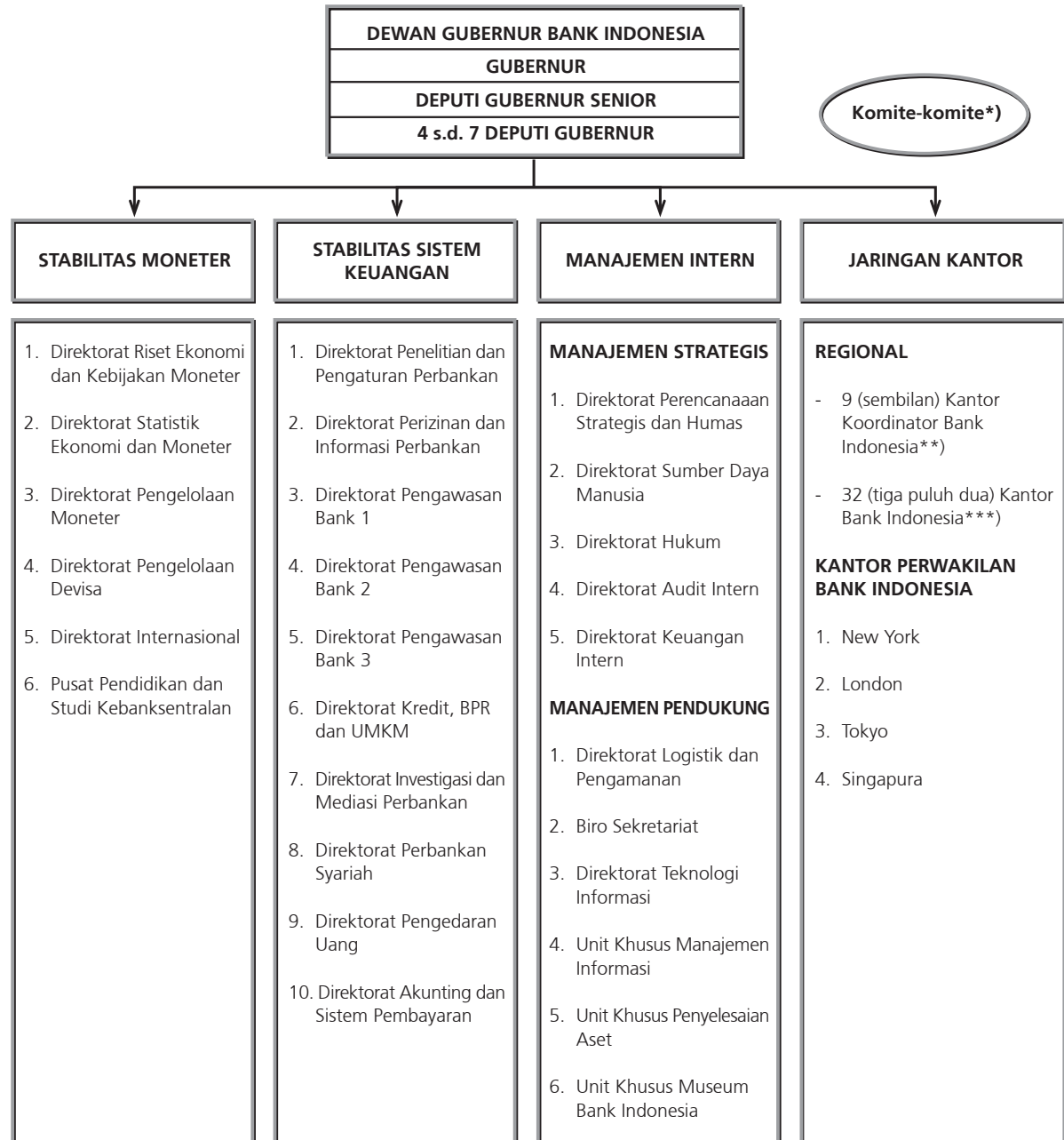
PT MNN failed to perform its obligations under a contract to maintain money sorting machines. Under the agreement, Bank Indonesia is entitled to appoint a third party to continue the maintenance work that was not completed by PT MNN. In such circumstances, should the cost of contracting a third party to finish the work be greater than the cost that should be paid to PT MNN, then PT MNN is required to indemnify Bank Indonesia in respect thereof. Bank Indonesia is currently seeking clarification as regards this matter with PT MNN.

LAMPIRAN

Appendices



STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA



***) KOMITE DI BANK INDONESIA**

1) Komite Kebijakan Moneter, 2) Komite Stabilitas Sistem Keuangan, 3) Komite Pengaturan dan Pengawasan Perbankan, 4) Komite Internasional, 5) Komite Perencanaan Anggaran dan Manajemen Kinerja (PAMK), 6) Komite Sumber Daya Manusia.

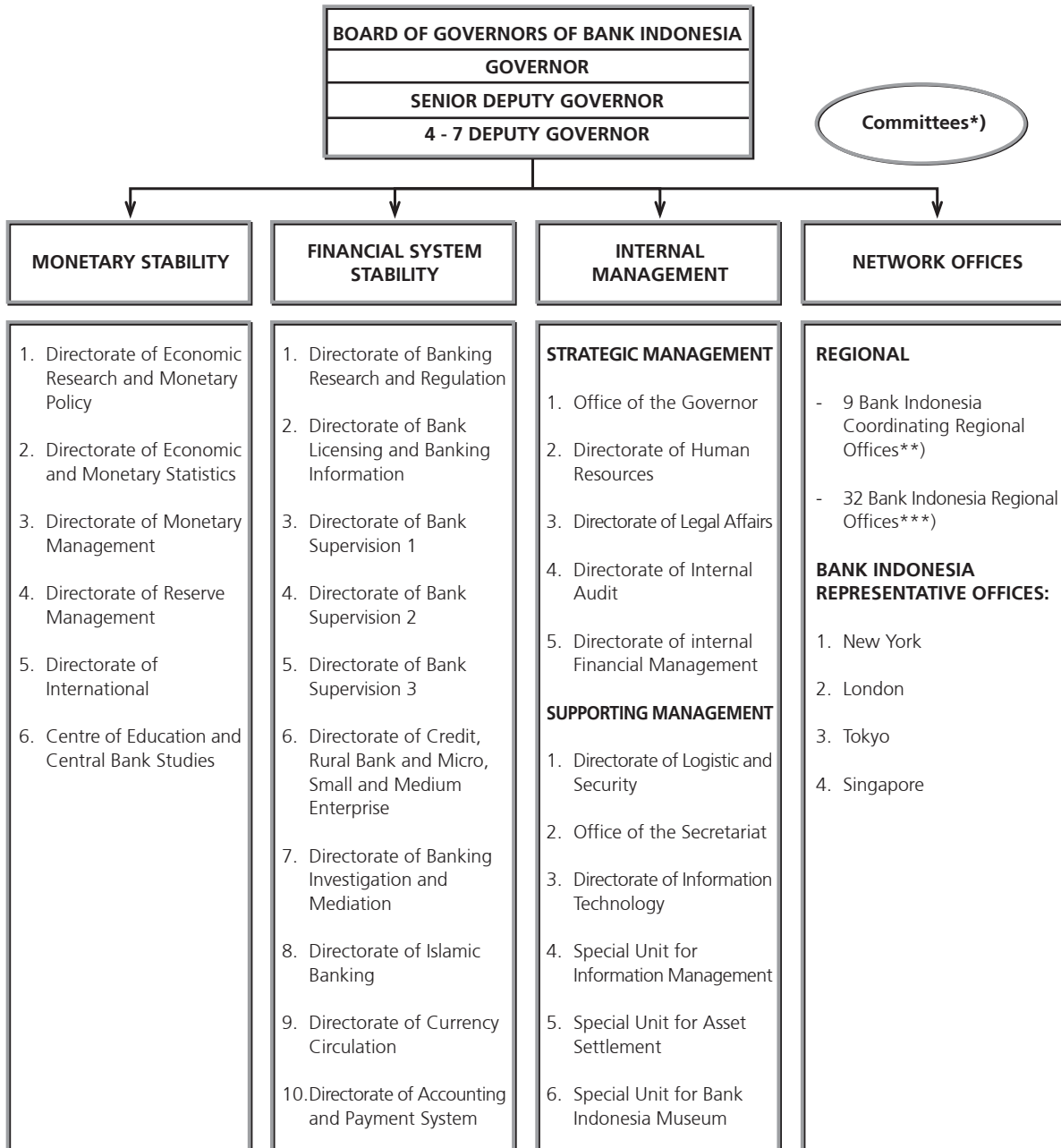
*****) 9 KANTOR KOORDINATOR BANK INDONESIA (KKBI)**

1) Surabaya; 2) Bandung, 3) Semarang, 4) Medan, 5) Denpasar, 6) Makassar, 7) Palembang, 8), Padang, 9) Banjarmasin.

******) 32 KANTOR BANK INDONESIA (KBI)**

1) Solo, 2) Pekanbaru, 3) Yogyakarta, 4) Cirebon, 5) Malang, 6) Manado, 7) Bandar Lampung, 8) Samarinda, 9) Mataram, 10) Tasikmalaya, 11) Pontianak, 12) Kediri, 13) Jayapura, 14) Purwokerto, 15) Jambi, 16) Jember, 17) Banda Aceh, 18) Bengkulu, 19) Batam, 20) Ambon, 21) Kupang, 22) Palu, 23) Kendari, 24) Palangkaraya, 25) Balikpapan, 26) Lhokseumawe, 27) Ternate, 28) Sibolga, 29) Serang, 30) Gorontalo, 31) Tegal, 32) Pematang Siantar.

ORGANIZATION STRUCTURE OF BANK INDONESIA



*) **BANK INDONESIA COMMITTEES**
 1) Monetary Stability Committee, 2) Financial System Stability Committee, 3) Banking Regulation and Supervision Committee, 4) International Committee, 5) Budget Planning and Performance Management Committee (PAMK), 6) Human Resources Committee.

***) **9 BANK INDONESIA REGIONAL COORDINATING OFFICES**
 1) Surabaya, 2) Bandung, 3) Semarang, 4) Medan, 5) Denpasar, 6) Makassar, 7) Palembang, 8), Padang, 9) Banjarmasin.

***) **32 BANK INDONESIA REGIONAL OFFICES**
 1) Solo, 2) Pekanbaru, 3) Yogyakarta, 4) Cirebon, 5) Malang, 6) Manado, 7) Bandar Lampung, 8) Samarinda, 9) Mataram, 10) Tasikmalaya, 11) Pontianak, 12) Kediri, 13) Jayapura, 14) Purwokerto, 15) Jambi, 16) Jember, 17) Banda Aceh, 18) Bengkulu, 19) Batam, 20) Ambon, 21) Kupang, 22) Palu, 23) Kendari, 24) Palangkaraya, 25) Balikpapan, 26) Lhokseumawe, 27) Ternate, 28) Sibolga, 29) Serang, 30) Gorontalo, 31) Tegal, 32) Pematang Siantar.

DAFTAR SINGKATAN

List of Abbreviations and Acronyms

ADB	:	Asian Development Bank
AJDF	:	ASEAN Japan Development Fund for Indonesia
APMK	:	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (<i>Card-Based Payment Equipment</i>)
AUD	:	Australian Dollar
Baperum	:	Bantuan Pemilikan Rumah (<i>Housing Assistance</i>)
Bappenas	:	Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (<i>National Development Planning Agency</i>)
BBKU	:	Bank Beku Kegiatan Usaha (<i>Suspended Bank Business Operations</i>)
BBO	:	Bank Beku Operasi (<i>Operation-Suspended Bank</i>)
BKP	:	Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan (<i>Pensioner Health Assistance</i>)
BI	:	Bank Indonesia
BIS	:	Bank for International Settlements
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Liquidity Assistance</i>)
BPK RI	:	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (<i>Republic of Indonesia State Audit Board</i>)
BPM6	:	Balance of Payment Manual 6
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional (<i>Indonesia Banking Restructuring Agency</i>)
bps	:	Basis point(s)
BTO	:	Bank Take Over
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah (<i>Local Government-Owned Enterprise</i>)
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara (<i>State-Owned Enterprise</i>)
BUN	:	Bendaharawan Umum Negara (<i>General State Treasurer</i>)
CAD	:	Canadian Dollar
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan (<i>Notes to the Financial Statements</i>)
DAPENBI	:	Dana Pensiun Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Pension Fund</i>)
DG	:	Dewan Gubernur (<i>Board of Governors</i>)
DGS	:	Deputi Gubernur Senior (<i>Senior Deputy Governor</i>)
DKBU	:	Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM (<i>Directorate of Credit, Rural Banks and Micro, Small and Medium Enterprise</i>)
DKP	:	Dana Kesejahteraan Pegawai (<i>Employee Welfare Fund</i>)
DMO	:	Domestic Market Obligation
DpG	:	Deputi Gubernur (<i>Deputy Governor</i>)
DPK	:	Dana Pihak Ketiga (<i>Third Party Deposits</i>)
DPM	:	Direktorat Pengelolaan Moneter (<i>Directorate of Monetary Management</i>)
DPNP	:	Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (<i>Directorate of Banking Research and Regulation</i>)
DPR RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (<i>Republic of Indonesia House of Representatives</i>)
EUR	:	Euro
FASBIS	:	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (<i>Bank Indonesia Sharia Deposit Facility</i>)
FPN	:	Floating Principal Notes
FSD	:	Fasilitas Saldo Debet (<i>Debit Balance Facility</i>)
GBP	:	Great Britain Poundsterling

GTZ	: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
GWM	: Giro Wajib Minimum (<i>Minimum Reserve Requirement</i>)
HCU	: Hak Cetak Uang (<i>Currency Printing Right</i>)
HIPC	: Heavily Indebted Poor Countries
IAS	: International Accounting Standard
IBA	: Indover Bank Amsterdam
IBRD	: International Bank for Reconstruction and Development
IILM	: International Islamic Liquidity Management
IMF	: International Monetary Fund
Indover Bank	: N.V. De Indonesische Overseeze Bank
ING	: International Netherlands Group
IPBV	: Indo Plus Besloten Vennootschap
Jamkrindo	: Jaminan Kredit Indonesia (<i>Credit Insurance Indonesia</i>)
Jamsostek	: Jaminan Sosial Tenaga Kerja (<i>Social Security Workers</i>)
JPY	: Japanese Yen
Kakandepkop	: Kepala Kantor Departemen Koperasi (<i>Head of Department of Cooperatives Office</i>)
Kejari Jakbar	: Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (<i>West Jakarta District Prosecution Office</i>)
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik (<i>Public Appraiser's Office</i>)
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerjasama (<i>Contractor under collaboration contract</i>)
KLBI	: Kredit Likuiditas Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Liquidity Credit</i>)
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan (<i>Minister of Finance Decree/Decision</i>)
KPMM	: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (<i>Capital Adequacy Ratio</i>)
KPP BUMN	: Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (<i>Tax office for state-owned enterprises</i>)
KUT	: Kredit Usaha Tani (<i>Farm credit scheme</i>)
L/C	: Letter of Credit
LDR	: Loan to Deposit Ratio
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan (<i>Audit Report</i>)
LIBOR	: London Inter-Bank Offered Rate
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (<i>Central Government Financial Statements</i>)
LKTBI	: Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Financial Statements</i>)
Ltd.	: Limited
MARI	: Mahkamah Agung Republik Indonesia (<i>Republic of Indonesia Supreme Court</i>)
Menkeu	: Menteri Keuangan (<i>Minister of Finance</i>)
MRUK	: Mesin Racik Uang Kertas (<i>Paper Currency Shredding Machine</i>)
MSUK	: Mesin Sortasi Uang Kertas (<i>Paper Currency Sorting Machine</i>)
MYR	: Ringgit Malaysia (<i>Malaysian Ringgit</i>)
MXN	: Mexican Peso
NCP	: Net Currency Position
NPL	: Non Performing Loan
N.V.	: Naamloze Vennootschap
NZD	: New Zealand Dollar
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan (<i>Financial Service Authority</i>)
ON	: Obligasi Negara (<i>Treasury Bond</i>)
OPT	: Operasi Pasar Terbuka (<i>Open Market Operation</i>)
PAKBI	: Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Financial Accounting Guidelines</i>)

PBI	: Peraturan Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Regulation</i>)
PBSN	: Perkebunan Besar Swasta Nasional (<i>Major Domestic Private Sector Plantation</i>)
PDG	: Peraturan Dewan Gubernur (<i>Board of Governors Regulation</i>)
Pemda	: Pemerintah Daerah (<i>Regional Government</i>)
Persero	: Perusahaan Perseroan (<i>Limited Liability Company</i>)
Perum	: Perusahaan Umum (<i>Public Service Company</i>)
Peruri	: Percetakan Uang Republik Indonesia (<i>Republic of Indonesia Security Printing Company</i>)
PIPEBI	: Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Employees Wives Association</i>)
PK	: Peninjauan Kembali (<i>Final Supreme Court Review</i>)
PKP	: Pengusaha Kena Pajak (<i>Taxable Enterprise</i>)
PPBI	: Persatuan Pensiunan Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Pensioners' Association</i>)
PPH	: Pajak Penghasilan (<i>Income Tax</i>)
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai (<i>Value Added Tax</i>)
PRGF	: Poverty Reduction and Growth Facility (<i>Poverty Reduction and Growth Facilities</i>)
ProFi	: Extension of Promotion of Small Financial Institution
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (<i>Statement of Financial Accounting Standards</i>)
PT	: Perseroan Terbatas (<i>Limited Liability Company</i>)
PT BEII	: PT Bank Ekspor Impor Indoensia
PT IFI	: PT Indonesia Finance and Investment
PTK	: Pelaksana Tugas Kedinasan (<i>Persons Performing Official Duties</i>)
PT MNN	: PT Murni Nusantara Niaga
PT RMS	: PT Rekakarya Mardi Sarana
RDG	: Rapat Dewan Gubernur (<i>Board of Governors' Meeting</i>)
Repo	: Repurchase Agreement
RI	: Republik Indonesia (<i>Republic of Indonesia</i>)
RKUN	: Rekening Kas Umum Negara (<i>General State Cash Account</i>)
Rp	: Rupiah
SAK	: Standar Akuntansi Keuangan (<i>Financial Accounting Standards</i>)
SAL	: Sisa Anggaran Lebih (<i>Budget Surplus</i>)
SBI	: Sertifikat Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Certificate</i>)
SBIS	: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (<i>Bank Indonesia Sharia Certificate</i>)
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara (<i>State Sharia Marketable Securities</i>)
SDM	: Sumber Daya Manusia (<i>Human Resources</i>)
SDR	: Special Drawing Rights
SE	: Surat Edaran Bank Indonesia (<i>Circular</i>)
SGD	: Singapore Dollar
SKB	: Surat Keputusan Bersama (<i>Joint Decision</i>)
SLA	: Subsidiary Loan Agreement
SOL	: Subordinated Loan
SPN	: Surat Perbendaharaan Negara (<i>Treasury Bill</i>)
SPNS	: Surat Perbendaharaan Negara Syariah (<i>Sharia Government Bonds</i>)
SRBI	: Special Rate Bank Indonesia
SSB	: Surat-Surat Berharga (<i>Marketable Securities</i>)
SU	: Surat Utang (<i>Treasury Bonds</i>)
SUN	: Surat Utang Negara (<i>Marketable Treasury Bonds</i>)

SUP	: Surat Utang Pemerintah (<i>Government Bond</i>)
TAMJ	: Tunjangan Akhir Masa Jabatan (<i>End-of-Service Allowance</i>)
THT	: Tunjangan Hari Tua (<i>Retirement Benefit Program</i>)
TIBOR	: Tokyo Inter-Bank Offered Rate
TOZ	: Troy Ounce
TP	: Tahun Pengadaan (<i>Provision Year</i>)
TPSL	: Third-Party Securities Lending
TSL	: Two Step Loan
UFJ	: United Financial of Japan
UKPA	: Unit Khusus Penyelesaian Aset (<i>Special Unit for Asset Resolution</i>)
USD	: United States Dollar
UTLE	: Uang Tidak Layak Edar (<i>Money that is unfit for circulation</i>)
UU	: Undang-Undang (<i>Act of Parliament</i>)
Valas	: Valuta Asing (<i>Foreign Exchange</i>)
XAU	: Gold Change Rate
YASPORBI	: Yayasan Perguruan KORPRI Unit Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia KORPRI Unit Foundation</i>)
YKKBI	: Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Employee Welfare Foundation</i>)
YPPI	: Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (<i>Indonesian Banking Development Foundation</i>)
ZAR	: South African Rand